



*Kementerian PPN/
Bappenas*

PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA

Triwulan IV
2019



Kedeputian Bidang Ekonomi
Kementerian PPN/BAPPENAS

KATA PENGANTAR

Perkembangan Perekonomian Indonesia dan Dunia merupakan publikasi triwulanan yang diterbitkan oleh Kedeputan Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, yang didasarkan pada data dan informasi yang sudah dipublikasikan oleh Kementerian/Lembaga, instansi internasional, asosiasi, maupun hasil dari diskusi terbatas perkembangan ekonomi yang dilakukan bersama dengan beberapa Kementerian/Lembaga, pengamat, dan praktisi ekonomi.

Publikasi triwulan IV tahun 2019 ini memberikan gambaran dan analisis mengenai perkembangan ekonomi dunia dan Indonesia hingga triwulan IV tahun 2019. Dari sisi perekonomian dunia, publikasi ini memuat perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara kawasan Eropa, serta kondisi ekonomi regional Asia. Dari sisi perekonomian nasional, publikasi ini membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV tahun 2019 dari sisi moneter, fiskal, neraca perdagangan, investasi dan kerja sama internasional, industri dalam negeri, perekonomian daerah, serta proyeksi ekonomi kedepan.

Sangat disadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan dan penyempurnaan. Oleh sebab itu, masukan dan saran yang membangun dari pembaca tetap sangat diharapkan, agar tujuan dari penyusunan dan penerbitan publikasi ini dapat tercapai.

Jakarta, Februari 2020

Deputi Bidang Ekonomi BAPPENAS

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pertumbuhan ekonomi dunia masih melambat pada triwulan IV tahun 2019 meskipun tidak setajam periode sebelumnya. Hal ini didorong oleh kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang menunjukkan perkembangan positif. Pada triwulan ini, Tiongkok tumbuh 6,0 persen (YoY), stagnan dibandingkan triwulan sebelumnya, sementara Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura tumbuh masing-masing sebesar 2,3; 2,2; dan 0,8 persen (YoY). Sementara itu, perekonomian Jepang berkontraksi sebesar 0,4 persen (YoY).

Harga rata-rata komoditas energi pada triwulan IV tahun 2019 tidak berubah secara signifikan. Harga minyak mentah dan gas alam meningkat terbatas dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara harga batu bara masih turun meskipun tipis. Sementara itu, harga komoditas nonmigas meningkat terutama pada komoditas pertanian. Peningkatan harga juga terjadi pada komoditas logam mulia. Harga rata-rata emas pada triwulan IV tahun 2019 naik 20,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018.

Perlambatan ekonomi juga dialami Indonesia. Perekonomian Indonesia tumbuh 4,97 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2019, lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan sebelumnya sebesar 5,02 persen (YoY). Pertumbuhan pada triwulan ini masih didorong oleh sektor jasa yang tumbuh tinggi, meskipun kontribusinya pada PDB masih relatif kecil. Pertumbuhan paling tinggi berturut-turut adalah sektor jasa lainnya, jasa perusahaan, dan informasi komunikasi. Dari sisi pengeluaran, perlambatan terjadi pada semua komponen, dengan ekspor dan impor kembali mengalami kontraksi. Secara kewilayahan, sebagian besar wilayah di Indonesia tumbuh positif, kecuali Maluku dan Papua, yang meskipun masih berkontraksi, tetapi sudah lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Sampai dengan akhir Desember 2019, realisasi pendapatan negara mencapai 90,4 persen terhadap target APBN 2019 dengan capaian penerimaan pajak mencapai 86,5 persen. Rasio pajak Indonesia menunjukkan tren yang cenderung turun. Tanpa mobilisasi pendapatan dan perbaikan kualitas belanja, defisit ke depan berpotensi melebar terutama mempertimbangkan penerapan *omnibus law* perpajakan pada tahun 2021 yang berdampak pada penurunan pendapatan dalam jangka pendek. Sementara itu, kondisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turun dibandingkan triwulan IV tahun 2018 yang disebabkan oleh turunnya harga minyak mentah dan *lifting* minyak bumi.

Realisasi belanja negara hingga akhir Desember 2019 mencapai 93,9 persen dari alokasi APBN. Belanja pemerintah pusat mencapai 91,7 persen dari target APBN. Kinerja tersebut sejalan dengan pencapaian sasaran output strategis. Realisasi APBN secara keseluruhan mengalami defisit sebesar Rp353 triliun atau setara -2,2 persen terhadap PDB.

Kondisi pasar keuangan Indonesia masih terjaga. Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga sebanyak satu kali selama triwulan terakhir tahun 2019, yakni pada bulan Oktober 2019. Pada akhir triwulan IV tahun 2019, BI *7-day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 5,00 persen. Sepanjang triwulan IV, aliran masuk modal asing mencapai USD6,4 miliar, sejalan dengan nilai tukar Rupiah yang menguat hingga Rp13.866 per USD pada akhir Desember 2019.

Penguatan ini didorong oleh perbaikan kondisi internal dan pengurangan risiko yang berasal dari tekanan eksternal.

Inflasi periode Oktober 2019 hingga Desember 2019 cenderung rendah dan terkendali. Kondisi ini didorong oleh stabilnya inflasi inti dan inflasi harga diatur pemerintah ditengah peningkatan inflasi harga bergejolak. Dari sisi kelompok pengeluaran, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga inflasi menurun seiring dengan berakhirnya tahun ajaran baru pada bulan Oktober 2019. Sementara itu, inflasi kelompok bahan makanan meningkat terutama disebabkan oleh meningkatnya harga bawang putih, bawang merah, dan telur ayam.

Pada akhir triwulan IV tahun 2019, neraca pembayaran Indonesia surplus sebesar USD4,3 miliar, lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, lebih rendah dibandingkan triwulan IV tahun 2018. Surplus neraca pembayaran didorong oleh meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial diiringi dengan membaiknya defisit transaksi berjalan. Neraca perdagangan migas defisit lebih dalam dibandingkan triwulan IV tahun 2018. Nilai impor nonmigas turun sementara kinerja ekspor nonmigas relatif stabil meskipun turun. Defisit neraca jasa meningkat disebabkan oleh meningkatnya impor jasa. Cadangan devisa Indonesia pada triwulan IV tahun 2019 sebesar USD129,2 miliar. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Perekonomian global tahun 2020 diproyeksikan tumbuh lebih cepat, yakni sebesar 3,4 persen. Namun, negara-negara utama masih akan tumbuh melambat. Harga komoditas energi diproyeksi kembali melemah pada tahun 2020. Turunnya harga minyak mentah diprediksi berasal dari naiknya penawaran yang lebih cepat seiring dengan beroperasinya pipa baru Amerika Serikat. Komoditas non energi diproyeksi bergerak lebih stabil terutama komoditas utama Indonesia. Harga minyak kelapa sawit diprediksi stabil sementara nikel diperkirakan meningkat, didorong kebijakan pemerintah yang melarang ekspor nikel mentah dimulai sejak Januari 2020. Sementara harga logam mulia secara keseluruhan diproyeksi tetap meningkat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tidak akan mencapai arget yang ditetapkan seiring dengan besarnya *downside risk* yang dihadapi. Investasi dan konsumsi rumah tangga diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan. Kinerja investasi diperkirakan meningkat dengan akan disahkannya Undang-undang *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja. Konsumsi rumah tangga didorong oleh tingkat inflasi yang rendah, penerbitan kartu pra kerja, dan peningkatan alokasi Jaminan Kesehatan Nasional. Sementara ekspor diperkirakan dapat meningkat sejalan dengan peningkatan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) ke India dan berjalannya beberapa *Free Trade Agreement* sepanjang 2020-2021.

Terdapat beberapa risiko negatif yang dapat memicu rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, perlambatan ekonomi Tiongkok akibat wabah Covid-19 dan perang dagang. Kedua, volatilitas kelanjutan perang dagang yang akan dipengaruhi oleh hasil pemilihan Amerika Serikat. Ketiga, ketegangan di Timur Tengah yang akan meningkatkan harga minyak. Keempat, *shortfall* pendapatan negara pada tahun 2019 akan berdampak pada realisasi fiskal tahun 2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR	VI
<i>POLICY BRIEF</i>	1
I. PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA.....	7
II. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA	12
2.1 Produk Domestik Bruto	12
Investasi	18
Industri.....	23
Pariwisata.....	27
2.2 Produk Domestik Regional Bruto	30
2.3 Fiskal	37
2.4 Moneter dan Jasa Keuangan	44
Moneter	44
Jasa Keuangan	48
2.5 Neraca Pembayaran	56
Neraca Perdagangan	59
Kerjasama Ekonomi Internasional.....	64
III. PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI	71
3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global	71
3.2 Proyeksi Perekonomian Indonesia	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Suku Bunga Kebijakan Beberapa Negara	9
Tabel 2 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13
Tabel 3 Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran	14
Tabel 4 Pertumbuhan Ekonomi	16
Tabel 5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	18
Tabel 6 Realisasi Total PMA dan PMDN Berdasarkan Sektor Besar	19
Tabel 7 Realisasi PMA dan PMDN Berdasarkan Kategori Utama Sektor Ekonomi	19
Tabel 8 Lima Sektor Realisasi PMA Terbesar	20
Tabel 9 Lima Sektor Realisasi PMDN Terbesar	20
Tabel 10 Realisasi dan Target Realisasi PMA dan PMDN	20
Tabel 11 Proporsi PMDN terhadap Total Realisasi PMA dan PMDN	21
Tabel 12 Realisasi PMA berdasarkan Negara Asal Investasi	21
Tabel 13 Realisasi PMA Berdasarkan Lokasi	21
Tabel 14 Realisasi PMDN Berdasarkan Lokasi	21
Tabel 15 Lima Provinsi dengan Realisasi PMA dan PMDN Terbesar	22
Tabel 16 Lima Provinsi dengan Realisasi PMA dan PMDN Terbesar	23
Tabel 17 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	36
Tabel 18 Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa	41
Tabel 19 Perkembangan Komponen Pembiayaan	42
Tabel 20 Realisasi APBN s.d. 31 Desember 2018 dan 2019	43
Tabel 21 Perkembangan Suku Bunga 7DRRR	44
Tabel 22 Tingkat Inflasi Domestik	46
Tabel 23 Tingkat Inflasi Domestik berdasarkan Komponen	47
Tabel 24 Inflasi Kelompok Pengeluaran	47
Tabel 25 Perkembangan Kredit Bank Umum Konvensional di Indonesia	50
Tabel 26 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah	54
Tabel 27 Penyaluran Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha	55
Tabel 28 Aset IKNB Syariah 2018 – 2019	56
Tabel 29 Neraca Perdagangan dan Tingkat Pertumbuhan Ekspor Impor	59
Tabel 30 Nilai dan Tingkat Pertumbuhan Ekspor	59
Tabel 31 Perkembangan Nilai Ekspor Nonmigas Berdasarkan 10 Negara Tujuan Ekspor Utama	60
Tabel 32 Perkembangan Nilai Ekspor Berdasarkan 10 Golongan Barang HS 2 Dijit Terbesar	60
Tabel 33 Kontribusi Ekspor Berdasarkan Klasifikasi Teknologi	61
Tabel 34 Nilai dan Tingkat Pertumbuhan Impor	62
Tabel 35 Perkembangan Nilai Impor Nonmigas Berdasarkan 10 Negara Asal Impor Utama	63
Tabel 36 Perkembangan Nilai Impor Berdasarkan 10 Golongan Barang HS 2 Dijit Terbesar	63
Tabel 37 Perjanjian Internasional Indonesia	66
Tabel 38 Kinerja Perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra FTA dalam	68
Tabel 39 Neraca Pembayaran	69
Tabel 40 Proyeksi Pertumbuhan Beberapa Negara	72
Tabel 41 Proyeksi Harga Komoditas Global	72
Tabel 42 Konsensus Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	73

Tabel 43 PDB Berdasarkan Pengeluaran	74
Tabel 44 PDB Berdasarkan Lapangan Usaha	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara.....	7
Gambar 2 Perkembangan Harga Minyak Mentah.....	9
Gambar 3 Perkembangan Harga Gas Alam	9
Gambar 4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	12
Gambar 5 Pertumbuhan PDB Sisi Produksi Triwulan IV Tahun 2019	13
Gambar 6 Perkembangan Konsumsi RT dan Investasi terhadap PDB	15
Gambar 7 Indeks Tendensi Bisnis Tahun 2018-2019	17
Gambar 8 Indeks Tendensi Konsumen Triwulan IV 2019	18
Gambar 9 Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas	23
Gambar 10 Pertumbuhan Subsektor Industri Pengolahan Nonmigas	23
Gambar 11 Pertumbuhan Subsektor Industri Pengolahan Nonmigas Triwulan IV Tahun 2019	24
Gambar 12 Penjualan Mobil.....	25
Gambar 13 Produksi, Penjualan Domestik, dan Ekspor Semen.....	25
Gambar 14 Ekspor Produk Industri	25
Gambar 15 Investasi Domestik (PMDN) Sektor Industri	26
Gambar 16 Investasi Asing (PMA) Sektor Industri.....	27
Gambar 17 <i>Purchasing Manager Index</i> (PMI) Sektor Manufaktur	27
Gambar 18 Jumlah Wisatawan Mancanegara per Triwulan Tahun 2017-2019	28
Gambar 19 Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun 2015-2019	28
Gambar 20 Nilai Devisa per Kuartal Tahun 2017-2019.....	28
Gambar 21 Nilai Devisa Tahun 2015-2019	29
Gambar 22 Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Secara Spasial.....	32
Gambar 23 Realisasi Komponen Penerimaan Perpajakan	37
Gambar 24 Perkembangan Penerimaan Perpajakan 2014-2019	38
Gambar 25 Perkembangan Komponen Belanja Negara	38
Gambar 26 Perkembangan Realisasi Defisit APBN.....	41
Gambar 27 Perkembangan Utang Pemerintah Pusat	42
Gambar 28 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD	45
Gambar 29 <i>Real Effective Exchange Rate</i> ASEAN-5.....	45
Gambar 30 Perkembangan Uang Beredar	46
Gambar 31 Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IKK) dan Inflasi Inti, 2018-2019	46
Gambar 32 Perkembangan Indeks Harga Pangan Strategis Nasional	47
Gambar 33 Kinerja Perbankan Konvensional	48
Gambar 34 Pertumbuhan DPK Bank Konvensional	49
Gambar 35 Pertumbuhan Kredit Bank Konvensional.....	49
Gambar 36 Capaian Penyaluran KUR	50
Gambar 37 Perkembangan Industri Teknologi Keuangan (<i>peer-to-peer lending</i>)	51
Gambar 38 Pertumbuhan Total Aset Industri Asuransi	52
Gambar 39 Perkembangan Jumlah Aset Bersih dan Jumlah Investasi Dana Pensiun	52
Gambar 40 Perkembangan IHSG dan Nilai Kapitalisasi Pasar Saham.....	52
Gambar 41 Perkembangan Outstanding Obligasi Korporasi	53
Gambar 42 Kinerja Perbankan Syariah	53

Gambar 43 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah.....	54
Gambar 44 Perkembangan Nilai Kapitalisasi Pasar Saham ISSI, JII dan JII70	55
Gambar 45 <i>Outstanding</i> Sukuk Korporasi.....	56
Gambar 46 Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia	56
Gambar 47 Neraca Jasa Perjalanan dan Transportasi.....	57
Gambar 48 Neraca Pendapatan Primer dan Sekunder	58
Gambar 49 Neraca Transaksi Finansial	58
Gambar 50 Proyeksi Ekspor Sektor Jasa	65
Gambar 51 Proyeksi Impor Sektor Jasa	65
Gambar 52 Proyeksi Investasi Jepang di Indonesia	66

POLICY BRIEF**PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI MAKRO & DAYA SAING UNTUK
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF & BERKUALITAS**

Oleh: Ir. Sidqy L. P. Suyitno, MA
(Fungsional Utama, Kementerian PPN/Bappenas)

Pendahuluan

Meskipun sepanjang tahun 2019 kondisi global masih dibayangi ketidakpastian dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, pada awal tahun 2020 muncul pertanda dini momentum stabilisasi dan membaiknya ekonomi dunia dengan tingkat pertumbuhan yang diperkirakan masih lamban (*sluggish*). Hal ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain tercapainya kesepakatan awal kebijakan perdagangan AS dan Tiongkok; kebijakan penurunan suku bunga acuan Bank Sentral AS (The Fed) tiga kali berturut-turut di semester kedua 2019 dan akan ditahan pada tahun 2020; serta kebijakan moneter yang longgar di beberapa negara maju lain seperti Jepang, Inggris, dan Uni Eropa.

Namun demikian dalam laporan pemutakhiran perkiraan perekonomian dunia (*World Economic Outlook*) bulan Januari 2020, International Monetary Fund (IMF) telah mengoreksi kebawah pertumbuhan ekonomi global 2020 sebesar -0,1 persen dari perkiraan bulan Oktober 2019 (3,4 persen) menjadi 3,3 persen. Meski demikian, ini merupakan peningkatan dari perkiraan pertumbuhan 2019 yang sebesar 2,9 persen. Faktor lain yang berpotensi mendorong ketidakpastian dan menekan pertumbuhan ekonomi global adalah hutang pemerintah dan korporasi di seluruh dunia yang meningkat pesat (lebih dari USD 70 triliun) dalam satu dekade terakhir, serta perkembangan geopolitik di

Timur-Tengah (antara AS, Arab Saudi, Turki, Irak, dan Iran) dan Laut Cina Selatan (antara Tiongkok, Indonesia, Vietnam, dan Filipina).

Sementara di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi terkendala oleh berbagai masalah struktural, sehingga sejak tahun 2015 tumbuh relatif stagnan pada kisaran 5 persen per tahun dan dibayangi ancaman jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap – MIT*). Kendala dalam negeri antara lain disebabkan oleh:

1. Kapasitas produksi nasional belum optimal karena industri manufaktur kurang berkembang. Hal ini menyebabkan perannya terhadap pembentukan PDB sejak reformasi terus menurun dari sekitar 32 persen pada tahun 1998 menjadi 20 persen tahun 2018. Selain itu, ekspor yang masih didominasi oleh bahan mentah dengan nilai tambah rendah karena belum diproses dalam industri pengolahan.
2. Belum efektifnya reformasi birokrasi dan deregulasi untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*good governance*), sehingga kurang optimal untuk mendorong investasi (terutama di industri pengolahan dan sektor yang bernilai tambah tinggi) serta menghambat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) yang pada tahun 2019 dan 2020 tetap di peringkat 73 dari 190 negara.

3. Kualitas sumberdaya manusia (SDM) juga menjadi faktor penghambat dan dalam Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) PBB tahun 2018 berada di peringkat 111 dari 189 negara. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh kualitas pendidikan di Indonesia yang belum setara dengan negara-negara *emerging economies* lainnya.

Kualitas pendidikan dunia dapat tercermin dari laporan PISA (*Programme of International Student Assessment*) yang disusun oleh OECD. Laporan PISA dilakukan setiap tiga tahun sekali untuk menilai kemampuan 600.000 anak berusia 15 tahun di 79 negara dalam bidang matematika, ilmu pengetahuan, dan membaca. Laporan PISA pada tahun 2018 menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada dalam 10 peringkat terbawah. Selain itu, berdasarkan versi *QS World University Ranking 2019*, hanya 3 universitas di Indonesia yang masuk dalam 500 universitas terbaik dunia dan semuanya berada di bawah peringkat 290. Kedua faktor tersebut beserta sejumlah faktor lainnya menyebabkan daya saing Indonesia relatif lemah di kancah global. Hal tersebut tercermin dari laporan WEF tentang Indeks Daya Saing Global (*Global Competitiveness Index – GCI*), dimana pada tahun 2019 daya saing Indonesia turun ke peringkat 50 (dari 142 negara) dibanding tahun 2018 (peringkat 45).

Kinerja ekonomi Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN5 dan BRICS+

Ketahanan ekonomi dapat tercermin dari 3 (tiga) indikator utama yaitu defisit transaksi berjalan, defisit APBN, dan inflasi. Dari tiga indikator Ketahanan Ekonomi tersebut, perlu diwaspadai bahwa satu di antaranya mendekati zona kurang aman, yaitu defisit

transaksi berjalan – DTB (*current account deficit – CAD*). Pada triwulan II tahun 2019 CAD sempat meningkat ke -2,9 persen atau hampir menyentuh batas tidak aman 3 persen. Namun pada triwulan III tahun 2019, defisit neraca berjalan turun menjadi -2,0 persen. Sementara itu, defisit neraca berjalan negara ASEAN5 lainnya dan negara BRICS+, kecuali Afrika Selatan cukup aman. Bahkan beberapa negara tersebut mengalami surplus. Defisit APBN Indonesia kurang dari 3 persen PDB sehingga relatif masih aman (-1,9 persen), sedangkan beberapa negara di atas 3 persen seperti Brazil & India (masing-masing 7,5 persen), Afrika Selatan (6,2 persen) Tiongkok (6,1 persen), Turki (4,6 persen), dan bahkan AS (5,6 persen). Namun, terdapat negara dengan surplus APBN yaitu: Singapura (4,3 persen), Jerman (1,1 persen), dan Rusia (1,0 persen). Dilihat dari indikator inflasi Indonesia relatif rendah (3,4 persen) namun diatas negara ASEAN5 lainnya, Brazil, dan Tiongkok.

Aspek pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas menunjukkan kinerja cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir sama dengan India (5,0 persen) dan di peringkat ke-2 dalam G-20 tetapi masih di bawah Tiongkok (6,2 persen) dan Filipina (5,5 persen) serta masih kurang kuat untuk mempercepat penurunan kemiskinan serta untuk keluar dari *middle income trap*. Sedangkan GDP perkapita (USD 4.200) hanya lebih baik dari Filipina (USD 3.300) dan India (USD 2.200). Di antara *Emerging Markets*, Indeks GINI Indonesia (39,1) masih dibawah Thailand (37,9) dan India (35,2) tapi lebih baik dari Malaysia (46,3), Rusia (42,6), Tiongkok (42,2), Brazil (51,5), dan bahkan AS (41,1 persen). Tingkat pengangguran sebesar 5,1 persen termasuk tinggi di ASEAN5 atau hanya lebih baik dari

Filipina (5,3 persen) tetapi lebih baik dari Afrika Selatan (29,0 persen). Turki (13,9 persen), Brazil (11,8 persen), dan India (5,9 persen). Tingkat kemiskinan (9,4 persen) harus dipacu agar dapat mengejar Thailand (7,9 persen) dan Tiongkok (1,7 persen).

Aspek keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) juga cukup baik, kecuali keseimbangan primer masih negatif sehingga harus diupayakan agar menjadi positif. Rasio stok utang (29,2 persen) masih dalam batas aman dan hanya di atas Rusia (16,5 persen) namun makin mendekati batas kritis konservatif 30 persen. Sementara beberapa negara di atas 100 persen PDB seperti Jepang (238 persen), Singapura (114 persen), dan AS (106 persen). Defisit APBN (-1,9 persen) sdh selaras dengan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Di antara BRICS+ hanya lebih buruk dari Rusia (1,0 persen) namun di antara ASEAN5 hanya lebih baik dari Malaysia (3,0 persen).

Dalam hal aspek stabilitas moneter cukup terkendali dan pasar modal cukup dinamis, namun harus tetap waspada. Inflasi relatif terkendali (3,4 persen) tapi paling tinggi di ASEAN5 dan lebih tinggi dari Brazil (2,9 persen) dan Tiongkok (3,0 persen). Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS (USD) termasuk menguat paling tinggi (7,3 persen) di antara Emerging Markets (ASEAN5 dan BRICS+) dan diperkirakan akan terus menguat jika daya saing semakin meningkat.

Untuk aspek daya saing, dalam *Global Competitiveness Index* 2019 Indonesia turun 5 peringkat dari tahun sebelumnya peringkat 45 ke posisi 50, hanya lebih baik dari Filipina yang peringkat 64 di ASEAN5 dan di bawah Tiongkok (peringkat 28) dan Rusia (peringkat 43) di antara negara

BRICS+. Peringkat *Human Development Index* (HDI) naik dari peringkat 116 (tahun 2018) ke 111/189 (tahun 2019) dan untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia masuk ke dalam kategori HDI tinggi (> 0,7). Namun, peringkat Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam (peringkat 118) [ASEAN5] serta Afrika Selatan (peringkat 113) dan India (peringkat 129) [BRICS+].

Kondisi ekonomi Indonesia saat ini dibandingkan ketika menghadapi krisis

Secara umum kondisi perekonomian Indonesia saat ini cukup baik, karena hanya tinggal 1 (satu) indikator yang masuk ke lampu kuning, yaitu neraca transaksi berjalan yang masih negatif atau mengalami defisit. Tampak bahwa pada saat krisis tahun 1997/1998 terdapat sembilan indikator yang berada dalam zona merah, yaitu politik dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, transaksi berjalan, nilai tukar, utang luar negeri, IHSG, kondisi perbankan, harga dan stok pangan, serta iklim usaha. Pada saat Krisis Keuangan Global tahun 2008, indikator yang terpuruk pada zona merah menjadi 4 (empat) indikator, yaitu inflasi, nilai tukar, utang luar negeri, dan IHSG. Pada saat *shock* pencabutan subsidi energi tahun 2014 menjadi 3 (tiga) indikator, yaitu neraca transaksi berjalan, inflasi, dan nilai tukar.

Dengan demikian, untuk memperbaiki kinerja perekonomian, Indonesia perlu fokus kepada upaya perbaikan neraca transaksi berjalan agar defisitnya berkurang dan akan jauh lebih baik jika menjadi positif/surplus. Tiga di antara empat komponen neraca transaksi berjalan menjadi penyebab defisit, yaitu defisit neraca perdagangan migas, defisit neraca jasa-jasa, dan defisit neraca pendapatan primer. Hanya neraca transaksi pendapatan

sekunder yang positif, yaitu sebesar USD 1,8 miliar. Selain ketiga komponen tersebut, penyebab utama lainnya adalah impor non-migas yang terlampau besar yang disebabkan oleh menurunnya peran industri manufaktur, terutama sebagai substitusi impor serta sebagai penghasil nilai tambah tinggi untuk ekspor dan berkontribusi terhadap pembentukan PDB.

Defisit neraca perdagangan migas terjadi terutama karena pemerintah belum menemukan sumur-sumur minyak baru sehingga cadangan minyak Indonesia turun drastis dari 11,6 miliar barel pada tahun 1980 menjadi 3,2 miliar barel pada tahun 2018. Akibatnya, sejak 2004 Indonesia menjadi *net importer* minyak. Selain itu pengembangan energi baru dan terbarukan (yang lebih ramah lingkungan) belum optimal antara lain karena kurangnya insentif untuk investasi kepada industri manufaktur.

Defisit neraca jasa-jasa timbul karena kurang berkembangnya jasa transportasi (*freight*) seiring peningkatan ekspor dan impor barang, kurang berkembangnya jasa lainnya seperti keuangan, teknologi dan infokom, dan hak atas kekayaan intelektual, serta perkembangan industri pariwisata yang tidak sesuai ekspektasi, terutama dari segi jumlah wisatawan mancanegara (wisman). Defisit neraca pendapatan primer merupakan penyumbang terbesar defisit neraca transaksi berjalan, yaitu sebesar USD -8,4 miliar pada triwulan III atau lebih besar dari defisit neraca transaksi berjalan yang sebesar USD -7,7 miliar.

Rekomendasi

Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi makro dan daya saing untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas, maka perlu

dilakukan beberapa langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

Meningkatkan ketahanan ekonomi makro dan tekanan eksternal, dibutuhkan upaya:

Pertama, agar defisit APBN terjaga di bawah batas kritis, perlu memacu upaya peningkatan penerimaan pajak (*tax effort*) yang juga menaikkan rasio pajak (*tax ratio*) antara lain melalui peningkatan kepatuhan (*tax compliance*), perluasan basis pajak dengan mengoptimalkan keterbukaan data bank, serta reformasi administrasi dan sistem informasi perpajakan.

Kedua, agar defisit CAD turun, harus ada upaya yang seksama untuk penurunan impor nonmigas serta defisit migas, pendapatan primer, dan jasa.

Percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas, dibutuhkan upaya:

Pertama, untuk memacu pertumbuhan, perlu peningkatan kapasitas produksi nasional, antara lain melalui percepatan pembangunan infrastruktur, revitalisasi dan perluasan industri manufaktur dan industri yang menciptakan nilai tambah tinggi, penuntasan reformasi birokrasi (terutama untuk kemudahan berusaha dan investasi), serta peningkatan mutu dan produktivitas SDM nasional.

Kedua, untuk memperluas pemerataan dan menurunkan kemiskinan, perlu percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru (Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus) bersinergi dengan pembangunan desa (implementasi dana desa), dan didukung oleh percepatan pembangunan konektivitas agar desa dan daerah tertinggal dapat mengakses sumber-sumber pertumbuhan.

Menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan dengan:

Untuk menurunkan stok utang sekaligus defisit APBN, selain perlu upaya keras untuk meningkatkan penerimaan negara, juga harus terus berupaya agar belanja semakin efisien dan efektif, serta difokuskan pada program/proyek/kegiatan yang produktif, terutama infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM.

Memperkuat stabilitas moneter dan pasar modal dibutuhkan upaya:

Pertama, agar inflasi lebih terkendali, perlu meningkatkan produktivitas dan memperluas sentra-sentra produksi pangan serta jalur-jalur distribusinya (konektivitas).

Kedua, perlu menjaga volatilitas dan memperkuat nilai tukar Rupiah dan pasar modal antara lain melalui kebijakan yang kredibel dan komunikasi yang efektif (untuk menjaga sentiment masyarakat), peningkatan ekspor, perbaikan iklim investasi, mengurangi kepemilikan asing di pasar modal/uang, dan pendalaman pasar keuangan.

Meningkatkan daya saing diperlukan upaya:

Pertama, memperkuat pilar-pilar daya saing, terutama yang peringkatnya di bawah 50 (9 diantara 12 pilar) dan yang terkait dengan ekonomi (infrastruktur, institusi, pasar tenaga kerja, serta stabilitas makro dan sistem keuangan).

Kedua, terus meningkatkan *Human Development Index* melalui pembangunan kesehatan (terutama menurunkan/menghapuskan *stunting*), peningkatan mutu pendidikan (terutama guru dan vokasi), serta menurunkan kemiskinan dan kesenjangan/rasio GINI.

Mengurangi CAD diperlukan upaya:

Pertama, mengurangi defisit neraca migas, antara lain dengan mengurangi impor migas selaras dengan meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan (gas, sawit, bayu, surya, panas bumi, PLTN thorium, dll); mereformasi iklim investasi di sektor energi; serta mencari cadangan energi baru.

Kedua, mengurangi defisit neraca jasa-jasa, terutama dengan mendorong pelaku dalam negeri untuk mengembangkan industri pengangkutan/pengapalan (*freight/cargo*); menarik/meningkatkan wisman; serta mendorong pengembangan jasa-jasa lainnya.

Ketiga, mengurangi impor, antara lain dengan meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri bersamaan dengan mendorong industri substitusi impor; serta mendorong industri yang berorientasi ekspor.

Keempat, mengurangi defisit pendapatan primer, antara lain dengan menerapkan *repatriation/surrender requirement*; meningkatkan *reserve requirement*; memperdalam pasar keuangan; serta mendorong pengusaha-pengusaha nasional untuk *GO INTERNATIONAL*.

Referensi

1. Bappenas, Laporan Perkembangan Ekonomi Triwulan-IV Tahun 2019 dan berbagai penerbitan lainnya
2. BI, Laporan Neraca Pembayaran Indonesia, berbagai penerbitan (2010 s/d 2019).
3. Bloomberg, berbagai artikel dari situs daring
4. IMF, *World Economic Outlook*, Update October 2019 dan Januari 2020
5. UNDP, *Human Development Report* 2018 dan 2019
6. WB, *Doing Business 2019 dan 2020*

I. PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA

AS dan Tiongkok sepakat untuk melaksanakan perjanjian dagang fase I.

Perundingan dagang kembali dilaksanakan pada bulan Oktober 2019. Meskipun pasar pesimis akan hasil dari pertemuan tersebut, Amerika Serikat dan Tiongkok akhirnya sepakat untuk segera melaksanakan perjanjian fase I. Pertemuan tersebut juga menyepakati tidak ada kenaikan bea masuk dari kedua negara selama proses perancangan kesepakatan fase I. Selain itu, penandatanganan perjanjian dagang dijadwalkan dilaksanakan pada bulan November 2019.

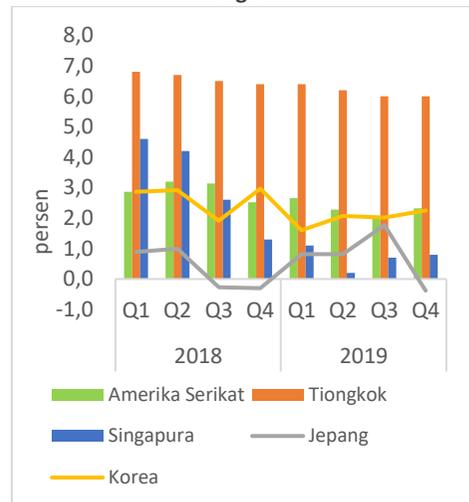
Pada bulan November 2019, hubungan kedua negara justru kembali memanas setelah Tiongkok menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menghapuskan seluruh tarif yang telah dinaikkan. Amerika Serikat tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan mengancam akan kembali menaikkan tarif. Seiring dengan pernyataan tersebut, Tiongkok mempertimbangkan untuk menunda kelanjutan pembahasan perjanjian dagang hingga agenda politik di Amerika Serikat selesai.

Perjanjian dagang kembali menunjukkan perkembangan positif pada akhir tahun 2019. Kondisi tersebut tercermin dari sikap kedua negara yang lunak terhadap satu sama lain. Tiongkok melakukan pelonggaran bea masuk atas sejumlah produk impor dari Amerika Serikat. Sementara itu, Amerika Serikat memotong tarif yang sudah berlaku dan menunda pemberlakuan tarif impor dari Tiongkok. Kedua negara akhirnya sepakat akan melakukan penandatanganan kesepakatan dagang pada minggu pertama bulan Januari 2020.

Pertumbuhan ekonomi sebagian negara masih melambat.

Ketidakpastian global mulai berkurang pada triwulan IV tahun 2019, sejalan dengan kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun, perekonomian dunia masih melambat pada triwulan IV tahun 2019. Meskipun perlambatan yang terjadi tidak setajam periode sebelumnya.

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara



Sumber: CEIC

Perekonomian Tiongkok mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan IV tahun 2019 sebesar 6,0 persen (YoY), stagnan dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, pertumbuhan triwulan tahun ini melambat dibandingkan triwulan IV tahun 2018 yang mencapai 6,4 persen (YoY). Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh melemahnya permintaan dari dalam dan luar negeri serta tekanan yang ditimbulkan oleh perang dagang dengan Amerika Serikat. Dengan pertumbuhan tersebut, pertumbuhan Tiongkok pada

tahun 2019 mencapai 6,1 persen, paling lambat selama 26 tahun terakhir. Meski begitu, angka tersebut masih dalam target pemerintah yang berada pada kisaran 6-6,5 persen.

Perekonomian Amerika Serikat juga mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sebesar 2,3 persen (YoY), lebih lambat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (2,5 persen, YoY), namun membaik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 2,1 persen (YoY). Semua komponen pengeluaran menunjukkan pertumbuhan yang meningkat kecuali impor yang turun dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didorong oleh meningkatnya konsumsi pakaian dan alas kaki serta jasa kesehatan. Sementara penurunan inventori terjadi pada perdagangan retail terutama kendaraan bermotor.

Perekonomian Korea Selatan juga mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan triwulan IV tahun 2018. Pada triwulan ini, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan mencapai 2,2 persen (YoY), paling lambat dalam 10 tahun terakhir. Perlambatan ini terutama disebabkan turunnya kinerja ekspor, terutama penurunan harga pada komoditas ekspor yang lebih besar dibandingkan impor.

Hal yang sama terjadi pada Singapura yang juga mengalami pertumbuhan ekonomi paling lambat dalam 10 tahun terakhir. Pada triwulan IV tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Singapura sebesar 0,8 persen (YoY), melambat dibandingkan triwulan IV tahun 2018 yang tumbuh sebesar 1,3 persen (YoY). Perlambatan terutama terjadi pada sektor manufaktur, namun diimbangi

dengan pertumbuhan sektor jasa yang mengalami akselerasi.

Perekonomian Jepang mengalami tekanan. Pertumbuhan Jepang pada triwulan IV tahun 2019 terkontraksi sebesar 0,4 persen, lebih dalam dibandingkan kontraksi yang terjadi pada periode yang sama tahun 2018 (0,3 persen, YoY). Hal ini disebabkan oleh turunnya konsumsi rumah tangga pada triwulan terakhir yang dipengaruhi oleh peningkatan pajak konsumsi menjadi 10 persen pada bulan Oktober 2019. Juga mengalami penurunan permintaan domestik akibat bencana topan Hagibis yang terjadi pada bulan Oktober 2019. Selain itu, melemahnya permintaan dari luar negeri juga menekan pertumbuhan ekonomi Jepang.

Sebagian negara masih melakukan pemotongan suku bunga.

Sebagian besar negara sudah mulai mengurangi aksi pemotongan suku bunga pada triwulan IV tahun 2019. Bank sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunga untuk ketiga kalinya sepanjang tahun 2019 pada bulan Oktober sebesar 25 bps. Suku bunga kebijakan Amerika Serikat pada akhir triwulan IV tahun 2019 sebesar 1,50-1,75 persen. The Fed mengisyaratkan untuk menghentikan penurunan suku bunga kecuali kondisi perekonomiannya memburuk.

Sementara itu, bank sentral Brazil dan Rusia juga memangkas suku bunga sebanyak dua kali pada bulan Oktober dan Desember 2019. Rusia memangkas suku bunga sebesar 50 bps pada bulan Oktober 2019 dan 25 bps pada bulan Desember 2019 menjadi 6,25 persen. Bank sentral Brazil menurunkan suku bunga 100 bps pada triwulan IV tahun 2019, membuat suku

bunga kebijakannya menjadi 4,50 persen pada akhir tahun.

Bank Indonesia menurunkan suku bunga sebesar 25 bps pada Oktober 2019 menjadi sebesar 5,00 persen sepanjang triwulan IV tahun 2019. Sedangkan Thailand menurunkan suku bunga sebesar 25 bps pada November 2019. Di sisi lain, bank sentral Filipina, Malaysia, dan Vietnam menahan tingkat suku bunga kebijakannya.

Tabel 1 Suku Bunga Kebijakan Beberapa Negara

	Okt	Nov	Des
BRIC			
Brazil	5,00	5,00	4,50
Rusia	6,50	6,50	6,25
India	5,15	5,15	5,15
Tiongkok	4,25	4,25	4,25
ASEAN-5			
Indonesia	5,00	5,00	5,00
Thailand	1,50	1,25	1,25
Filipina	4,00	4,00	4,00
Malaysia	3,00	3,00	3,00
Vietnam	6,00	6,00	6,00
Negara Maju			
Kawasan Eropa	0,00	0,00	0,00
Amerika Serikat	1,50-1,75	1,50-1,75	1,50-1,75
Jepang	-0,1	-0,1	-0,1

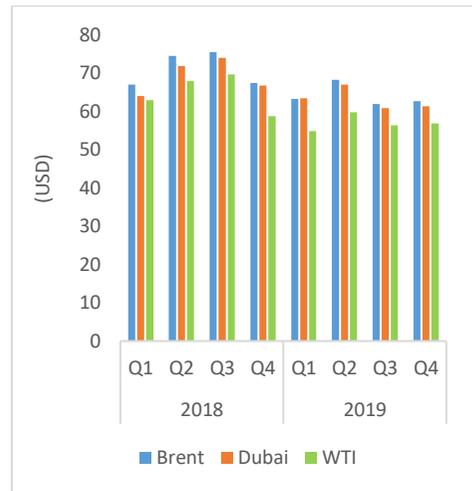
Sumber: Bloomberg, PBoC

Harga komoditas energi meningkat.

Harga minyak mentah sepanjang triwulan IV tahun 2019 terus meningkat setiap bulannya. Dalam perkembangannya, peningkatan ini terutama didorong oleh isu kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang masih belum jelas. Di sisi lain, anggota OPEC dan negara penghasil minyak lainnya sepakat menambah pemangkasan produksi pada tahun 2020 sebesar 500 ribu barel per hari. Penambahan sebanyak 340 ribu barel akan dilakukan oleh anggota OPEC, sementara

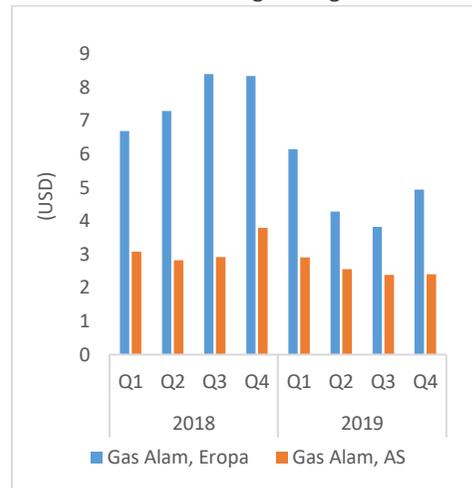
sisanya akan dilakukan oleh negara penghasil minyak lainnya. Kesepakatan tersebut berlaku efektif per 1 Januari 2020 dengan total pemangkasan sebesar 1,7 juta barel per hari.

Gambar 2 Perkembangan Harga Minyak Mentah



Sumber: World Bank

Gambar 3 Perkembangan Harga Gas Alam



Sumber: World Bank

Harga gas alam Eropa meningkat menjadi USD4,9 per mmbtu pada triwulan IV tahun 2019. Sementara itu, harga rata-rata gas alam Amerika Serikat menguat terbatas dari

USD2,39 pada triwulan III tahun 2019 menjadi USD2,41 per mmbtu pada triwulan IV tahun 2019. Hal ini tidak terlepas dari prakiraan yang menyebutkan bahwa cuaca dingin akan lebih ekstrim dan panjang pada sisa musim dingin ini.

Harga rata-rata batu bara kembali turun dari USD67,9 per metrik ton pada triwulan III tahun 2019 menjadi USD67,5 per metrik ton pada triwulan IV tahun 2019. Turunnya harga batu bara disebabkan oleh rendahnya permintaan seiring dengan kondisi perekonomian global yang belum stabil.

Harga komoditas nonmigas secara umum meningkat.

Beberapa komoditas pertanian yang mengalami peningkatan harga adalah cokelat, kedelai, minyak kelapa sawit, dan karet. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price* - ICP) pada triwulan IV tahun 2019 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, jika dibandingkan triwulan IV tahun 2018, harga ICP turun sebesar 2,6 persen.

Aluminium dan nikel mengalami penurunan. Harga aluminium kembali turun sejak triwulan III tahun 2018. Pada triwulan IV tahun 2019, harga rata-rata aluminium sebesar USD1.757 per metrik ton, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar USD1.764 per metrik ton. Sementara itu, harga nikel turun dari USD15.651 per metrik ton pada triwulan III menjadi USD15.349 per metrik ton pada triwulan ini.

Sementara itu, harga logam mulia kembali mengalami peningkatan. Ketidakpastian global yang tidak kunjung mereda, menyebabkan harga emas sebagai aset *safe haven* terus meningkat. Harga emas meningkat dari USD1.475 per troy ons menjadi USD1.482 per troy ons. Dibandingkan dengan harga emas pada triwulan IV tahun 2018, pada triwulan ini harga emas meningkat sebesar 20,6 persen (YoY).

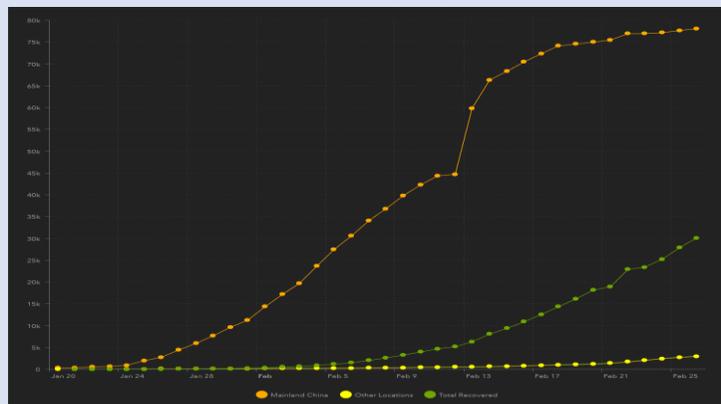
Box 1: Virus Corona Mengancam Perlambatan Ekonomi Global

Pada akhir bulan Januari 2020, dunia digemparkan dengan wabah virus Corona. Kasus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 dengan gejala yang mirip dengan pneumonia. Penyebaran virus ini terjadi begitu cepat. Hingga pertengahan Januari 2020, ratusan orang di Tiongkok telah terjangkit. Seminggu kemudian jumlah ini berlipat hingga menjadi ribuan orang dan menyebar ke berbagai negara.

Pemerintah Tiongkok mengambil langkah antisipatif untuk memperlambat penyebaran virus secara lebih luas. Wuhan diisolasi dengan menempatkan personel tentara pada setiap akses keluar dan masuk Wuhan, penerbangan sangat dibatasi, operasional semua transportasi publik dihentikan, dan tim medis bekerja selama 24 jam untuk melakukan perawatan pada pasien yang terus berdatangan. Negara lain juga mengambil langkah pencegahan dengan menerapkan kebijakan pelarangan penumpang dari Tiongkok masuk ke negaranya. Situasi ini akan banyak memberikan dampak pada sektor pariwisata beberapa negara terutama Korea Selatan dan Jepang yang menjadi destinasi utama bagi warga Tiongkok. Pariwisata Tiongkok sendiri juga akan terpuak karena kejadian ini bersamaan dengan perayaan tahun baru imlek yang merupakan hari libur panjang di Tiongkok. Dengan adanya wabah ini, pemerintah Tiongkok terpaksa memperpanjang hari libur hingga akhir Januari. Indonesia mengantisipasi dengan membatasi impor produk pertanian dari Tiongkok dan negara lainnya dengan kasus Corona.

Dengan semakin banyaknya jumlah kasus di berbagai negara, World Health Organization (WHO) menetapkan wabah virus Corona sebagai kondisi gawat darurat global. Meskipun virus ini tidak begitu mematikan seperti SARS, namun penyebarannya terjadi jauh lebih cepat. Wabah ini memberi dampak yang cukup besar pada aktivitas ekonomi internasional. Indeks bursa saham di berbagai negara menunjukkan pelemahan sementara indeks saham Shanghai jatuh hingga 9 persen saat kembali dibuka setelah libur panjang di Tiongkok. Harga minyak mentah internasional turun hingga 25 persen dan harga emas terus mengalami peningkatan hingga USD1.600 per troy ons. Wabah virus Corona ini menjadi isu baru bagi pelemahan aktivitas ekonomi global setelah isu perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok mereda.

Jumlah Kasus COVID-19



Sumber: Johns Hopkins CSSE, 26 Februari 2020

Sumber: CNN Indonesia, WHO, Johns Hopkins CSSE

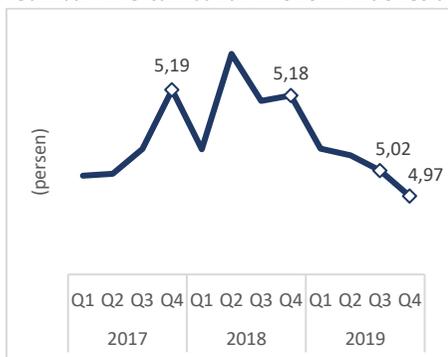
II. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

2.1 Produk Domestik Bruto

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertekan.

Perekonomian Indonesia tumbuh melambat pada triwulan IV tahun 2019 sebesar 4,97 persen (YoY). Secara struktural, tidak banyak perubahan yang terjadi pada sektor unggulan Indonesia. Tiga sektor terbesar masih terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi.

Gambar 4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan triwulan IV ini ditopang oleh seluruh lapangan usaha terutama sektor industri pengolahan. Meski melambat, sektor industri pengolahan masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar yakni sebesar 0,8 persen. Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada triwulan IV tahun 2019 sebesar 3,7 persen (YoY), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (4,2 persen, YoY). Perlambatan disebabkan salah satunya oleh kontraksi industri alat angkutan dan industri barang logam masing-masing sebesar 2,3 dan 2,1 persen (YoY).

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 12,7 persen (YoY). Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan produksi bahan kimia, barang dari kimia serta produk farmasi, obat kimia dan obat tradisional. Sementara itu, industri makanan minuman dan industri tekstil tumbuh masing-masing sebesar 7,9 dan 7,2 persen (YoY). Kedua industri tersebut ditopang oleh peningkatan produksi di daerah-daerah sentra produksi serta permintaan dari luar negeri yang masih tumbuh.

Sektor pertanian tumbuh lebih cepat.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 4,3 persen (YoY), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (3,8 persen, YoY). Produksi sektor ini secara umum meningkat kecuali produksi tanaman pangan dan kehutanan yang masing-masing berkontraksi sebesar 1,0 dan 0,2 persen (YoY). Penurunan produksi tanaman pangan disebabkan oleh cuaca ekstrem, musim kemarau yang lebih panjang dari tahun sebelumnya. Sementara itu, produksi tanaman perkebunan dan peternakan meningkat tajam menjadi 5,2 dan 7,9 persen. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan didorong oleh meningkatnya produksi kelapa sawit. Produksi peternakan juga meningkat untuk menyeimbangkan permintaan pada komoditas ayam ras, telur ayam, dan daging sapi.

Pertumbuhan sektor jasa semakin tinggi.

Di sisi lain, sektor jasa tumbuh semakin cepat meskipun kontribusi terhadap PDB

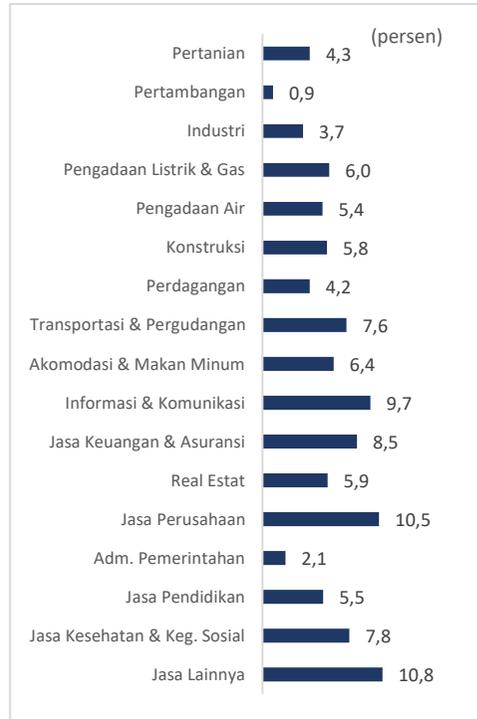
masih cenderung kecil. Sektor yang tumbuh paling cepat pada triwulan IV tahun 2019 berturut-turut adalah sektor jasa lainnya, jasa perusahaan, dan informasi komunikasi.

Jasa lainnya tumbuh sebesar 10,8 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2019, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2018 yang sebesar 9,0 persen (YoY). Jasa perusahaan tumbuh lebih cepat dari 9,0 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2018 menjadi 10,5 persen (YoY) pada triwulan ini. Sementara itu, informasi dan komunikasi tumbuh mencapai 9,7 persen (YoY).

Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 0,9 persen (YoY). Pertumbuhan positif tersebut didorong oleh pertumbuhan pertambangan batubara dan lignit serta pertambangan dan penggalian lainnya (7,9 persen, YoY). Tertahannya pertumbuhan sektor ini disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada pertambangan migas dan panas bumi sebesar 2,3 persen (YoY) serta

pertambangan bijih logam sebesar 4,1 persen (YoY).

Gambar 5 Pertumbuhan PDB Sisi Produksi Triwulan IV Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori PDB Lapangan Usaha	Nilai (Triliun Rupiah)			Tingkat Pertumbuhan (%)		Proporsi thd Total PDB Lapangan Usaha (%)
	Q4 2018	Q3 2019	Q4 2019	QtQ	YoY	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	346,4	369,6	361,1	-2,3	4,2	13,03
Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya	66,8	69,6	69,6	0,0	4,2	2,51
Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Motor	279,6	300,0	291,5	-2,9	4,3	10,52
Total PDB Lapangan Usaha	2.638,9	2.818,9	2.769,9	-1,7	5,0	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor pada triwulan IV tahun 2019 tumbuh sebesar 4,2 persen (YoY).

Sektor perdagangan besar tumbuh relatif stabil meskipun lebih lambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh faktor stabilitasnya produk domestik yang

diperdagangkan baik output industri pengolahan maupun dari pertanian.

Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor pada triwulan IV tahun 2019 mencapai Rp369,6 triliun. Pertumbuhan sektor perdagangan tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, namun masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Pertumbuhan tersebut utamanya berasal dari subsektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan motor yang mendominasi sektor ini (sebesar 80,7 persen) dengan tingkat pertumbuhannya pada triwulan IV tahun 2019 mencapai 4,3 persen (YoY). Sementara subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya tumbuh pada tingkat yang sedikit lebih rendah, yaitu 4,2 persen (YoY).

Secara kumulatif, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor pada tahun 2019 mencapai Rp1.440,5 triliun, atau tumbuh sebesar 4,6 persen (YoY).

Tabel 3 Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (persen)

Komponen	2018	2019			
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Konsumsi RT	5,1	5,0	5,2	5,0	4,97
Konsumsi LNPRT	10,8	17,0	15,3	7,4	3,5
Konsumsi Pemerintah	4,6	5,2	8,2	1,0	0,5
PMTB	6,0	5,0	4,6	4,2	4,1
Ekspor	4,6	-1,6	-1,7	0,1	-0,4
Impor	7,1	-7,5	-6,8	-8,3	-8,0
PDB	5,18	5,07	5,05	5,02	4,97

Sumber: Badan Pusat Statistik

Semua komponen pembentuk PDB sisi pengeluaran tumbuh melambat.

Di tengah kondisi perekonomian yang tidak pasti, pertumbuhan konsumsi rumah tangga relatif stabil. Konsumsi RT tumbuh 4,97 persen, lebih lambat dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Perlambatan tersebut terjadi disebabkan oleh melambatnya komponen konsumsi makanan dan minuman selain restoran, pakaian alas kaki dan jasa perawatannya, transportasi dan komunikasi. Penjualan eceran masih tumbuh namun hanya sebesar 1,5 persen, lebih lambat dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 4,7 persen.

Pada triwulan IV tahun 2019, nilai transaksi uang elektronik, kartu debit, dan kartu kredit tumbuh 3,8 persen, melambat dibandingkan triwulan IV tahun 2018.

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto melambat.

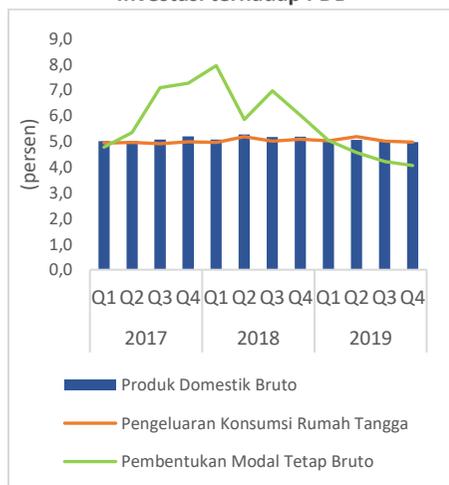
Pertumbuhan investasi pada triwulan IV tahun 2019 sebesar 4,1 persen lebih lambat baik dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan IV tahun 2018. Sebagian besar komponen PMTB mengalami kontraksi terutama barang modal jenis mesin dan perlengkapan yang menjadi motor pertumbuhan investasi. Hal tersebut terjadi karena turunnya produksi domestik dan impor. Pertumbuhan barang modal jenis mesin dan perlengkapan terkontraksi hingga 2,3 persen (YoY).

Barang modal jenis kendaraan juga terkontraksi sebesar 2,0 persen (YoY), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 6,3 persen (YoY). Namun, pertumbuhan

tersebut lebih rendah dari triwulan IV tahun 2018 yang tumbuh hingga 8,4 persen (YoY). Turunnya pertumbuhan barang modal kendaraan domestik dan impor menyebabkan pertumbuhan barang modal kendaraan berkontraksi.

Kinerja PMTB yang melambat ditahan oleh pertumbuhan barang modal jenis bangunan yang tumbuh 5,5 persen (YoY), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Hal ini didorong oleh pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang terus berlanjut, baik pembangunan baru maupun lanjutan.

Gambar 6 Perkembangan Konsumsi RT dan Investasi terhadap PDB



Sumber: Badan Pusat Statistik

Konsumsi pemerintah tumbuh 0,5 persen (YoY), jauh lebih lambat dibandingkan triwulan IV tahun 2018 yang tumbuh sebesar 4,6 persen (YoY). Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya realisasi belanja barang dan jasa. Sementara itu, realisasi belanja bantuan sosial masih mengalami peningkatan.

Kinerja ekspor barang dan jasa pada triwulan IV tahun 2019 masih berkontraksi sebesar 0,4 persen (YoY). Ekspor migas

terkontraksi cukup dalam sebesar 21,6 persen (YoY) sementara ekspor nonmigas masih tumbuh sebesar 1,7 persen (YoY). Jumlah ekspor produk sawit meningkat namun diiringi dengan penurunan harga di pasar internasional sehingga nilai secara keseluruhan mengalami penurunan. Di sisi lain, ekspor jasa tumbuh 3,6 persen (YoY), lebih lambat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun 2018. Terkontraksinya ekspor migas juga dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas internasional yang disertai dengan penurunan volume ekspor. Pertumbuhan positif pada ekspor jasa didorong oleh peningkatan wisatawan mancanegara pada triwulan berjalan.

Impor barang dan jasa berkontraksi lebih dalam dari ekspor. Kinerja impor pada triwulan IV tahun 2019 sebesar -8,1 persen (YoY) lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, tetapi lebih rendah dibandingkan triwulan IV tahun 2018 yang tumbuh positif sebesar 7,1 persen (YoY). Kondisi ini disebabkan oleh terkontraksinya impor barang migas dan nonmigas. Kontraksi impor nonmigas hingga 8,6 persen (YoY) terutama disebabkan oleh turunnya komoditas mesin/pesawat mekanik, mesin/peralatan listrik, serta besi dan baja. Sementara impor migas berkontraksi sebesar 12,5 persen (YoY) seiring dengan turunnya nilai dan volume impor minyak dan gas. Di sisi lain, impor jasa tumbuh positif didorong oleh naiknya aliran devisa keluar dan pengeluaran penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Tabel 4 Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2014 – Triwulan IV/2019
(persen pertumbuhan PDB, YoY)

	2014	2015	2016	2017	2018:1	2018:2	2018:3	2018:4	2019:1	2019:2	2019:3	2019:4
Produk Domestik Bruto	5,0	4,9	5,0	5,1	5,1	5,3	5,2	5,2	5,07	5,05	5,02	4,97
Konsumsi Rumah Tangga	5,1	5,0	5,0	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0	5,2	5,0	5,0
Konsumsi LNPRT	12,2	-0,6	6,6	6,9	8,1	8,8	8,6	10,8	17,0	15,3	7,4	3,5
Konsumsi Pemerintah	1,2	5,3	-0,1	2,1	2,7	5,2	6,3	4,6	5,2	8,2	1,0	0,5
PMTB	4,4	5,0	4,5	6,2	7,9	5,8	6,9	6,0	5,0	4,6	4,2	4,1
Ekspor Barang dan Jasa	1,1	-2,1	-1,6	8,9	5,8	7,5	8,3	4,6	-1,6	-1,7	0,1	-0,4
Impor Barang dan Jasa	2,1	-6,2	-2,4	8,1	12,5	14,9	13,8	7,1	-7,5	-6,8	-8,3	-8,0
Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	4,2	3,8	3,4	3,9	3,3	4,7	3,7	3,9	1,8	5,3	3,1	4,3
Pertambangan dan Penggalian	0,4	-3,4	0,9	0,7	1,1	2,6	2,7	2,2	2,3	-0,7	2,3	0,9
Industri Pengolahan	4,6	4,3	4,3	4,3	4,6	3,9	4,4	4,2	3,9	3,5	4,1	3,7
Industri Pengolahan Nonmigas	5,6	5,1	4,4	4,9	5,1	4,3	5,0	4,7	4,8	4,0	4,7	3,9
Listrik dan Gas	5,9	0,9	5,4	1,5	3,3	7,6	5,6	5,5	4,1	2,2	3,7	6,0
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang	5,2	7,1	3,6	4,6	3,6	3,9	6,2	7,9	8,9	8,3	4,9	5,4
Konstruksi	7,0	6,4	5,2	6,8	7,4	5,7	5,8	5,6	5,9	5,7	5,6	5,8
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	5,2	2,5	4,0	4,5	5,0	5,2	5,3	4,4	5,2	4,6	4,4	4,2
Transportasi dan Pergudangan	7,4	6,7	7,4	8,5	8,6	8,7	5,6	5,3	5,5	5,9	6,7	7,6
Akomodasi dan Makan Minum	5,8	4,3	5,2	5,4	5,2	5,6	5,9	5,9	5,9	5,5	5,4	6,4
Informasi dan Komunikasi	10,1	9,7	8,9	9,6	7,8	5,1	8,1	7,2	9,1	9,6	9,2	9,7
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,7	8,6	8,9	5,5	4,2	3,1	3,1	6,3	7,2	4,5	6,1	8,5
Real Estate	5,0	4,1	4,7	3,6	3,2	3,1	3,8	4,2	5,4	5,7	6,0	5,9
Jasa Perusahaan	9,8	7,7	7,4	8,4	8,0	8,9	8,7	8,9	10,4	9,9	10,2	10,5
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,4	4,6	3,2	2,0	5,8	7,2	7,9	7,1	6,4	8,9	1,9	2,1
Jasa Pendidikan	5,5	7,3	3,8	3,7	4,8	5,0	6,6	5,0	5,6	6,3	7,8	5,5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,0	6,7	5,2	6,8	6,1	7,1	7,5	7,8	8,6	9,1	9,2	7,8
Jasa lainnya	8,9	8,1	8,0	8,7	8,4	9,2	9,2	9,1	10,0	10,7	10,7	10,8
PDB Harga Berlaku (Rp Triliun)	10.570	11.526	12.402	13.590	3.511	3.686	3.842	3.799	3.784	3.964	4.067	4.019

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Indeks Tendensi Bisnis lebih tinggi dari prakiraan.

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan IV tahun 2019 sedikit lebih tinggi dari angka prakiraan. Namun, ITB tetap lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini mencerminkan optimisme pelaku usaha lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya meskipun kondisi bisnis berjalan lebih baik. ITB yang lebih rendah disebabkan oleh turunnya komponen penggunaan kapasitas usaha.

Gambar 7 Indeks Tendensi Bisnis Tahun 2018-2019



Catatan:

ITB berkisar antara 0 sampai dengan 200 dengan indikasi sebagai berikut:

- a. Nilai ITB < 100 menunjukkan kondisi pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya
- b. Nilai ITB=100 menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya
- c. Nilai ITB > 100 menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan lebih baik (meningkat) dibanding triwulan sebelumnya
- d. * = Angka prakiraan

Sumber: BPS, diolah

Optimisme usaha terbaik terjadi pada lapangan usaha administrasi

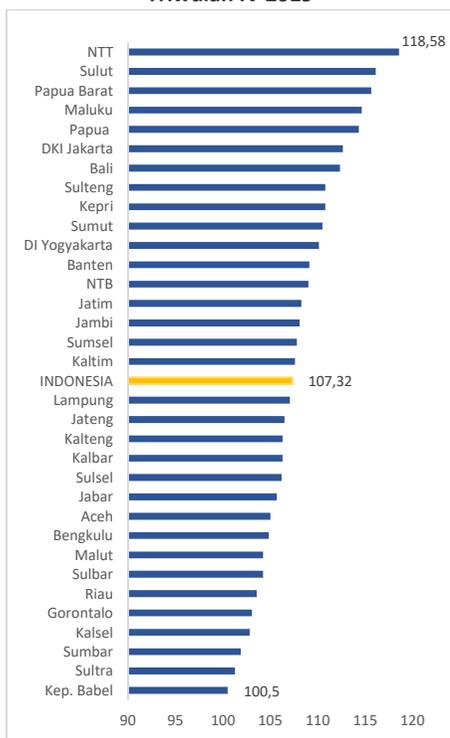
pemerintahan setelah pada triwulan sebelumnya menjadi sektor dengan ITB terendah. Sementara itu, terdapat empat sektor yang diindikasikan memiliki kondisi yang lebih buruk dibandingkan triwulan sebelumnya yakni sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan. Turunnya ITB pada sektor perdagangan disebabkan oleh turunnya nilai indeks pada semua komponen yakni pendapatan usaha (97,4), penggunaan kapasitas produksi/usaha (99,0), dan rata-rata jumlah jam kerja (98,4). Sementara itu, nilai indeks sektor pertanian turun pada komponen pendapatan usaha (97,3) dan penggunaan kapasitas produksi (96,8). Kondisi ini tidak terlepas dari faktor cuaca yang banyak mempengaruhi pendapatan usaha pertanian.

ITB pada triwulan I tahun 2020 diperkirakan sebesar 102,9. Kondisi bisnis diprediksi tetap tumbuh namun dengan optimisme pelaku bisnis yang lebih rendah dibandingkan triwulan ini. Peningkatan tersebut diprediksi didorong oleh peningkatan order dari dalam negeri, harga jual produk, dan order barang input. Sementara order dari luar negeri cenderung turun (nilai indeks sebesar 99,2) seiring dengan kondisi global yang masih belum stabil. Kondisi bisnis setiap sektor diperkirakan meningkat, kecuali sektor administrasi pemerintahan.

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Indonesia pada triwulan IV tahun 2019 sebesar 107,32. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi dan optimisme konsumen lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh adanya hari raya dan liburan. Indeks masing-masing provinsi juga

menunjukkan optimisme yang lebih baik. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan ITK tertinggi yakni sebesar 118,58. Sementara itu, ITK terendah adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 100,5.

Gambar 8 Indeks Tendensi Konsumen Triwulan IV 2019



Sumber: BPS, diolah

Optimisme konsumen diperkirakan lebih rendah pada triwulan I tahun 2020 yang ditunjukkan oleh ITK yang turun menjadi 103,2. Turunnya ITK pada triwulan selanjutnya diprediksi disebabkan oleh turunnya nilai komponen rencana pembelian barang tahan lama, rekreasi, dan pesta/hajatan. Kondisi tersebut sesuai dengan pola musimannya, salah satunya disebabkan oleh berkurangnya hari besar. Peningkatan kondisi ekonomi diperkirakan terjadi di 17 provinsi dengan ITK terendah adalah Provinsi Bengkulu.

Investasi

Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 4,1 persen YoY.

Dalam perhitungan PDB sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 4,1 persen (YoY) dan 3,7 persen (QtQ). Pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan CBR (*Cultivated Biological Resources*) sebesar 8,8 persen dan Bangunan 5,5 persen. Adapun komponen yang mengalami penurunan pertumbuhan yaitu Produk Kekayaan Intelektual sebesar 4,6 persen; Mesin dan Kendaraan 2,3 persen; dan Kendaraan 2,1 persen.

Tabel 5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto

Kategori PDB Pengeluaran	Nilai (Miliar Rupiah)			Pertumbuhan (%)		Proporsi thd Total PDB (%)
	Q4 2018	Q3 2019	Q4 2019	QtQ	YoY	
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	914,3	917,5	951,4	3,7	4,1	34,3
a. Bangunan	676,9	679,4	714,3	5,1	5,5	25,8
b. Mesin dan Kendaraan	104,7	105	102,3	-2,6	-2,3	3,7
c. Kendaraan	51,2	48,8	50,1	2,7	-2,1	1,8
d. Peralatan lainnya	15,2	15,2	15,2	0,0	0,0	0,5
e. CBR	46,7	47,2	50,8	7,6	8,8	1,8
f. Produk Kekayaan Intelektual	19,6	21,9	18,7	-14,6	-4,6	0,7
Total PDB Pengeluaran	2638,9	2818,9	2769,9	-1,7	5,0	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN triwulan IV tahun 2019 mencapai Rp208,3 triliun, mengalami peningkatan 1,3 persen dari triwulan III tahun 2019 (Rp205,7 triliun) dan meningkat 12,0 persen dari triwulan IV tahun 2018 (Rp185,9 triliun). Sektor sekunder dan tersier mengalami peningkatan masing-masing 30,2 persen dan 7,7 persen (YoY), sedangkan sektor primer mengalami penurunan 5,3 persen (YoY).

Tabel 6 Realisasi Total PMA dan PMDN Berdasarkan Sektor Besar

Periode	PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)			
	Primer	Sekunder	Tersier	Total
Q4 2018	30,4	52,7	102,9	185,9
Q3 2019	31,9	42,7	131,1	205,7
Q4 2019	28,8	68,6	110,8	208,3
Pertumbuhan (QtQ)	-9,7	60,7	-15,5	1,3
Pertumbuhan (YoY)	-5,3	30,2	7,7	12,0
Proporsi (%)	13,8	32,9	53,2	100,0

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Catatan: Kurs 2018: Rp13.400,00/USD

Kurs Q4 2019: Rp15.000,00/USD

Tabel 7 Realisasi PMA dan PMDN Berdasarkan Kategori Utama Sektor Ekonomi

Periode	PMA (Triliun Rupiah)				PMDN (Triliun Rupiah)			
	Primer	Sekunder	Tersier	Total	Primer	Sekunder	Tersier	Total
Q4 2018	16,1	32,3	50,6	99	14,2	20,4	52,3	86,9
Q3 2019	8,0	28,2	68,8	105	23,9	14,5	62,3	100,7
Q4 2019	13,9	48,8	42,6	105,3	14,9	19,8	68,2	103
Pertumbuhan (QtQ)	73,8	73,0	-38,1	0,3	-37,7	36,6	9,5	2,3
Pertumbuhan (YoY)	-13,7	51,1	-15,8	6,4	4,9	-2,9	30,4	18,5
Proporsi (%)	13,2	46,3	40,5	100,0	14,5	19,2	66,2	100,0

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

Catatan: Kurs 2018: Rp13.400,00/USD

Kurs Q4 2019: Rp15.000,00/USD

Realisasi PMA mencapai USD7.020,71 sedangkan realisasi PMDN mencapai Rp103,0 triliun

Realisasi PMA pada triwulan IV tahun 2019 adalah sebesar USD7.020,71 juta. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 5,0 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan komposisi antarsektor, realisasi PMA didominasi oleh sektor sekunder yakni sebesar 46,3 persen.

Realisasi PMDN pada triwulan IV tahun 2019 sebesar Rp103,0 triliun atau

meningkat sebesar 18,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan PMDN terjadi pada sektor primer sebesar 4,9 persen dan sektor tersier sebesar 30,4 persen. Sedangkan pada sektor sekunder, realisasi PMDN mengalami penurunan sebesar 2,9 persen (YoY). Berdasarkan komposisi antarsektor, realisasi PMDN pada triwulan IV tahun 2019 didominasi oleh sektor tersier yakni sebesar 66,2 persen.

Realisasi PMA terbesar adalah sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya.

Tabel 8 Lima Sektor Realisasi PMA Terbesar

Sektor	Nilai (Triliun Rupiah)	Proporsi (%)	Pertumbuhan YoY (%)
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	22,5	21,4	226,1
Listrik, Gas dan Air	22,4	21,3	19,1
Pertambangan	10,3	9,8	-4,6
Real Estate, Industri Estate dan Kegiatan Bisnis	9,5	9,0	-8,7
Industri Kimia dan Farmasi	7,0	6,6	22,8
Gabungan Sektor Lainnya	33,6	31,9	-27,6
Total	105,3	100,0	6,4

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Catatan: Kurs 2018: Rp13.400,00/USD
 Kurs Q4 2019: Rp15.000,00/USD

Berdasarkan sektor/bidang usaha, lima sektor dengan kontribusi terbesar pada realisasi PMA adalah: (1) Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; (2) Listrik, Gas dan Air; (3) Pertambangan; (4) Real Estate, Industri Estate dan Kegiatan Bisnis; dan (5) Industri Kimia dan Farmasi. Lima sektor tersebut berkontribusi sebesar 68,1 persen terhadap total realisasi PMA pada triwulan IV tahun 2019.

Realisasi PMDN terbesar adalah sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi.

Berdasarkan sektor/bidang usaha, lima sektor dengan kontribusi terbesar pada realisasi PMDN adalah: (1) Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; (2) Real Estate, Industri Estate dan Kegiatan Bisnis; (3) Industri Makanan; (4) Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan;

dan (5) Konstruksi. Lima sektor tersebut berkontribusi sebesar 65,8 persen dari total realisasi PMDN pada triwulan IV tahun 2019.

Tabel 9 Lima Sektor Realisasi PMDN Terbesar

Sektor	Nilai (Triliun Rupiah)	Proporsi (%)	Pertumbuhan YoY (%)
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	23,5	22,8	64,3
Real Estate, Industri Estate dan Kegiatan Bisnis	14,1	13,7	151,8
Industri Makanan	10,2	9,9	12,1
Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan	10,0	9,7	22,0
Konstruksi	8,1	7,9	-56,2
Gabungan Sektor Lainnya	35,2	34,2	12,8
Total	103	100,0	18,5

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Total Realisasi PMA dan PMDN pada triwulan IV tahun 2019 sebesar Rp208,3 triliun.

Total realisasi PMA dan PMDN pada triwulan IV tahun 2019 sebesar Rp208,3 triliun, mencapai 24,5 persen dari target realisasi investasi tahun 2019 yakni Rp850 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dari realisasi PMA dan PMDN pada triwulan IV tahun 2018 yang sebesar Rp185,9 triliun. Secara kumulatif, pada tahun 2019 realisasi PMA dan PMDN mencapai Rp809,6 triliun (95,2 persen).

Tabel 10 Realisasi dan Target Realisasi PMA dan PMDN (triliun Rupiah)

Kategori	Q4 2018	Q3 2019	Q4 2019	2019
PMA	99,0	105,0	105,3	423,1
PMDN	86,9	100,7	103,0	386,5
Total	185,9	205,7	208,3	809,6
Target RKP	765	850	850	850

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Kontribusi PMDN terhadap total realisasi Investasi sebesar 49,0 persen.

Realisasi PMDN pada triwulan IV tahun 2019 berkontribusi sebesar 49,4 persen terhadap total realisasi investasi. Secara kumulatif kontribusi PMDN pada tahun 2019 mencapai 47,7 persen, melampaui target dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yakni 38,9 persen.

Tabel 11 Proporsi PMDN terhadap Total Realisasi PMA dan PMDN (persen)

Keterangan	Q4 2018	Q3 2019	Q4 2019	2019
Share PMDN thd total	46,7	49,0	49,4	47,7
Target RKP (tahunan)	37,6	38,9	38,9	38,9
Target RPJMN (tahunan)	37,6	38,9	38,9	38,9

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Negara Asal Investasi terbesar adalah Singapura, Belanda, Tiongkok, Jepang dan Hong Kong.

Tabel 12 Realisasi PMA berdasarkan Negara Asal Investasi

Negara Asal	Realisasi PMA (triliun Rupiah)			Proporsi thd Total (%)
	Q4 2018	Q3 2019	Q4 2019	
Singapura	37,4	29,2	16,9	16,0
Belanda	2,5	20,4	7,5	7,1
Tiongkok	8,2	15,4	21,5	20,4
Jepang	18,0	13,2	16,1	15,3
Hong Kong	5,6	6,5	17,2	16,3
Lainnya	27,3	20,3	26,1	24,8
Total	99,0	105,0	105,3	100,0

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Catatan: Kurs 2018: Rp13.400,00/USD

Kurs Q4 2019: Rp15.000,00/USD

Berdasarkan negara asal investasi, lima negara asal investasi yang berkontribusi terbesar pada realisasi PMA triwulan IV tahun 2019 adalah Tiongkok sebesar 20,4

persen; Hong Kong sebesar 16,3 persen; Singapura sebesar 16,0 persen; Jepang sebesar 15,3 persen; dan Belanda sebesar 7,1 persen. Lima negara asal investasi tersebut berkontribusi sebesar 75,2 persen terhadap total realisasi PMA pada triwulan IV tahun 2019.

Proporsi PMA Luar Jawa sedikit meningkat

Realisasi PMA di pulau Jawa pada triwulan IV tahun 2019 mencapai USD3.262,25 juta memberikan kontribusi terbesar terhadap total realisasi PMA yakni 46,4 persen, baik dalam USD maupun dalam Rupiah. Sementara itu berdasarkan tingkat pertumbuhan tahunan (YoY), daerah dengan pertumbuhan realisasi PMA terbesar adalah Maluku yakni 241,7 persen.

Tabel 13 Realisasi PMA Berdasarkan Lokasi

Lokasi	Q4 2018	Q3 2019	Q4 2019	Proporsi thd Total (%)
	(tri; iun Rupiah)			
Jawa	54,9	48,9	46,4	54,9
Sumatera	14,7	15	14,2	14,7
Sulawesi	9,9	21,9	20,8	9,9
Kalimantan	8,3	9,6	9,1	8,3
Papua	6,5	3,2	3,0	6,5
Maluku	1,2	4,1	3,9	1,2
Bali Nusra	3,5	2,6	2,5	3,5
Luar Jawa	44,1	56,4	53,6	44,1
KBI	69,6	63,9	60,7	69,6
KTI	29,4	41,4	39,3	29,4
Total	99,0	105,3	100,0	99,0

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Kawasan Barat Indonesia (KBI) masih mendominasi proporsi realisasi PMA secara kawasan sebesar 60,7 persen dibandingkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 39,3 persen. Namun, KBI mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada periode yang sama sebesar -8,2 persen sedangkan KTI

mengalami peningkatan pada periode yang sama dari tahun lalu sebesar 40,8 persen. Proporsi PMA di Luar Jawa meningkat pada tahun 2019 menjadi 45,1 persen dari tahun sebelumnya sebesar 41,8 persen. Proporsi KTI pada tahun 2019 meningkat menjadi 30,1 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 25,3 persen.

Tabel 14 Realisasi PMDN Berdasarkan Lokasi

Lokasi	Q4 2018	Q4 2019	Proporsi thd Total (%)
	(triwulan Rupiah)		
Jawa	46,3	55,5	53,9
Sumatera	20,3	25,3	24,6
Sulawesi	9,7	6,0	5,8
Kalimantan	8,4	11,6	11,3
Papua	0,1	0,1	0,1
Maluku	1,1	0,0	0,0
Bali Nusra	1,1	4,4	4,3
Luar Jawa	40,6	47,5	46,1
KBI	66,6	80,8	78,4
KTI	20,3	22,1	21,5
Total	86,9	103,0	100,0

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Realisasi PMDN di Jawa pada triwulan IV tahun 2019 mencapai Rp55,5 triliun, memberikan kontribusi terbesar terhadap total realisasi PMDN yakni 53,9 persen. Sementara itu, berdasarkan tingkat pertumbuhan tahunan, daerah yang mengalami pertumbuhan realisasi PMDN terbesar adalah Bali dan Nusa Tenggara yakni 303,7 persen. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, realisasi PMDN di Bali dan Nusa Tenggara mengalami penurunan sebesar 6,4 persen. KBI memberikan kontribusi lebih besar secara kawasan sebesar 78,4 persen dibanding KTI memberikan kontribusi sebesar 21,5 persen. KBI dan KTI mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada periode yang sama sebesar masing-masing 21,3 persen dan

8,8 persen. Proporsi PDMN di Luar Jawa meningkat pada tahun 2019 menjadi 47,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 46,1 persen. Proporsi KTI pada 2019 menurun menjadi 24,2 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 28,6 persen.

Tabel 15 Lima Provinsi dengan Realisasi PMA dan PMDN Terbesar

Lokasi	2018	2019	Proporsi 2018 (%)	Proporsi 2019 (%)
Jawa	405,4	434,6	56,2	53,7
Luar Jawa	316,0	375,0	43,8	46,3
KBI	528,1	588,9	73,2	72,7
KTI	193,3	220,7	26,8	27,3
Total	721,3	809,6	100,0	100,0

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Proporsi Realisasi Total PMA dan PMDN Luar Jawa Meningkat

Realisasi total PMA dan PMDN di Luar Jawa meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp375 triliun dibanding tahun 2018 dan proporsinya juga meningkat menjadi sebesar 46,3 persen. Realisasi total PMA dan PMDN di KTI juga meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp220,7 triliun dan proporsinya juga meningkat menjadi sebesar 27,3 persen.

Total realisasi PMA terbesar berada di Provinsi Jawa Barat dan PMDN di DKI Jakarta.

Lima provinsi yang berkontribusi terbesar pada realisasi PMA triwulan IV tahun 2019 adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 20,7 persen; Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 11,0 persen; Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,2 persen; Provinsi DKI Jakarta sebesar 7,4 persen; dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 7,0 persen. Sedangkan pada realisasi PMDN, lima provinsi yang

berkontribusi terbesar pada triwulan IV tahun 2019 adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 19,9 persen; Provinsi Jawa Barat sebesar 13,2 persen; Provinsi Banten sebesar 8,0 persen; Provinsi Jawa Timur sebesar 7,5 persen; Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,6 persen.

sebesar 8,0 persen; Provinsi Jawa Timur sebesar 7,5 persen; dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,6 persen.

Tabel 16 Lima Provinsi dengan Realisasi PMA dan PMDN Terbesar

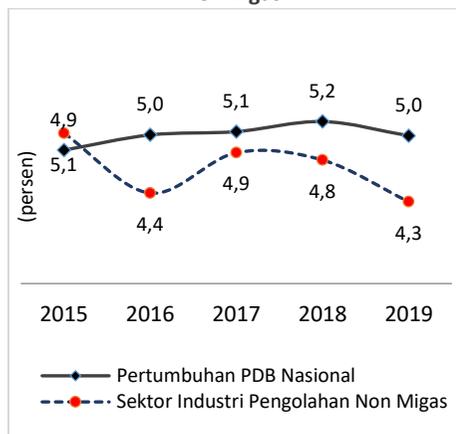
PMA			PMDN		
Provinsi	Nilai (Triliun Rupiah)	Proporsi thd Total (%)	Provinsi	Nilai (Triliun Rupiah)	Proporsi thd Total (%)
Jawa Barat	21,8	20,7	DKI Jakarta	20,5	19,9
Sulawesi Tengah	11,6	11,0	Jawa Barat	13,6	13,2
Jawa Tengah	8,6	8,2	Banten	8,2	8,0
DKI Jakarta	7,8	7,4	Jawa Timur	7,7	7,5
Sulawesi Tenggara	7,4	7,0	Sumatera Selatan	5,8	5,6

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah

Catatan: Kurs 2018: Rp13.400,00/USD; Kurs Q4 2019: Rp15.000,00/US

Industri

Gambar 9 Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas



Sumber: BPS, 2020

Pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas pada triwulan IV tahun 2019 adalah sebesar 3,9 persen (YoY), atau lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2018 (4,7 persen, YoY) dan di bawah pertumbuhan PDB nasional pada triwulan IV tahun 2019 (4,96 persen). Pertumbuhan tersebut menghasilkan nilai tambah sektor industri

pengolahan nonmigas pada triwulan IV sebesar Rp705 triliun.

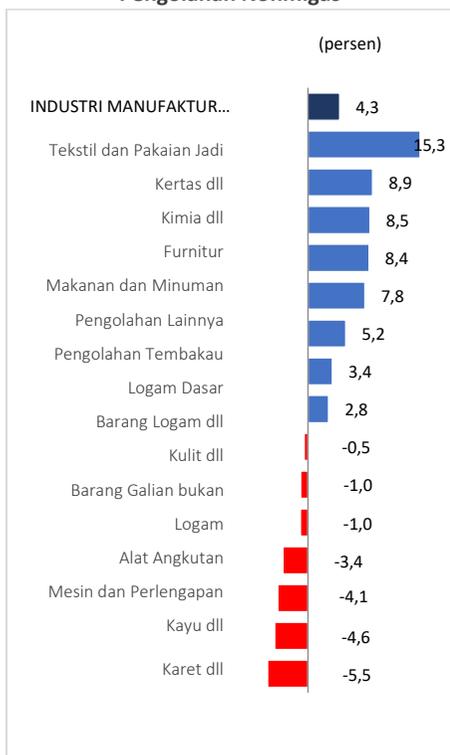
Secara kumulatif, nilai tambah sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2019 mencapai Rp2.783 triliun dan berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 17,6 persen. Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 4,3 persen (YoY), atau lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 4,8 persen.

Tren perlambatan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas membutuhkan perbaikan kebijakan seperti pengamanan permintaan domestik, *debottlenecking* permasalahan industri seperti harga energi yang tidak kompetitif, sinkronisasi kebijakan antar instansi pemerintah, fasilitasi akses pasar luar negeri, dan perbaikan konektivitas logistik untuk menurunkan biaya distribusi.

Perkembangan secara kumulatif pada tahun 2019 menunjukkan subsektor tekstil dan pakaian jadi, kertas dan barang dari kertas, serta kimia, farmasi dan obat tradisional mengalami pertumbuhan

paling tinggi, yaitu masing-masing sebesar 15,4 persen, 8,9 persen, dan 8,5 persen. Pertumbuhan subsektor tekstil dan pakaian jadi didorong oleh peningkatan ekspor dengan memanfaatkan momentum akses pasar ke negara Amerika Serikat dan Eropa. Pertumbuhan pada subsektor kimia, farmasi, dan obat tradisional, serta kertas dan barang dari kertas didorong oleh adanya peningkatan kapasitas produksi melalui operasionalisasi beberapa pabrik baru seperti peningkatan kapasitas pabrik *polyethylene*.

Gambar 10 Pertumbuhan Subsektor Industri Pengolahan Nonmigas



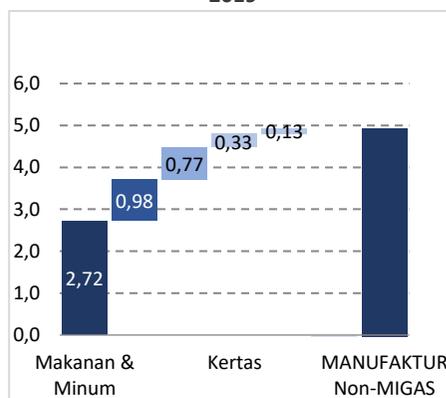
Sumber: Badan Pusat Statistik

Khusus pada triwulan IV tahun 2019, subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, industri makanan dan minuman, dan industri furnitur tumbuh

tinggi, yaitu masing-masing sebesar 12,7 persen, 7,95 persen, dan 7,8 persen.

Di sisi lain, subsektor karet, barang dari karet, dan plastik mengalami penurunan terbesar sebesar 5,52 persen pada tahun 2019. Hal ini disebabkan serangan jamur *Pestalotiopsis* pada tanaman karet, sehingga produksi karet menurun. Serangan jamur pada tanaman karet tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Thailand dan Malaysia.

Gambar 11 Pertumbuhan Subsektor Industri Pengolahan Nonmigas Triwulan IV Tahun 2019

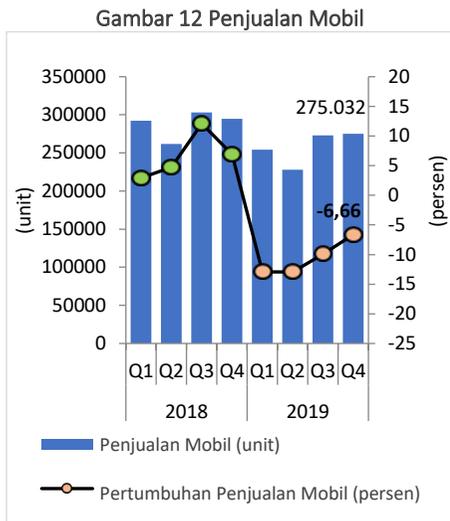


Sumber: Badan Pusat Statistik

Subsektor makanan dan minuman masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2019 (sebesar 62,5 persen), meskipun tumbuh lebih rendah (7,78 persen) jika dibandingkan dengan tahun 2018 (7,91 persen). Kenaikan permintaan domestik dan ekspor *Crude Palm Oil (CPO)* menjadi salah satu sumber pertumbuhan subsektor makanan dan minuman. Subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar kedua (19,9 persen).

Subsektor alat angkutan mengalami kontraksi pada tahun 2019 disebabkan

oleh (i) dampak penghentian operasi pabrik otomotif di Tiongkok, (ii) sikap menunda pembelian kendaraan bermotor, sebagai dampak berlanjut dari pemilu dan penurunan harga komoditas, serta (iii) lambatnya transmisi penurunan suku bunga acuan oleh perbankan.



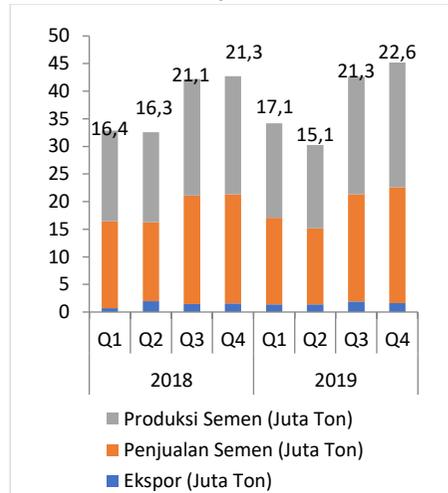
Sumber: Badan Pusat Statistik

Penurunan penjualan kendaraan komersil dan mobil penumpang serta stagnasi dari penjualan sepeda motor pada tahun 2019 menjadi sinyal pelambatan pertumbuhan dan pelemahan daya beli masyarakat. Penjualan mobil pada triwulan IV tahun 2019 turun sebesar 6,7 persen, disebabkan oleh penurunan penjualan pada segmen mobil *sport utilities* dengan kapasitas lebih dari 3000 cc (-36,0 persen) dan segmen truk untuk kapasitas lebih dari 24 ton (-35,2 persen). Secara kumulatif, total penjualan mobil pada tahun 2019 mencapai 1,0 juta unit, atau turun sebesar 10,5 persen dibandingkan dengan tahun 2018 (1.15 juta unit).

Di tengah situasi perlambatan ekonomi, kebijakan pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu penopang

pertumbuhan sektor industri pengolahan non-migas, yang ditunjukkan oleh perkembangan subsektor semen.

Gambar 13 Produksi, Penjualan Domestik, dan Ekspor Semen

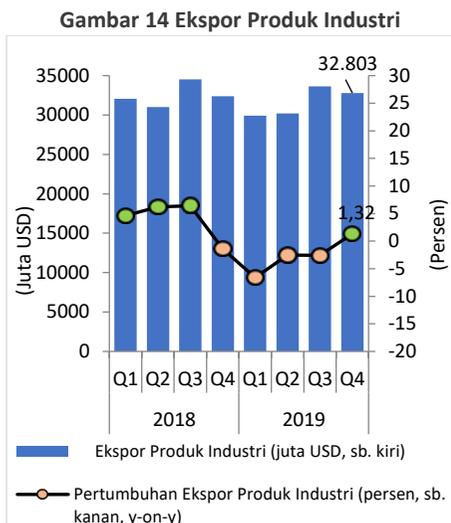


Sumber: CEIC

Volume produksi dan penjualan semen meningkat sebesar 5,9 persen pada triwulan IV tahun 2019 (YoY). Pemanfaatan produksi semen untuk pasar domestik ditunjukkan oleh penurunan pertumbuhan ekspor semen pada triwulan IV tahun 2019 sebesar 5,7 persen (YoY), atau lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2018 (68,6 persen).

Pertumbuhan sektor industri pengolahan di triwulan IV tahun 2019 juga diikuti dengan peningkatan ekspor. Nilai ekspor produk industri pengolahan pada triwulan IV tahun 2019 mencapai USD 32,8 miliar, atau meningkat 1,32 persen jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2018. Berdasarkan pengelompokan HS 8 digit, nilai ekspor produk industri pengolahan yang terbesar mencakup produk olahan kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), ferro nikel, olahan emas

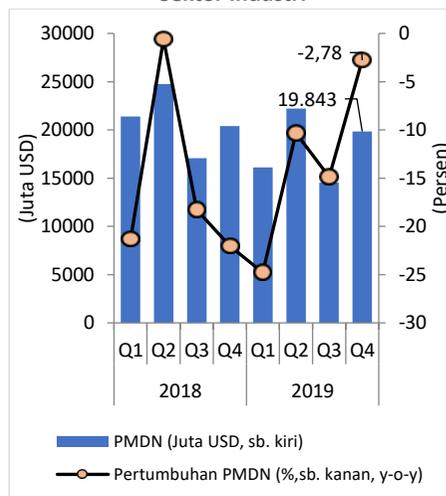
(ingot/batang), olahan kertas, dan bijih tembaga.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada tahun 2019 mencapai USD126,6 miliar atau mengalami penurunan sebesar 2,6 persen (YoY) jika dibandingkan dengan tahun 2018 (3,9 persen). Kondisi ini membutuhkan upaya perbaikan, baik dari sisi peningkatan inovasi untuk diversifikasi dan perbaikan kualitas produk, peningkatan kemudahan ekspor, perbaikan pengelolaan impor untuk tujuan ekspor, serta peningkatan manajemen dan SDM perusahaan industri untuk adopsi teknologi dan pemenuhan standar internasional. Dalam jangka pendek dan menengah, upaya lain yang dapat dilaksanakan yaitu optimalisasi pemanfaatan PTA/FTA/CEPA yang sudah diratifikasi, serta perbaikan iklim usaha untuk menarik investasi perusahaan manufaktur berorientasi ekspor.

Gambar 15 Investasi Domestik (PMDN) Sektor Industri

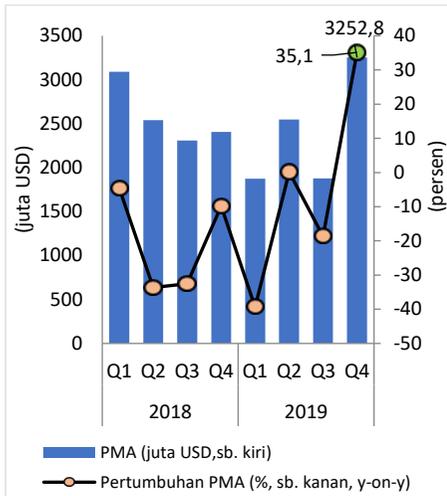


Sumber: BKPM, 2019

Peningkatan kemudahan investasi terus dilaksanakan dengan fokus pada pengintegrasian perizinan berbasis *online* melalui *Online Single Submission* (OSS). Hasilnya diharapkan dapat membantu membalikkan tren penurunan investasi, khususnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di sektor industri pengolahan yang turun sebesar -2,8 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2019. Secara kumulatif, nilai PMDN tahun 2019 mencapai USD72,7 miliar atau mengalami penurunan sebesar 16,5 persen jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Pada triwulan IV tahun 2019, realisasi PMDN terbesar adalah subsektor industri makanan sebesar USD10,2 miliar, yang diikuti dengan industri kimia dan farmasi dan industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain, dengan nilai masing-masing USD2,7 miliar dan USD1,7 miliar.

Gambar 16 Investasi Asing (PMA) Sektor Industri



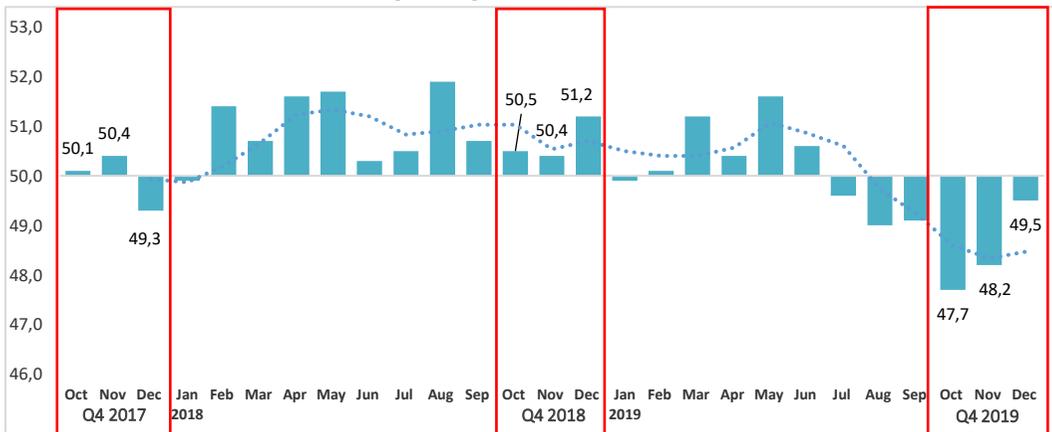
Sumber: BKPM, 2019

Tren positif ditunjukkan oleh nilai realisasi PMA di sektor industri pengolahan pada

triwulan IV tahun 2019 yang mencapai USD3,3 miliar, atau meningkat sebesar 35,1 persen (YoY). PMA di subsektor logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya tumbuh sebesar 190,4 persen. PMA di kendaraan bermotor dan alat transportasi lain juga tumbuh sebesar 80,6 persen. PMA di subsektor industri lainnya dan tekstil masing-masing tumbuh sebesar 74,0 persen dan 21,1 persen.

Namun secara kumulatif, nilai PMA hingga triwulan IV tahun 2019 mencapai USD9,6 miliar, atau turun sebesar 7,7 persen jika dibandingkan dengan tahun 2018. Upaya simplifikasi regulasi melalui *Omnibus Law* diharapkan mampu meningkatkan kepastian investasi dan memperbaiki pasar tenaga kerja sehingga menjadi lebih kompetitif.

Gambar 17 Purchasing Manager Index (PMI) Sektor Manufaktur



Sumber: CEIC

Perbaikan iklim usaha juga diharapkan dapat mendukung ekspansi industri pengolahan, yang dalam beberapa triwulan terakhir cenderung stagnan. Rata-rata nilai *Purchasing Manager Index* (PMI) Indonesia pada triwulan IV tahun 2019 sebesar 48,5 merupakan rerata triwulan terendah sejak tahun 2015.

Namun nilai PMI pada bulan Desember 2019 sebesar 49,5 menunjukkan permulaan pemulihan aktivitas dunia usaha. Pemulihan ini diharapkan bersifat *non-cyclical* dan menjadi awal pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas yang kuat dan berkelanjutan pada tahun 2020.

Pariwisata

Gambar 18 Jumlah Wisatawan Mancanegara per Triwulan Tahun 2017-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada triwulan IV tahun 2019, wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia mencapai 4 juta orang atau meningkat 3,9 persen (YoY) jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2018. Pertumbuhan ini tidak setinggi triwulan sebelumnya (14,4 persen) karena dampak pemilu, seperti ditunjukkan oleh penurunan wisman ke Jakarta dan pelambatan kunjungan wisman ke Bali. Kunjungan wisman dari hampir seluruh negara sebenarnya meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya, meskipun kontribusi wisman masing-masing negara hanya tumbuh sebesar 10 persen.

Secara umum, jumlah kedatangan wisman pada tahun 2019 meningkat menjadi 16,1 juta orang. Namun pertumbuhannya melambat yakni hanya sebesar 2 persen, atau jauh lebih kecil dari pertumbuhan pada tahun 2018 yang sebesar 13 persen. Total kunjungan wisman tahun 2019 sebesar 16,1 juta.

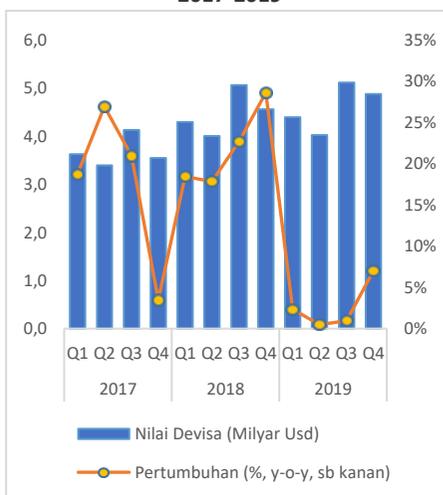
Gambar 19 Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Di sisi lain, perkembangan pariwisata menunjukkan peningkatan kualitas. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan nilai devisa pada triwulan IV tahun 2019 yang mencapai USD4,9 miliar, atau meningkat 7,0 persen (YoY).

Gambar 20 Nilai Devisa per Kuartal Tahun 2017-2019



Sumber: Bank Indonesia

Secara akumulatif, pertumbuhan devisa pariwisata pada tahun 2019 mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 2,7 persen, atau jauh di bawah pertumbuhan pada tahun 2018 yang sebesar 21,9 persen. Pembenahan destinasi dan diversifikasi atraksi sesuai segmen pasar akan terus dilakukan untuk meningkatkan devisa dari pariwisata.

Gambar 21 Nilai Devisa Tahun 2015-2019

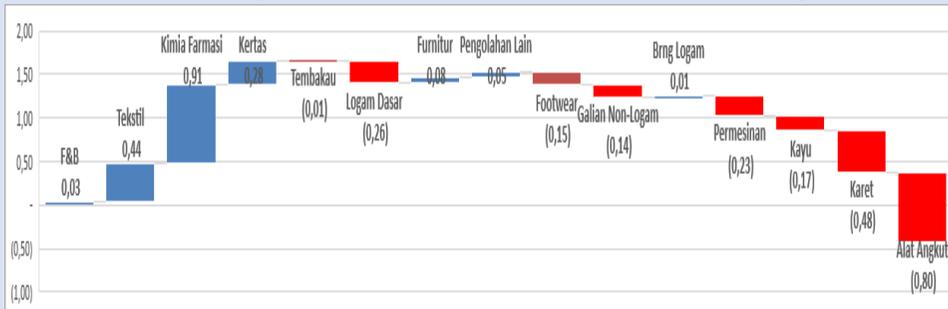


Sumber: Bank Indonesia

Box 2. Isu Terkini: Perlambatan Subsektor Industri Pengolahan Tahun 2019

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV tahun 2019 sebesar 4,96 persen dan secara kumulatif sebesar 5,02 persen pada tahun 2019 (YoY) mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2018 (5,2 persen). Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas pada triwulan IV 2019 sebesar 17,5 persen atau menurun dibanding triwulan IV 2018 (17,6 persen). Secara kumulatif pada tahun 2019, industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 4,3 persen dan berkontribusi 17,6 persen dari total PDB, menjadikan sektor industri tetap sebagai kontributor terbesar pada PDB Indonesia.

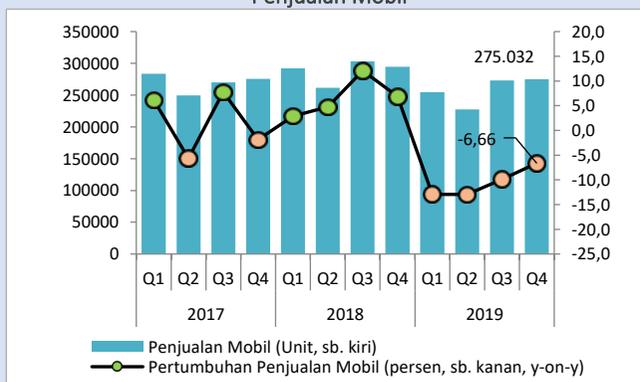
Konstruksi Subsektor Penyebab Pertumbuhan dan Penurunan Manufaktur Nonmigas Tahun 2019



Sumber: BPS,2020 (diolah)

Walaupun demikian pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas Indonesia pada 2019 cenderung melambat. Perlambatan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya kontraksi pada subsektor subsektor karet, barang dari karet dan plastik sebesar (5,2) persen dan alat angkut sebesar (3,4) persen pada tahun 2019. Di sisi lain, sektor industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 15,5 persen pada 2019 dan menjadi salah satu kontributor pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas.

Penjualan Mobil



Sumber: CEIC, 2020 (diolah)

Kontraksi yang dialami oleh subsektor industri alat angkut pada 2019 disebabkan oleh perlambatan pasar otomotif dunia secara keseluruhan. Beberapa produsen otomotif dunia melakukan restrukturisasi dengan melakukan PHK di beberapa negara, Indonesia termasuk negara yang terkena dampak dari hal tersebut. Selama 3 tahun terakhir, tiga pabrik mobil telah hengkang dari Indonesia. Tantangan ke depan di tingkat global, pabrik-pabrik otomotif di Tiongkok berhenti beroperasi, sementara akibat penyebaran penyakit. Hal tersebut

menyebabkan rantai pasok global otomotif terganggu. Namun, pemerintah Indonesia sudah mengupayakan stimulasi untuk mendorong kenaikan pembelian kendaraan bermotor yaitu melalui kebijakan Bank Indonesia menurunkan *loan to value* kendaraan motor dan mobil menjadi 5-10 persen.

Pertumbuhan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 2019 dan Produksi Karet di Tiga Negara Utama



Sumber: CEIC, 2020 (diolah)

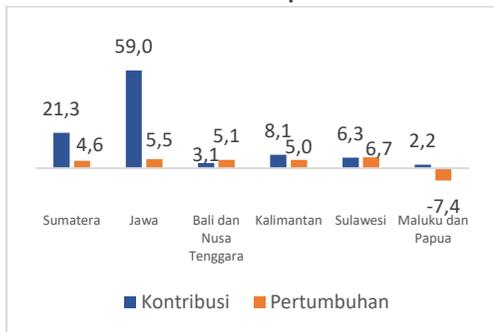
Industri karet, barang dari karet dan plastik juga menjadi salah satu penyumbang kontraksi terbesar sektor industri pengolahan nonmigas. Selama triwulan I hingga triwulan IV tahun 2019, pertumbuhan industri karet, barang dari karet dan plastik selalu negatif (YoY). Perlambatan pada subsektor ini disebabkan oleh serangan penyakit jamur *Pestalotia* pada pohon karet. Penyakit jamur tersebut menyerang Indonesia, Thailand dan Malaysia. Berdasarkan data International Tripartite Rubber Council (ITRC), luas lahan terpapar penyakit jamur karet di Indonesia paling besar dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia, masing-masing seluas 380.000 hektar, 52.000 hektar dan 5.000 hektar. Dampak penyakit jamur diperkirakan dapat menurunkan 70-90 persen dari produktivitas di daerah yang terkena paparan. Upaya pemerintah di Indonesia untuk mengatasi permasalahan ini cukup lambat, mengingat di Thailand dan Malaysia telah mengupayakan penyebaran vaksin jamur dengan menggunakan *drone*.

Ditengah kontraksi di beberapa subsektor, industri tekstil, dan pakaian jadi berhasil tumbuh signifikan pada 2019. Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh peningkatan ekspor tekstil dan produk tekstil ke pasar global dengan memanfaatkan momentum perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Beberapa perusahaan tekstil Indonesia berhasil meningkatkan ekspor ke pasar Amerika Serikat dan Eropa pada rentang 30 hingga 200 persen. Selain itu upaya relokasi beberapa pabrik ke wilayah dengan UMP kompetitif di sekitar Jawa Tengah juga berhasil menekan biaya perusahaan pada sektor ini yang mayoritas padat karya. Walaupun demikian Indonesia harus mampu memertahankan daya saing produk-produk tekstil di pangsa pasar utama melalui pendampingan dan tanggap pada isu perdagangan seperti penetapan *safeguard* tekstil dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 162 Tahun 2019.

Sumber: BPS, Gaikindo, Gapkindo, IRCO.

2.2 Produk Domestik Regional Bruto

Gambar 22 Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Secara Spasial



Sumber: Badan Pusat Statistik

Kontraksi pertumbuhan wilayah Maluku dan Papua membaik.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2019 membaik dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali Jawa dan Kalimantan. Perekonomian Maluku dan Papua mulai kembali tumbuh positif, sementara wilayah Sumatera yang merupakan perekonomian terbesar kedua di Indonesia tumbuh sedikit lebih baik dari triwulan sebelumnya.

Provinsi Papua dan Papua Barat masih memegang peranan penting dalam perekonomian wilayah Maluku dan Papua. Sektor pertambangan provinsi Papua berkontraksi sebesar 19,0 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2019, lebih baik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi hingga 38,3 persen (YoY). Peralihan sistem tambang PT Freeport ke penambangan bawah tanah yang menyebabkan turunnya produksi hingga 50 persen masih menjadi isu utama dalam perekonomian wilayah Maluku dan Papua. Produksi pertambangan diperkirakan akan kembali normal dalam 2

hingga 3 tahun mendatang. Provinsi Papua Barat pada triwulan IV tahun 2019 tumbuh sebesar 8,3 persen (YoY) lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan didorong oleh sektor jasa yang tumbuh tinggi dan kembali tumbuhnya sektor tambang dan pengalihan serta Industri Pengolahan.

Sementara provinsi Maluku dan Maluku Utara yang berkontribusi sebesar 23,0 persen terhadap perekonomian wilayah Maluku dan Papua, tumbuh relatif stabil. Pada triwulan IV tahun 2019, provinsi Maluku tumbuh lebih rendah dari triwulan III tahun 2019 yaitu sebesar 4,7 persen (YoY). Perlambatan pertumbuhan Maluku terjadi di sektor Pertanian. Disisi lain, Maluku Utara mengalami akselerasi pertumbuhan pada triwulan IV tahun 2019 sebesar 5,4 persen (YoY). Akselerasi ini didukung oleh pertumbuhan sektor pertambangan dan industri pengolahan yang tumbuh pada triwulan IV tahun 2019 sebesar 12,6 persen (YoY) dan 11,5 persen (YoY).

Sulawesi tumbuh lebih tinggi ditengah perlambatan provinsi Sulawesi Selatan.

Secara agregat, provinsi-provinsi yang ada di Sulawesi tumbuh lebih cepat dibandingkan triwulan III tahun 2019. Dilihat dari kontribusi terhadap perekonomian Sulawesi, provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi provinsi yang memiliki kontribusi terbesar yaitu sebesar 47,0 persen. Namun, provinsi Sulawesi Selatan tumbuh lebih lambat dibanding triwulan sebelumnya. Perlambatan provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan IV tahun 2019 disebabkan oleh beberapa komoditas pertanian serta produksi perikanan yang mengalami penurunan. Penurunan ini sejalan dengan adanya

peralihan musim antara musim kemarau dan musim penghujan. Akibatnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki kontribusi terhadap ekonomi provinsi Sulawesi Selatan sebesar 17,6 persen mengalami kontraksi sebesar 1,3 persen pada triwulan IV tahun 2019.

Sulawesi Tengah menjadi provinsi yang pertumbuhannya paling tinggi di antara provinsi lain di wilayah Sulawesi, yaitu sebesar 9,6 persen (YoY) lebih baik dari triwulan III tahun 2019 yang tumbuh 6,2 persen (YoY). Akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan IV tahun 2019 terjadi karena adanya akselerasi pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian (tumbuh 22,0 persen, YoY), konstruksi (tumbuh 18,2 persen, YoY) dan industri pengolahan (tumbuh 9,8 persen, YoY). Hal ini sejalan dengan pembangunan smelter The Anugrah di Morowali yang memasuki tahap operasional, proyek pembangunan tambang emas baru di Poboya yang akan beroperasi mulai 2020, dan percepatan pembangunan jalan layang Pantoloan yang merupakan bagian dari trans Sulawesi.

Kalimantan melambat tertahan komoditas migas.

Wilayah Kalimantan secara agregat tumbuh sebesar 3,7 persen pada triwulan IV tahun 2019, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh hingga 5,7 persen. Provinsi Kalimantan Tengah menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dari triwulan sebelumnya. Dilihat dari struktur ekonominya, perekonomian Kalimantan masih didominasi oleh Provinsi Kalimantan Timur meskipun pertumbuhannya cenderung melambat

yakni sebesar 2,7 persen, namun kontribusinya terhadap perekonomian Kalimantan masih mendominasi yakni sebesar 49,6 persen. Salah satu sektor yang mengalami penurunan secara signifikan adalah industri pengolahan yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kebakaran di kilang minyak RU (Revinery Unit) V Balikpapan dan penghentian kegiatan produksi pabrik pengolahan kayu sejalan dengan permintaan produk Plywood di luar negeri yang melemah. Selain itu, PT Pertamina Hulu Mahakam juga mengalami penurunan produksi di Blok Mahakam.

Sementara, sebagai perekonomian yang mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya, perekonomian Kalimantan Tengah hanya berkontribusi sebesar 11,7 persen terhadap perekonomian Kalimantan. Pertumbuhan Kalimantan Tengah yang tinggi pada triwulan IV tahun 2019 bersumber dari industri pengolahan (tumbuh 4,3 persen YoY), pertanian (tumbuh 6,9 persen YoY), dan pertambangan (tumbuh 5,9 persen YoY). Peningkatan pertumbuhan Industri Pengolahan sejalan dengan peningkatan produksi tanaman perkebunan pada komoditas kelapa sawit.

Pertumbuhan Bali Nusra tertahan sektor pertambangan dan penggalian.

Secara agregat, wilayah Bali dan Nusa Tenggara tumbuh sebesar 5,5 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2019. Struktur perekonomian di wilayah Bali dan Nusa Tenggara masih didominasi oleh Provinsi Bali dengan kontribusinya terhadap Wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 51,1 persen. Perekonomian provinsi Bali pada triwulan IV tahun 2019 tumbuh 5,5 persen (YoY) lebih tinggi dari

triwulan sebelumnya. Perekonomian di Provinsi Bali tumbuh sejalan dengan pertumbuhan pada sektor akomodasi, makanan, dan minuman sebesar 6,0 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2019.

Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi yang pertumbuhannya paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan pertumbuhan mencapai 5,7 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2019. Beberapa sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan triwulan III tahun 2019 diantaranya sektor pertambangan dan penggalian (4,6 persen, YoY), perdagangan (7,6 persen, YoY) dan konstruksi (12,4 persen, YoY). Melambatnya sektor pertambangan disebabkan oleh adanya kesepakatan antar pengusaha tambang nikel untuk tidak mengeksport bijih mentah (*ore*) per Oktober 2019 yang seharusnya dimulai pada awal tahun 2020.

Industri pengolahan dan perdagangan wilayah Jawa melambat.

Pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa pada triwulan IV tahun 2019 adalah sebesar 5,3 persen (YoY), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mencapai 5,5 persen (YoY). Pada triwulan IV tahun 2019, hanya Jawa Barat dan Jawa Tengah tumbuh lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Provinsi DI Yogyakarta (6,2 persen, YoY).

Secara spasial, Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat masih memegang kontribusi tertinggi pada perekonomian Jawa (kontribusinya terhadap perekonomian Jawa berturut-turut sebesar 29,9 persen dan 22,4 persen). Dari sisi sektoral,

perlambatan perekonomian provinsi tersebut terjadi sejalan dengan melambatnya sektor industri pengolahan dan perdagangan baik pada provinsi tersebut maupun secara agregat di Jawa.

Provinsi DI Yogyakarta dapat tumbuh tinggi pada triwulan IV tahun 2019 sejalan dengan pertumbuhan yang tinggi pada sektor akomodasi dan makanan-minuman (12,2 persen, YoY), konstruksi (11,8 persen, YoY), dan relatif stabilnya sektor Jasa-Jasa pada akhir tahun. Sektor akomodasi yang tumbuh tinggi (12,2 persen) terjadi sejalan dengan tingkat penghunian kamar hotel baik bintang maupun non bintang/akomodasi lainnya yang meningkat pada akhir tahun akibat adanya faktor musim liburan. Sektor konstruksi juga tumbuh tinggi (11,8 persen, YoY) seiring masih berjalannya proyek bandara dan pembangunan beberapa fasilitas umum seperti jembatan dan *underpass*.

Sumatera tumbuh stagnan terpengaruh harga komoditas.

Perekonomian wilayah Sumatera pada triwulan IV tahun 2019 tumbuh sebesar 4,6 persen (YoY), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya (4,5 persen, YoY). Beberapa sektor yang mengalami akselerasi pertumbuhan pada triwulan IV tahun 2019 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya diantaranya adalah sektor listrik dan gas dari 5,0 persen naik menjadi 10,3 persen, sektor konstruksi dari 5,9 persen menjadi 8,3 persen, jasa perusahaan dari 5,0 persen menjadi 5,5 persen, jasa keuangan dan asuransi dari 2,3 persen menjadi 5,3 persen, serta sektor pertambangan dan penggalian dari 0,46 persen menjadi 0,9 persen. Namun, sektor utama di Sumatera mengalami

perlambatan pertumbuhan diantaranya pada sektor pertanian (3,3 persen, YoY), industri pengolahan (3,6 persen, YoY), dan perdagangan (6,2 persen, YoY). Pertumbuhan sektor pertanian maupun pertambangan didorong oleh kinerja ekspor komoditas minyak kelapa sawit, timah, batu bara, dan kopi yang mulai meningkat di akhir tahun.

Dari sisi spasial, kontribusi terbesar terhadap perekonomian Sumatera berasal dari provinsi Sumatera Utara (23,6 persen). Provinsi tersebut mengalami percepatan pertumbuhan pada triwulan IV tahun 2019 (dari 5,1 persen pada triwulan sebelumnya menjadi 5,2 persen). Perekonomian Sumatera Utara ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan (kontribusi sebesar 20,3 persen dan 19,0 persen terhadap perekonomian). Pertanian tumbuh 4,4 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2019 lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,0 persen (YoY) sejalan dengan harga acuan minyak sawit dunia yang meningkat pada triwulan IV tahun 2019. Perdagangan mengalami sedikit perlambatan tumbuh sebesar 7,6 persen YoY pada triwulan IV tahun 2019 lebih rendah dari triwulan III tahun 2019 yang dapat tumbuh mencapai 8,0 persen (YoY). Perlambatan ini sejalan dengan perdagangan mobil dan sepeda motor yang melambat.

Provinsi Aceh dan Jambi mengalami perubahan pertumbuhan yang signifikan pada triwulan IV tahun 2019. Provinsi Aceh yang pada triwulan III 2019 tumbuh sebesar 3,8 persen (YoY), naik menjadi 5,2 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Aceh didorong oleh konstruksi yang tumbuh tinggi yaitu sebesar 18,1 persen (YoY). Hal ini sejalan

dengan realisasi pengadaan semen yang meningkat pada tahun 2019, berlangsungnya pembangunan ruas jalan tol Banda Aceh-Sigli, dan pembangunan jalur kereta api Sumatera Utara-Aceh. Di sisi lain, provinsi Jambi mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2019 dengan hanya tumbuh sebesar 3,6 persen (YoY). Perlambatan ini bersumber dari sektor Pertanian yang berkontraksi 1,7 persen (YoY). Namun tetap didorong oleh sektor Perdagangan yang tumbuh sebesar 8,4 persen (YoY). Adanya kontraksi di sektor Pertanian terjadi karena musim kemarau panjang dan kekeringan yang berdampak pada produksi tanaman pangan, dan kebakaran hutan/lahan serta kabut asap yang berdampak pada produksi perkebunan dan kesehatan.

Tabel 17 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
 Tahun 2014 – Triwulan IV tahun 2019
 (persen, YoY)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019:1	2019:2	2019:3	2019:4	2019
Sumatera	4,6	3,5	4,3	4,3	4,5	4,6	4,6	4,5	4,6	4,6
Aceh	1,6	-0,7	3,3	4,2	4,6	3,9	3,7	3,8	5,2	4,1
Sumut	5,2	5,1	5,2	5,1	5,2	5,3	5,3	5,1	5,2	5,2
Sumbar	5,9	5,5	5,3	5,3	5,1	4,9	5,0	5,2	5,1	5,1
Riau	2,7	0,2	2,2	2,7	2,3	2,9	2,8	2,7	2,9	2,8
Jambi	7,4	4,2	4,4	4,6	4,7	4,7	4,9	4,5	3,6	4,4
Sumsel	4,8	4,4	5,0	5,5	6,0	5,7	5,8	5,7	5,7	5,7
Bengkulu	5,5	5,1	5,3	5,0	5,0	5,1	5,0	5,0	4,8	5,0
Lampung	5,1	5,1	5,1	5,2	5,3	5,2	5,6	5,2	5,1	5,3
Kep. Babel	4,7	4,1	4,1	4,5	4,5	2,8	3,4	3,0	4,0	3,3
Kepri	6,6	6,0	5,0	2,0	4,6	4,8	4,6	4,9	5,2	4,9
Jawa	5,6	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7	5,6	5,5	5,3	5,5
DKI Jakarta	5,9	5,9	5,9	6,2	6,2	6,2	5,5	5,9	6,0	5,9
Jabar	5,1	5,0	5,7	5,3	5,6	5,4	5,7	5,1	4,1	5,1
Jateng	5,3	5,5	5,2	5,3	5,3	5,1	5,5	5,6	5,3	5,4
DI Yogyakarta	5,2	5,0	5,0	5,3	6,2	7,5	6,8	6,0	6,2	6,6
Jatim	5,9	5,4	5,6	5,5	5,5	5,5	5,7	5,3	5,5	5,5
Banten	5,5	5,4	5,3	5,7	5,8	5,4	5,4	5,4	5,9	5,5
Bali Nusra	5,9	10,4	5,9	3,7	2,7	4,6	4,8	5,3	5,5	5,1
Bali	6,7	6,0	6,3	5,6	6,4	6,0	5,7	5,3	5,5	5,6
NTB	5,2	21,8	5,8	0,1	-4,6	1,7	2,1	6,5	5,7	4,0
NTT	5,1	4,9	5,1	5,1	5,1	5,3	6,4	3,9	5,3	5,2
Kalimantan	3,4	1,4	2,0	4,3	3,9	5,2	5,4	5,7	3,7	5,0
Kalbar	5,0	4,9	5,2	5,2	5,1	5,2	5,1	5,1	4,7	5,0
Kalteng	6,2	7,0	6,3	6,7	5,6	6,0	7,5	5,2	6,0	6,2
Kalsel	4,8	3,8	4,4	5,3	5,1	4,3	4,2	4,0	3,9	4,1
Kaltim	1,7	-1,2	-0,4	3,1	2,7	5,1	5,1	6,3	2,7	4,8
Kaltara	8,2	3,4	3,6	6,8	6,0	7,2	7,9	6,6	6,0	6,9
Sulawesi	6,9	8,2	7,4	7,0	6,7	6,5	6,7	6,5	6,9	6,7
Sulut	6,3	6,1	6,2	6,3	6,0	6,6	5,5	5,2	5,5	5,7
Sulteng	5,1	15,5	9,9	7,1	6,3	6,5	6,3	6,2	9,6	7,2
Sulsel	7,5	7,2	7,4	7,2	7,1	6,6	7,4	7,2	6,5	6,9
Sultra	6,3	6,9	6,5	6,8	6,4	6,4	6,3	6,4	6,9	6,5
Gorontalo	7,3	6,2	6,5	6,7	6,5	6,8	6,7	5,7	6,5	6,4
Sulbar	8,9	7,3	6,0	6,6	6,2	6,0	5,1	5,2	6,4	5,7
Maluku Papua	4,5	6,3	7,4	4,9	7,0	-9,6	-13,1	-7,4	1,0	-7,4
Maluku	6,6	5,5	5,7	5,8	5,9	6,3	6,1	5,3	4,7	5,6
Maluku Utara	5,5	6,1	5,8	7,7	7,9	7,7	7,5	4,1	5,4	6,1
Papua Barat	5,4	4,2	4,5	4,0	6,2	-0,2	-0,5	2,9	8,3	2,7
Papua	3,6	7,3	9,14	4,64	7,33	-18,7	-23,9	-15,1	-3,7	-15,7
NASIONAL	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17	5,07	5,05	5,02	4,97	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

2.3 Fiskal

Pendapatan dan belanja negara meningkat. Sementara itu rasio pajak menurun disertai risiko potensi pelebaran defisit kedepannya.

Sampai akhir Desember 2019, realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.957,2 triliun (90,4 persen terhadap target APBN 2019) atau meningkat sebesar 0,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tahun 2019 merupakan tahun yang cukup menantang, terutama dari perspektif perpajakan. Di tengah perang dagang dan konflik geopolitik, perlambatan ekonomi global, dan pelemahan volume perdagangan internasional yang memberikan tekanan terhadap ekonomi Indonesia, kinerja penerimaan pajak masih cukup baik. Penerimaan pajak periode Januari-Desember 2019 terkumpul sebesar Rp1.545,3 triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp1.786,6 triliun. Dengan demikian capaian penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar 86,5 persen. Penyerapan ini memang lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 93,9 persen, namun masih lebih baik dibanding capaian tahun 2015 dan 2016, masing-masing sebesar 82,0 persen dan 81,6 persen dari target.

Pajak penghasilan (PPh) hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp770,3 triliun atau tumbuh 2,7 persen dibanding periode yang sama tahun 2018. Pertumbuhan PPh ini ditengarai karena tingkat penggunaan tenaga kerja dalam upaya meningkatkan PPh 21 serta dampak dari perluasan basis pembayar pajak dan peningkatan kesadaran perpajakan di tengah masyarakat. Selain itu juga

diperkuat oleh momentum pasca *Tax Amnesty* dalam kaitannya untuk meningkatkan PPh 25/29 Orang Pribadi. Realisasi penerimaan pajak ditopang oleh penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sampai dengan bulan Desember 2019 penerimaan pajak utamanya didorong oleh pertumbuhan dari komponen penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang berhasil tumbuh 8,5 persen (YoY). Sedangkan realisasi penerimaan PPh Nonmigas ditopang oleh penerimaan dari PPh 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final. Sementara itu penerimaan cukai per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp172,3 triliun atau 104,2 persen dari targetnya. Faktor kebijakan pelunasan pita cukai dan program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT), menjadi faktor pendorong penerimaan cukai tersebut.

Gambar 23 Realisasi Komponen Penerimaan Perpajakan



Sumber: Kementerian Keuangan

Kondisi rasio pajak Indonesia memiliki tren yang cenderung menurun, dari 10,9 persen PDB (2014) menjadi 9,6 persen PDB (2019). Tanpa mobilisasi pendapatan dan perbaikan kualitas belanja di tengah

kebijakan omnibus law yang akan dijalankan, defisit ke depan berpotensi melebar.

Gambar 24 Perkembangan Penerimaan Perpajakan 2014-2019



Sumber: Kementerian Keuangan

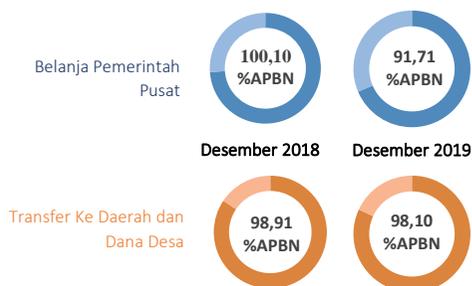
*) Realisasi Sementara s.d. 31 Desember 2019

Sementara itu, kondisi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga bulan Desember 2019 mencapai Rp405,0 triliun atau 107,1 persen dari target APBN 2019. Realisasi PNBP tersebut mengalami penurunan sebesar 1,0 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena harga minyak mentah dan lifting minyak bumi sebagai penopang utama penerimaan SDA mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara PNBP dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan tahun 2019 tumbuh sebesar 79,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya terutama berasal dari pendapatan surplus Bank Indonesia.

Sampai akhir Desember 2019, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.310,2 triliun, meningkat 4,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018. Dari sisi kualitas, pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas belanja negara. Usaha dalam

meningkatkan kualitas belanja negara ini tercermin dalam alokasi belanja negara tahun 2020 terutama pada bidang prioritas pembangunan, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perlindungan sosial, bidang infrastruktur. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN melalui perbaikan pola penyerapan belanja. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Gambar 25 Perkembangan Komponen Belanja Negara



Sumber: Kementerian Keuangan

Sampai dengan Desember 2019, realisasi BPP mencapai Rp1.498,9 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2019. Realisasi BPP tersebut tumbuh sebesar 3,0 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh belanja K/L yang realisasinya mencapai Rp876,35 triliun (102,4 persen dari pagu APBN 2019) tumbuh 3,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja penyerapan anggaran K/L juga diikuti dengan kinerja pencapaian output strategis yang tinggi di bidang infrastruktur (Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan), bidang Pendidikan (Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi), bidang kesehatan (Kementerian Kesehatan), serta bidang Perlindungan Sosial (Kementerian Sosial).

Kinerja BPP yang positif dipengaruhi oleh pertumbuhan pada beberapa komponen BPP, yaitu belanja pegawai, pembayaran bunga utang, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai tumbuh 8,35 persen (YoY), dengan penyerapan sebesar 98,5 persen terhadap pagu APBN 2019, disebabkan antara lain kebijakan kenaikan gaji pokok sebesar 5 persen dan kenaikan tunjangan kinerja K/L seiring peningkatan reformasi birokrasi masing-masing K/L. Realisasi pembayaran bunga utang mencapai 99,9 persen terhadap pagu APBN 2019, tumbuh 6,8 persen dibandingkan tahun 2018. Belanja bantuan sosial menyerap hingga 110,80 persen terhadap pagu APBN 2019, tumbuh 34,1 persen (YoY) yang dipengaruhi antara lain untuk pembayaran selisih kenaikan iuran PBI program JKN (sehingga total realisasi PBI-JKN menjadi 133,9 persen dari pagu), penyaluran bantuan PKH (100 persen dari pagu), penyaluran bantuan sosial pangan (95,10 persen dari pagu), dan pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana (BNPB). Selanjutnya, belanja hibah tercatat tumbuh 325,7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut disumbang oleh tambahan belanja hibah pada tahun berjalan (tidak terprogram), antara lain untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam bentuk belanja hibah ke Pemerintah Daerah.

Di sisi lain, realisasi belanja barang, belanja modal, subsidi, dan belanja lain-

lain pada tahun 2019 lebih rendah bila dibanding dengan realisasi tahun 2018. Belanja barang tumbuh negatif 3,9 persen (YoY), karena adanya efisiensi belanja yang kurang produktif (antara lain honorarium, perjalanan dinas, dan paket meeting). Belanja modal turun sebesar 1,7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya karena pagu anggaran yang juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja subsidi menurun sebesar 6,9 persen (YoY), dipengaruhi oleh penurunan subsidi energi akibat lebih rendahnya *Indonesia Crude Price* (ICP) dan menguatnya nilai tukar dari asumsi APBN 2019. Namun, subsidi nonenergi tumbuh sebesar 2,5 persen (YoY), khususnya subsidi pupuk yang tumbuh seiring dengan perbaikan administrasi pencairan.

Sementara itu, untuk belanja non K/L, realisasi sementara tahun 2019 mencapai Rp622,6 triliun (79,9 persen terhadap pagu APBN 2019), menurun 5,5 persen (YoY). Realisasi belanja non-K/L tersebut meliputi: (i) belanja pegawai sebesar Rp126,95 triliun untuk pembayaran pensiun dan jaminan kesehatan PNS dan TNI/ POLRI; (ii) belanja barang sebesar Rp0,5 triliun, antara lain untuk dana dukungan kelayakan proyek kerjasama/*Viability Gap Fund* (VGF) dan dana fasilitas penyiapan proyek/*Project Development Facility* (PDF), serta pembayaran *trust fund*/kontribusi ke lembaga internasional; (iii) pembayaran bunga utang Rp275,5 triliun; (iv) subsidi sebesar Rp201,8 triliun, mencakup subsidi energi sebesar Rp136,9 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp64,96 triliun; (v) hibah sebesar Rp6,5 triliun, antara lain untuk kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana; dan (vi) belanja lain-lain sebesar Rp11,25 triliun.

Berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat bahwa peningkatan kinerja BPP tahun 2019 didorong oleh pelaksanaan program dan kegiatan oleh K/L. Kinerja anggaran yang positif juga didukung dengan pencapaian sasaran output strategis, antara lain di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Hingga akhir Desember 2019, TKDD mencapai Rp811,3 triliun, atau 98,1 persen dari pagu APBN 2019. Angka tersebut meningkat 7,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018.

Per Desember 2019, Dana Perimbangan telah mencapai Rp709,6 triliun atau sebesar 97,9 persen terhadap APBN. Sementara itu, DAU sebagai komponen terbesar dari Dana Perimbangan mencapai Rp420,95 triliun pada akhir Desember 2019. Apabila dibandingkan dengan targetnya terhadap APBN, realisasi DAU sampai dengan akhir Desember 2019 mencapai 100,7 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 4,85 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi penyaluran yang melebihi 100 persen tersebut disebabkan adanya kebijakan penyaluran DAU Tambahan untuk pembayaran kenaikan iuran PBI BPJS yang didaftarkan oleh Daerah sebesar Rp3,5 triliun. Selain itu, realisasi di atas juga sudah memperhitungkan realisasi penyaluran DAU Tambahan untuk bantuan pendanaan kelurahan sebesar Rp2,6 triliun.

Realisasi DAU Tambahan untuk bantuan pendanaan kelurahan sebesar Rp2,6 triliun atau 87,1 persen dari pagu alokasi adalah total penyaluran DAU Tambahan Tahap I kepada 403 Pemerintah Daerah sebesar Rp1,5 triliun (97,4 persen dari pagu tahap I) dan Tahap II kepada 324 Pemerintah Daerah sebesar Rp1,15 triliun (76,7 persen dari pagu tahap II). Sedangkan, realisasi sementara DAU Tambahan untuk pembayaran kenaikan iuran PBI BPJS yang sebesar Rp3,46 triliun dari total pagu Rp3,50 triliun, menyisakan Rp0,04 triliun yang merupakan dana cadangan untuk perubahan jumlah kepesertaan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 166 tahun 2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Sampai dengan akhir Desember 2019, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp104,0 triliun atau 97,8 persen dari pagu alokasi, realisasi ini tumbuh 11,0 persen dari realisasi yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp93,7 triliun. Realisasi penyaluran tersebut terdiri dari penyaluran DBH TA 2019 sebesar Rp66,4 triliun dan penyaluran penyelesaian Kurang Bayar DBH sebesar Rp37,6 triliun.

Adapun Dana Transfer Khusus (DTK) sampai dengan akhir Desember 2019, DTK mencapai Rp184,6 triliun atau 92,1 persen terhadap APBN. Sementara itu, sampai dengan 31 Desember 2019, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah sebesar Rp64,3 triliun atau 92,7 persen dari pagu alokasi. Realisasi penyaluran tersebut didasarkan pada kebutuhan dana yang diperlukan oleh daerah dalam menyelesaikan kegiatan DAK Fisik.

Tabel 18 Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Keterangan	Oktober 2018		Oktober 2019	
	Nominal (triliun Rupiah)	% APBN	Nominal (triliun Rupiah)	% APBN
Transfer Ke Daerah	697,90	98,83	741,48	97,98
Dana Perimbangan	668,64	98,82	709,61	97,93
Dana Bagi Hasil	93,70	105,02	103,97	97,77
Dana Alokasi Umum	401,48	100,00	420,95	100,74
Dana Transfer Khusus	173,44	93,31	184,67	92,17
Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang	21,05	100,00	22,17	100,00
Dana Insentif Daerah	8,23	96,83	9,69	96,94
Dana Desa	59,85	99,77	69,81	99,73
Total	2.124,29		2.262,35	

Sumber: Kementerian Keuangan

Hingga akhir Desember 2019, realisasi Dana Desa mencapai Rp69,8 triliun atau 99,7 persen dari pagu alokasi. Secara nominal realisasi Dana Desa tumbuh 16,6 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018. Meskipun demikian, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong daerah untuk segera memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan capaian Pendapatan dan Belanja Negara, hingga akhir Desember 2019, defisit anggaran mencapai Rp353,05 triliun atau 2,2 persen terhadap PDB. Besaran defisit ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 yang mencapai Rp259,8 triliun. Meningkatnya defisit anggaran, menyebabkan kebutuhan pembiayaan mengalami peningkatan, khususnya pembiayaan utang yang telah mencapai 121,2 persen dari target APBN 2019.

Gambar 26 Perkembangan Realisasi Defisit APBN



Sumber: Kementerian Keuangan

Peningkatan defisit juga berdampak pada kenaikan stok utang Pemerintah Pusat. Hingga akhir Desember 2019, stok utang pemerintah mencapai Rp4.779,2 triliun. Dalam prakteknya, pemerintah selalu mengupayakan tindakan yang *prudent* dalam mengelola pembiayaan sehingga rasio utang terus dijaga untuk tidak melebihi batas psikologis 30 persen PDB untuk bulan Desember 2019 walaupun

batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Keuangan Negara adalah 60 persen terhadap PDB. Dari penurunan rasio utang tersebut terlihat bahwa Pemerintah membuat utang selalu disesuaikan dengan kebutuhan APBN serta sesuai dengan kondisi pasar.

Gambar 27 Perkembangan Utang Pemerintah Pusat



Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 19 Perkembangan Komponen Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Agustus-2018		Agustus-2019	
	Nominal (triliun Rupiah)	% APBN	Nominal (triliun Rupiah)	% APBN
Utang (neto)	366,60	91,84	435,40	121,2
Investasi	-61,11	93,08	-49,40	-
Pinjaman	-4,20	63,50	-17,10	57,80
Penjaminan	-1,12	100,0	-	0,00
Lainnya	0,18	100,0	15,20	-

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 20 Realisasi APBN s.d. 31 Desember 2018 dan 2019

(triliun rupiah)

Uraian	2018			2019		
	APBN	Realisasi s.d. 31 Desember	% terhadap APBN	APBN	Realisasi s.d.31 Desember	% terhadap APBN
A. Pendapatan Negara	1.894,7	1.943,7	102,6	2.165,1	1.957,2	90,4
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.893,5	1.928,1	101,8	2.164,7	1.950,4	90,1
1. Penerimaan Perpajakan	1.618,1	1.518,8	93,6	1.786,4	1.545,3	86,5
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	275,4	409,3	148,6	378,9	405	107,1
II. Hibah	1,2	15,6	1.300,5	0,4	6,8	1.560,7
B. Belanja Negara	2.220,7	2.213,1	99,7	2.461,1	2.310,2	93,9
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.454,5	1.455,3	100,1	1.634,3	1.498,9	91,7
1. Belanja K/L	847,4	846,6	99,9	855,4	876,4	102,4
2. Belanja Non K/L	607,1	608,8	100,3	778,9	622,6	79,9
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	766,2	757,8	98,8	826,8	811,3	98,1
1. Transfer ke Daerah	706,2	697,9	98,8	756,8	741,5	98
2. Dana Desa	60	59,9	99,8	70	69,8	99,7
C. Keseimbangan Primer	-87,33	-11,5	13,2	-20,1	-77,5	385,3
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B)	-325,94	-269,4		-296	-353	
% Surplus/(Defisit) Anggaran thd PDB	-2,19	-1,82		-1,84	-2,2	
E. Pembiayaan Anggaran	325,94	305,7	93,8	296	399,5	134,9
al. Pembiayaan Utang	399,22	372	93,2	359,25	435,4	121,2
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran		36,2			46,4	

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

2.4 Moneter dan Jasa Keuangan

Moneter

Kebijakan suku bunga acuan dipertahankan pada tingkat 5,00 persen

Pada triwulan IV tahun 2019, Bank Indonesia (BI) mempertahankan tingkat suku bunga kebijakan BI *7-day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 5,00 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perekonomian global yang melambat, dengan mempertimbangkan kondisi fundamental domestik yang stabil (inflasi terkendali dalam kisaran sasaran), serta meredanya tekanan eksternal.

Kebijakan mempertahankan suku bunga juga bertujuan untuk menjaga daya tarik pasar keuangan Indonesia. Upaya ini berhasil mempertahankan arus modal masuk portofolio ke Indonesia. Sepanjang triwulan IV tahun 2019, aliran modal asing yang masuk ke Indonesia mencapai USD6,4 miliar.

Transmisi suku bunga ke pasar uang berjalan dengan baik, terlihat dari penurunan suku bunga PUAB tenor 1 minggu sejak Juni 2019 sebesar 111 bps menjadi 5,06 persen. Selain itu juga terlihat dari penurunan suku bunga JIBOR tenor 1 minggu sebesar 117 bps pada Juni 2019 menjadi 5,07 persen pada akhir Desember 2019.

Bank Indonesia diperkirakan akan menurunkan beberapa basis poin suku bunga BI 7DRR pada awal tahun 2020, sebagai upaya menjaga momentum

pertumbuhan ditengah berlanjutnya pelemahan ekonomi global.

Tabel 21 Perkembangan Suku Bunga 7DRRR

Tenor	Persen (%)		
	Okt	Nov	Des
7 hari	5,00	5,00	5,00
2 minggu	5,03	5,02	5,02
1 bulan	5,05	5,04	5,04

Sumber: Bank Indonesia

Nilai tukar Rupiah menguat seiring penguatan fundamental perekonomian domestik

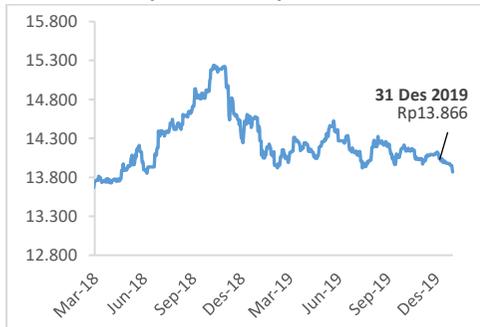
Pergerakan Rupiah terhadap dolar AS (USD) cukup stabil dan cenderung menguat sepanjang triwulan IV tahun 2019. Sejak awal hingga pertengahan periode, Rupiah berada di kisaran Rp14.000/USD, menguat mencapai level Rp13.866/USD pada akhir Desember 2019.

Penguatan Rupiah didukung oleh perbaikan kondisi internal dan pengurangan risiko yang berasal dari tekanan eksternal. Dari sisi internal, penguatan Rupiah didukung oleh: (i) struktur pasar valas yang semakin kuat, ditunjukkan oleh meningkatnya volume transaksi dan kuota yang lebih efisien; (ii) berkembangnya pasar *Domestic Non Deliverable Forward* (DNDF) yang kemudian mendukung peningkatan efisiensi pasar valas; dan (iii) kondisi fundamental yang semakin baik, ditunjukkan oleh mekanisme pasar dan meningkatnya keyakinan para pelaku pasar terhadap kredibilitas kebijakan yang ditempuh Pemerintah bersama Bank Indonesia

Dari sisi eksternal, penguatan Rupiah didukung oleh meredanya ketidakpastian

global yang tercermin dari tercapainya kesepakatan dagang tahap I antara Tiongkok dan AS pada pertengahan Desember 2019. Hal ini memberikan sentimen positif terhadap mata uang di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia.

Gambar 28 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD

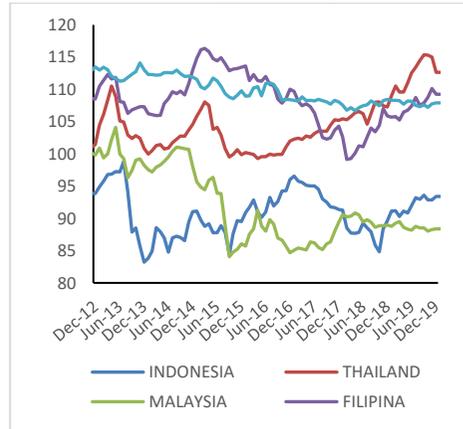


Sumber: Bloomberg, diolah

Pada triwulan IV tahun 2019 REER Rupiah relatif rendah dibandingkan mata uang negara sekawasan.

Indeks nilai tukar riil Rupiah (*Real Effective Exchange Rate/REER*) selama periode triwulan IV tahun 2019 lebih rendah dibandingkan mata uang yang berasal dari negara-negara di kawasan ASEAN diantaranya Thailand, Filipina, dan Singapura. Kondisi ini memberikan pengaruh positif dan meningkatkan daya saing ekspor khususnya produk non komoditas Indonesia serta menurunkan impor. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018, nilai REER Indonesia meningkat tipis, walaupun masih berada dibawah nilai wajar (*undervalued*). Kondisi ini mendukung upaya penurunan defisit transaksi berjalan.

Gambar 29 Real Effective Exchange Rate ASEAN-5, (2010=100)



Sumber: Bloomberg, diolah

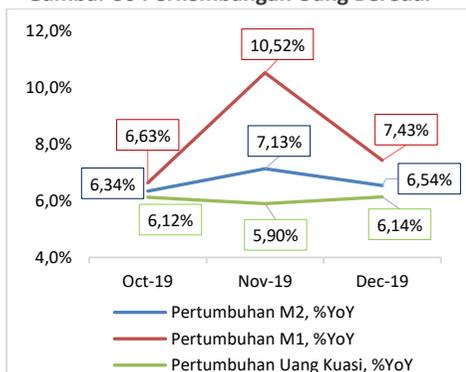
Likuiditas perekonomian (M2) mengalami peningkatan pada triwulan IV tahun 2019.

Posisi uang beredar dalam arti luas (M2) pada akhir triwulan IV tahun 2019 mencapai Rp6.136,5 triliun, tumbuh sebesar 6,5 persen (YoY). Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 7,1 persen (YoY). Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018 sebesar 6,3 persen (YoY).

Melambatnya pertumbuhan M2 selama triwulan IV tahun 2019 dipengaruhi oleh penurunan komponen uang beredar dalam arti sempit (M1). Pertumbuhan M1 selama periode Oktober-Desember 2019 masing-masing sebesar 6,6 persen; 10,5 persen; dan 7,4 persen. Penurunan pertumbuhan M1 pada Oktober 2019 dipicu oleh perlambatan giro Rupiah, sementara pada Desember 2019 dipengaruhi oleh penurunan komponen uang kartal serta giro Rupiah.

Pada awal triwulan IV tahun 2019 uang kuasi menjadi komponen yang menahan laju pertumbuhan uang beredar, hal ini disebabkan melambatnya pertumbuhan simpanan berjangka, tabungan, dan giro valuta asing. Sementara pada akhir triwulan IV tahun 2019, komponen uang kuasi mengalami peningkatan pertumbuhan yang didorong pertumbuhan giro valuta asing. Hal ini berhasil meredam perlambatan pertumbuhan uang beredar. Secara berturut-turut pada periode Oktober hingga Desember 2019 pertumbuhan uang kuasi masing-masing mencapai 6,12 persen; 5,90 persen; dan 6,14 persen.

Gambar 30 Perkembangan Uang Beredar



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Inflasi terkendali pada rentang sasaran.

Tabel 22 Tingkat Inflasi Domestik

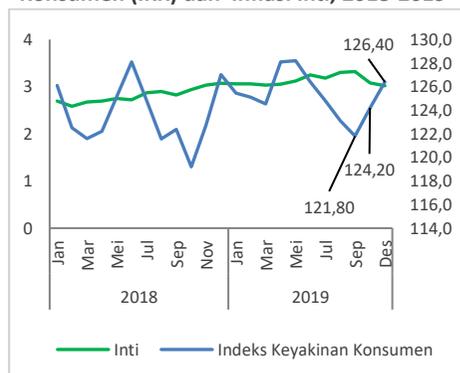
	Q4 2018			Q4 2019		
	Okt	Nov	Des	Okt	Nov	Des
YoY	3,2	3,2	3,1	3,1	3,0	2,7
MtM	0,3	0,3	0,6	0,0	0,1	0,3
YtD	2,2	2,5	3,1	2,2	2,4	2,7

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pada periode Oktober-Desember 2019, inflasi tahunan (YoY) secara berturut-turut mencapai 3,1 persen; 3,0 persen; dan 2,7 persen. Inflasi selama triwulan IV tahun 2019 lebih rendah apabila dibandingkan

dengan periode yang sama pada tahun 2018. Secara bulanan (MtM) pergerakan inflasi Oktober-Desember 2019 masing-masing bulan mencapai 0,02 persen; 0,14 persen; dan 0,34 persen. Stabil dan rendahnya inflasi tersebut dikontribusikan oleh komponen inflasi inti dan inflasi harga diatur Pemerintah ditengah kenaikan komponen inflasi harga bergejolak. Meski mengalami peningkatan, inflasi pangan menjelang HBKN Natal dan Tahun baru tetap terjaga, dipengaruhi oleh kecukupan pasokan komoditas pangan strategis termasuk cabai dan beras.

Gambar 31 Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IKK) dan Inflasi Inti, 2018-2019



Sumber: BI dan BPS, diolah

Komponen inflasi inti stabil pada kisaran 3 persen (YoY) dan cenderung mengalami penurunan selama triwulan IV tahun 2019. Penurunan ini dipengaruhi oleh pengurangan tekanan yang berasal dari harga emas global. Pergerakan inflasi inti yang stabil menunjukkan terjaganya daya beli masyarakat ditengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Terjaganya daya beli masyarakat juga ditunjukkan oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang selalu berada diatas level optimis (>100) dan meningkat sepanjang triwulan IV 2019.

Tabel 23 Tingkat Inflasi Domestik berdasarkan Komponen (YoY)

Komponen	Persentase (%)		
	Okt	Nov	Des
Inti	3,2	3,1	3,0
Harga Bergejolak	4,8	5,0	4,3
Harga diatur pemerintah	1,6	1,1	0,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Secara tahunan, pergerakan inflasi komponen *volatile foods* selama periode Oktober-Desember 2019 secara berturut-turut mencapai 4,8 persen; 5,0 persen; dan 4,3 persen. Setelah sempat memberikan tekanan terhadap inflasi pangan, komoditas cabai mulai mengalami penurunan harga seiring dengan masa panen yang berlangsung pada Oktober 2019. Sementara, komoditas yang mengalami peningkatan harga pada triwulan IV tahun 2019 adalah telur dan ayam ras. Kenaikan tersebut dipicu oleh kebijakan pemusnahan bibit ayam untuk mengatasi rendahnya harga ayam di tingkat peternak. Selain itu, penurunan produksi akibat gangguan cuaca dan belum masuknya masa panen mendorong kenaikan harga pada sejumlah komoditas holtikultura, salah satunya bawang merah. Naiknya harga beberapa komoditas pangan juga dipengaruhi oleh lonjakan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru.

Sementara itu, komponen inflasi harga diatur Pemerintah cenderung menurun sebagai dampak berlanjutnya kebijakan penerapan Tarif Batas Atas (TBA) angkutan udara yang diterapkan pada pertengahan tahun. Selain itu, penurunan tersebut seiring dengan kehati-hatian Pemerintah dalam kebijakan subsidi energi tepat sasaran.

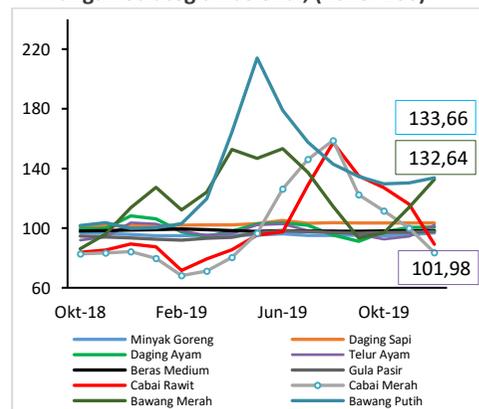
Tabel 24 Inflasi Kelompok Pengeluaran (MtM)

Kelompok Pengeluaran	Persentase (%)		
	Okt	Nov	Des
UMUM (<i>headline</i>)	0,02	0,14	0,34
Bahan Makanan	-0,41	0,37	0,78
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,08	-0,07	0,58
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	0,45	0,25	0,29
Kesehatan	0,3	0,23	0,29
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan bakar	0,08	0,12	0,09
Pendidikan, Rekreasi, dan Olah raga	0,1	0,02	-0,05
Sandang	0,08	0,03	0,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Dilihat dari kelompok pengeluaran, sebagian besar kelompok mengalami inflasi selama triwulan IV tahun 2019. Penurunan inflasi terjadi pada kelompok pengeluaran Pendidikan, rekreasi, dan olahraga yang dipengaruhi oleh meredanya tekanan biaya pendidikan seiring dengan berakhirnya tahun ajaran baru pada Oktober 2019.

Gambar 32 Perkembangan Indeks Harga Pangan Strategis Nasional, (2018=100)



Sumber: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, diolah

Indeks harga pangan strategis nasional meningkat sejalan dengan tingginya inflasi bahan pangan. Secara umum, sebagian

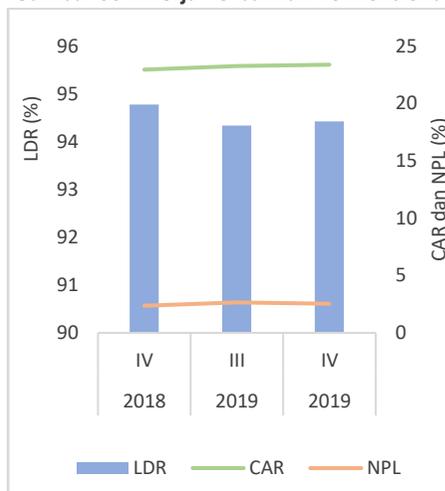
besar komoditas pangan strategis mengalami kenaikan indeks harga komoditas. Tiga komoditas yang mengalami peningkatan paling signifikan selama triwulan IV tahun 2019 yakni Bawang Putih, Bawang Merah, dan Telur Ayam.

Jasa Keuangan

Kinerja sektor jasa keuangan pada triwulan IV tahun 2019 melambat seiring perlambatan perekonomian global yang masih berlanjut.

Perbankan Konvensional. Kinerja perbankan konvensional relatif terkendali dengan ditopang oleh kondisi permodalan dan likuiditas yang terjaga. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) perbankan mencapai 23,4 persen pada triwulan IV tahun 2019, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 23,0 persen. Selain itu, likuiditas perbankan mengalami perbaikan, tercermin dari membaiknya rasio Loan to Deposit Ratio perbankan, yaitu dari 94,8 persen pada triwulan IV tahun 2018 menjadi 94,4 persen pada triwulan IV tahun 2019, atau semakin mendekati batas maksimal yang ditetapkan yaitu 94,0 persen. Selanjutnya dari segi kualitas kredit, risiko kredit pada triwulan IV tahun 2019 masih terkelola dengan baik, tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang tetap rendah yaitu 2,5 persen, atau berada di bawah batas maksimal yang ditentukan (5 persen). Kualitas kredit tersebut sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, disebabkan oleh melemahnya kondisi ekonomi yang berdampak pada terhambatnya kemampuan membayar dari para pelaku usaha.

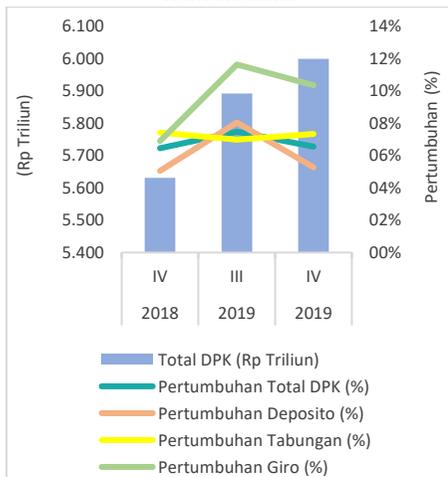
Gambar 33 Kinerja Perbankan Konvensional



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Pada triwulan IV tahun 2019, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan konvensional tumbuh sebesar 6,5 persen (YoY), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,4 persen (YoY). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen giro, yaitu sebesar 10,3 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2019, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,9 persen (YoY). Pertumbuhan tertinggi kedua terjadi pada komponen tabungan yang tumbuh sebesar 7,3 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2019, namun sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,4 persen (YoY). Sementara itu, pertumbuhan terendah terjadi pada komponen deposito yang hanya tumbuh sebesar 5,3 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2019. Pertumbuhan deposito yang belum optimal tersebut cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan DPK secara keseluruhan, mengingat deposito menempati porsi terbesar dalam DPK, yaitu sebesar 37,5 persen dari total DPK.

Gambar 34 Pertumbuhan DPK Bank Konvensional



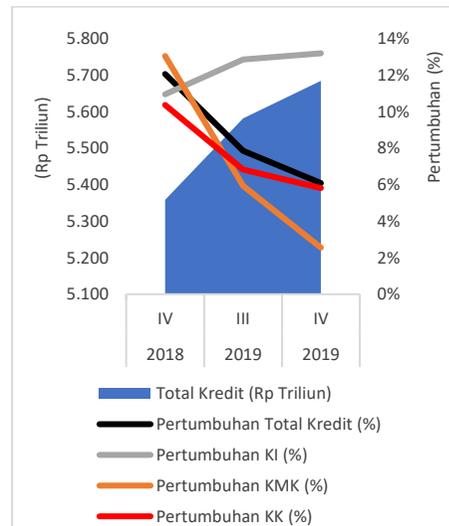
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Sejalan dengan perlambatan DPK, kredit perbankan juga mengalami perlambatan pada triwulan IV tahun 2019. Kredit perbankan hanya tumbuh sebesar 6,1 persen (YoY), lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 12,0 persen (YoY). Dilihat dari jenis penggunaannya, perlambatan tersebut utamanya disebabkan oleh perlambatan Kredit Modal Kerja (KMK) sebagai jenis kredit yang mendominasi total kredit perbankan. KMK hanya tumbuh sebesar 2,5 persen (YoY), jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,0 persen (YoY). Perlambatan KMK tersebut terutama terjadi pada Bank Buku 1 dan Buku 3.

Selain KMK, Kredit Konsumsi (KK) juga mengalami perlambatan yang cukup besar, yaitu dari 10,4 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2018 menjadi 5,8 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2019, dengan perlambatan terbesar terjadi pada bank Buku 1.

Berbeda dengan KMK dan KK, jenis Kredit Investasi (KI) mengalami pertumbuhan yang tinggi, yaitu sebesar 13,2 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2019, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,9 persen (YoY).

Gambar 35 Pertumbuhan Kredit Bank Konvensional



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Ditinjau dari lapangan usaha penerima kredit, terjadi perlambatan pertumbuhan kredit di sebagian besar sektor pada triwulan IV tahun 2019. Sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor yang mengalami perlambatan terbesar, yaitu sebesar -2,6 persen (YoY). Hal tersebut terutama terjadi di Provinsi yang sektor pertambangan dan penggalian menjadi pendukung perekonomian, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, seiring dengan menurunnya harga komoditas nonmigas dunia.

Tabel 25 Perkembangan Kredit Bank Umum Konvensional di Indonesia

Sektor	2018	2019	
	Q4	Q3	Q4
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	354.878	370.141	369.903
Perikanan	12.137	13.778	14.115
Pertambangan dan Penggalian	137.912	129.722	134.315
Industri Pengolahan	899.088	917.459	931.727
Listrik, gas dan air	170.190	197.443	198.255
Konstruksi	316.097	367.268	362.271
Perdagangan Besar dan Eceran	975.995	1.002.342	1.006.069
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	99.751	106.868	109.842
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	217.323	232.235	246.935
Perantara Keuangan	244.486	243.991	249.782
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	248.218	262.477	269.360
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	25.068	26.617	28.901
Jasa Pendidikan	12.322	13.444	14.194
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	22.698	27.995	33.576
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	79.914	80.222	82.543
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	2.715	3.412	3.415
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	173	265	280
Kegiatan yang belum jelas batasannya	2.257	1.756	1.976

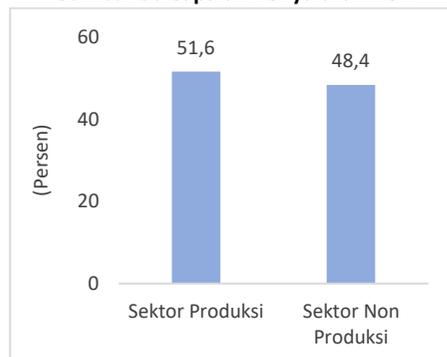
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Perlambatan kredit juga terjadi pada tiga sektor terbesar yang mendominasi penyaluran kredit, yaitu: 1) sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan, 2) sektor perdagangan besar dan eceran, dan 3) sektor industri pengolahan, yang masing-masing tumbuh sebesar 4,2 persen; 3,1 persen; dan 3,6 persen (YoY). Perlambatan penyaluran kredit pada sektor industri pengolahan terutama terjadi di Provinsi Jawa Timur, sementara perlambatan penyaluran kredit pada sektor perdagangan besar dan eceran terjadi terutama pada provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Di sisi lain, sektor perikanan dan sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum mencatatkan

pertumbuhan yang tinggi pada triwulan IV tahun 2019, masing-masing sebesar 16,3 persen dan 10,1 persen (YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,7 persen (YoY) dan 1,9 persen (YoY).

Gambar 36 Capaian Penyaluran KUR

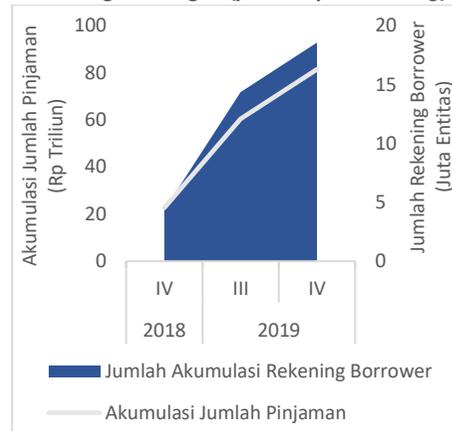


Sumber: Kemenko Perekonomian

Realisasi program pemerintah dalam pemberian akses keuangan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama tahun 2019 mencapai 99,9 persen dari target yang ditetapkan, yaitu mencapai Rp139,9 triliun, dari target 2019 adalah sebesar Rp140 triliun dengan total debitur sekitar 4,7 juta debitur. Secara akumulasi, total penyaluran KUR selama empat tahun berjalan mencapai Rp473,3 triliun, dengan rasio kredit bermasalah yang sangat rendah, yaitu sebesar 1,1 persen. Jika ditinjau lebih lanjut berdasarkan skema KUR, penyaluran KUR sepanjang tahun 2019 masih didominasi untuk skema KUR Mikro (pinjaman \leq Rp25 juta), yaitu sebesar 63,2 persen, diikuti dengan skema KUR Kecil (pinjaman Rp25 juta – Rp200juta) yaitu sebesar 36,4 persen, dan KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebesar 0,4 persen. Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro.

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, terjadi pergeseran penyaluran KUR dari sektor non produksi ke sektor produksi, meskipun penyaluran kredit kepada sektor produksi masih di bawah target yang ditetapkan yaitu 60 persen. Pergeseran penyaluran KUR tercermin dari meningkatnya porsi penyaluran KUR kepada sektor produksi, yaitu mencapai sebesar 51,6 persen pada triwulan IV tahun 2019. Berdasarkan wilayah, penyaluran KUR masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera dengan porsi masing-masing sebesar 54,3 persen dan 20,4 persen.

Gambar 37 Perkembangan Industri Teknologi Keuangan (*peer-to-peer lending*)

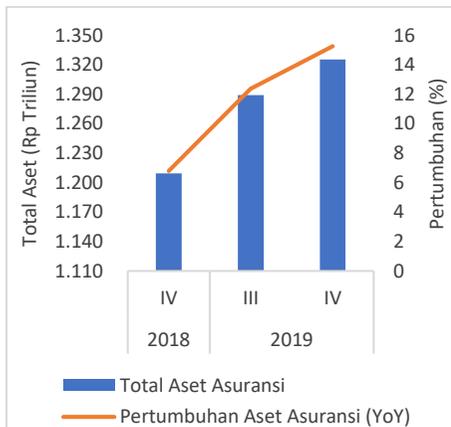


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Teknologi Keuangan (*Fintech*). Di Indonesia, industri *fintech* berkembang sangat pesat, salah satunya tercermin dari akumulasi jumlah pinjaman dan jumlah rekening peminjam. Pada triwulan IV tahun 2019, akumulasi jumlah pinjaman meningkat hingga 259,6 persen (YoY), yaitu dari Rp22,6 triliun pada triwulan IV tahun 2018 menjadi Rp81,5 triliun pada triwulan IV tahun 2019. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan akumulasi jumlah pinjaman juga diikuti dengan meningkatnya jumlah peminjam. Pada triwulan IV tahun 2019, jumlah akumulasi rekening peminjam meningkat sebesar 325,9 persen (YoY), dari 4,4 juta entitas pada triwulan IV tahun 2018 menjadi 18,6 juta entitas pada triwulan IV tahun 2019. Meskipun masih terpusat di Pulau Jawa, peningkatan jumlah akumulasi rekening peminjam tersebut menunjukkan perkembangan yang positif karena mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Dilihat dari perkembangannya, jumlah akumulasi rekening peminjam di luar Pulau Jawa tumbuh sebesar 356,5 persen (YoY), yaitu dari 694,8 ribu entitas pada

triwulan IV tahun 2018 menjadi 3,2 juta entitas pada triwulan IV tahun 2019.

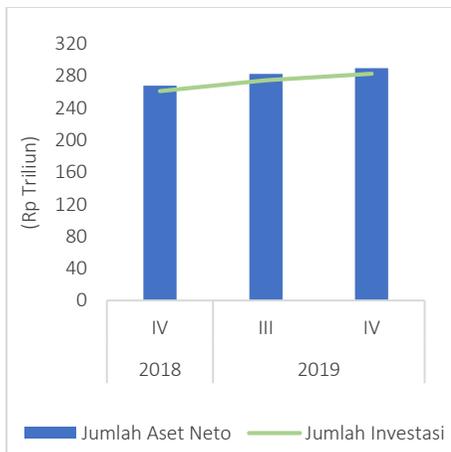
Gambar 38 Pertumbuhan Total Aset Industri Asuransi



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Asuransi. Kinerja industri asuransi pada triwulan IV tahun 2019 menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan total aset industri asuransi pada triwulan IV tahun 2019 sebesar 15,3 persen (YoY), lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,8 persen (YoY).

Gambar 39 Perkembangan Jumlah Aset Bersih dan Jumlah Investasi Dana Pensiun

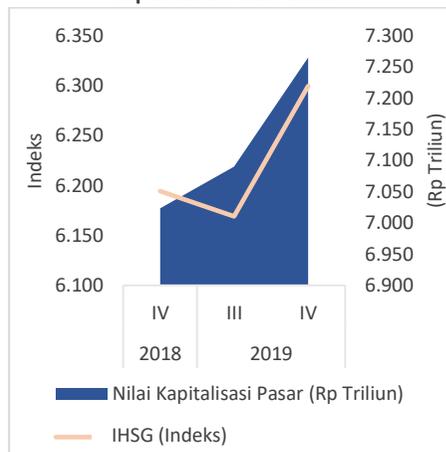


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Dana Pensiun. Pada triwulan IV tahun 2019, industri dana pensiun mengalami peningkatan, salah satunya didorong oleh meningkatnya jumlah aset neto dan jumlah investasi dana pensiun. Jumlah investasi dana pensiun pada triwulan IV tahun 2019 sebesar Rp282,6 triliun atau tumbuh sebesar 8,1 persen (YoY). Sejalan dengan hal tersebut, jumlah aset neto pada dana pensiun juga mengalami peningkatan, yaitu tumbuh sebesar 8,3 persen (YoY) atau menjadi Rp289,7 triliun pada triwulan IV tahun 2019.

Pasar Modal. Jelang tutup tahun, kinerja pasar modal pada triwulan IV tahun 2019 bergerak cukup positif di tengah gejolak geopolitik dan ekonomi global. Kinerja pasar modal yang kondusif ditandai dengan naiknya aliran modal asing yang masuk ke pasar modal domestik. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh resiko ketidakpastian global yang mereda pada triwulan IV tahun 2019 dan mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing ke negara berkembang termasuk Indonesia.

Gambar 40 Perkembangan IHSG dan Nilai Kapitalisasi Pasar Saham

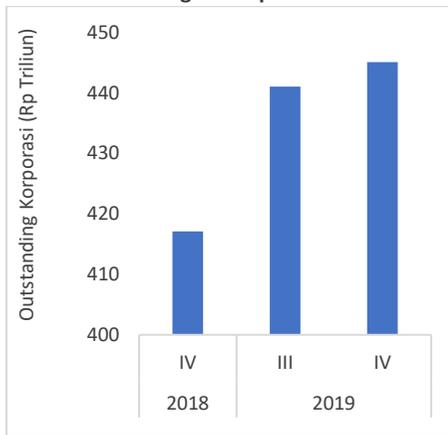


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Kondisi pasar saham kembali menguat pada triwulan IV tahun 2019, setelah sebelumnya sedikit melemah pada triwulan III tahun 2019. Penguatan tersebut salah satunya ditunjukkan oleh perkembangan nilai kapitalisasi pasar dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tumbuh positif. IHSG ditutup pada level 6.299,5 pada triwulan IV tahun 2019, tumbuh sebesar 1,7 persen (YoY).

Sejalan dengan pergerakan IHSG, nilai kapitalisasi pasar saham juga mengalami pertumbuhan yang positif. Nilai kapitalisasi pasar saham pada akhir tahun 2019 sebesar Rp7.265,0 triliun, atau tumbuh sebesar 3,4 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2018 (YoY).

Gambar 41 Perkembangan Outstanding Obligasi Korporasi

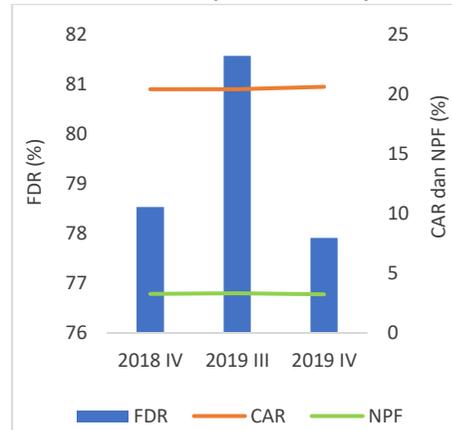


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Sementara itu, kondisi pasar obligasi korporasi juga kembali mengalami penguatan pada triwulan IV tahun 2019, setelah sempat mengalami perlambatan pertumbuhan pada akhir tahun 2018 yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga acuan (BI 7-day Reverse Repo Rate). Pada triwulan IV tahun 2019, total nilai obligasi korporasi mencapai Rp445,1 triliun, atau meningkat sebesar 6,7 persen (YoY).

Perbankan Syariah. Pada triwulan IV tahun 2019, kualitas pembiayaan yang disalurkan dan tingginya rasio kecukupan modal perbankan Syariah mengalami perbaikan. Namun demikian, fungsi intermediasi bank umum Syariah mengalami penurunan. Pada Bank Umum Syariah (BUS), rasio pembiayaan terhadap penghimpunan dana atau Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami sedikit penurunan, yaitu dari 78,5 persen pada triwulan IV tahun 2018 menjadi 77,91 persen pada triwulan IV 2019. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya perlambatan penyaluran pembiayaan. Sementara itu, pada Unit Usaha Syariah (UUS), rasio FDR masih berada di atas 100 persen. Namun, melebihi ketentuan maksimal yang ditetapkan (92 persen), fungsi intermediasi pada UUS mengalami perbaikan, yang ditunjukkan oleh menurunnya rasio FDR dari 108,7 persen pada triwulan IV tahun 2018 menjadi 101,9 persen pada triwulan IV 2019.

Gambar 42 Kinerja Perbankan Syariah

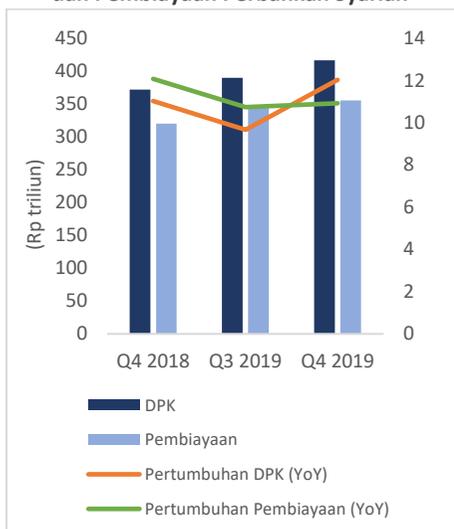


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Kinerja perbankan Syariah membaik, tercermin dari kualitas pembiayaan yang disalurkan. Rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) pada

BUS sebesar 3,2 persen pada triwulan IV tahun 2019, lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,3 persen. Sementara pada UUS, rasio pembiayaan bermasalah juga tercatat cukup rendah, yaitu 2,9 persen pada triwulan IV tahun 2019, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,2 persen. Rasio kecukupan modal bank umum Syariah triwulan IV tahun 2019 cukup tinggi, yaitu sebesar 20,6 persen atau melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditetapkan sebesar 8,0 persen.

Gambar 43 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Pada triwulan IV tahun 2019, total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan Syariah (BUS dan UUS) tumbuh sebesar 12,0 persen (YoY), lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 11,0 persen (YoY). Sejalan dengan hal tersebut, total pembiayaan perbankan Syariah juga mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 10,9 persen (YoY).

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan perbankan Syariah triwulan IV tahun 2019 masih didominasi oleh pembiayaan konsumsi, yaitu sebesar 44,4 persen dari total pembiayaan. Diikuti oleh pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi masing-masing sebesar 31,1 persen dan 24,5 persen dari total pembiayaan. Namun demikian, meskipun memiliki porsi terendah, pembiayaan investasi mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 14,8 persen (YoY).

Tabel 26 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah

Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad	Triliun Rupiah		
	2018	2019	
	Q4	Q3	Q4
Pembiayaan Investasi	75,7	84,3	87,0
Pembiayaan Modal Kerja	105,1	107,6	110,6
Pembiayaan Konsumsi	139,4	152,0	157,6
Total Pembiayaan	320,2	343,9	355,1

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Ditinjau secara sektoral, sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor konstruksi masih mendominasi penyaluran pembiayaan, masing-masing sebesar Rp36,7 triliun dan Rp31,1 triliun, atau berkontribusi masing-masing sebesar 19,0 persen dan 16,0 persen dari total pembiayaan. Sementara itu, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib merupakan sektor dengan penyaluran pembiayaan terendah, hanya Rp18 miliar pada triwulan IV tahun 2019. Namun, penyaluran pembiayaan perbankan Syariah untuk sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan perorangan mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV 2019 yaitu

sebesar 364,4 persen (YoY). Beberapa sektor ekonomi mengalami penurunan penyaluran pembiayaan, yang terbesar terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas, dan air,

serta perantara keuangan yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 15,0; 4,0; dan 1,0 persen (YoY) pada triwulan IV 2019.

Tabel 27 Penyaluran Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha

Penerima Pembiayaan Lapangan Usaha	2018		2019	
	Q3		Q2	
	(Rp miliar)			
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	11.497	13.818	13.717	
Perikanan	1.204	1.209	1.307	
Pertambangan dan Penggalian	5.410	5.676	5.086	
Industri Pengolahan	24.363	27.137	26.488	
Listrik, gas dan air	16.600	14.538	14.055	
Konstruksi	24.648	28.246	31.167	
Perdagangan Besar dan Eceran	33.166	34.921	36.752	
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	4.728	4.967	4.988	
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	9.374	9.410	9.925	
Perantara Keuangan	19.569	18.693	19.388	
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	13.315	12.998	13.404	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4	25	18	
Jasa Pendidikan	5.460	6.289	6.640	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.788	6.366	7.269	
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	5.353	6.186	6.036	
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	369	1057	885	
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	0	0	
Kegiatan yang belum jelas batasannya	938	308	434	

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Pasar Modal Syariah. Kinerja pasar modal Syariah pada triwulan IV tahun 2019 tetap positif di tengah perkembangan geopolitik dan ekonomi global yang terus bergerak dinamis. Index Saham Syariah *bluechip* yakni *Jakarta Islamic Index (JII)*, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), dan *Jakarta Islamic Index 70 (JII 70)* pada triwulan IV tahun 2019 tetap mengalami penguatan dengan pertumbuhan nilai kapitalisasi masing-masing sebesar 3,5 persen, 2,1 persen, dan 9,2 persen (YoY).

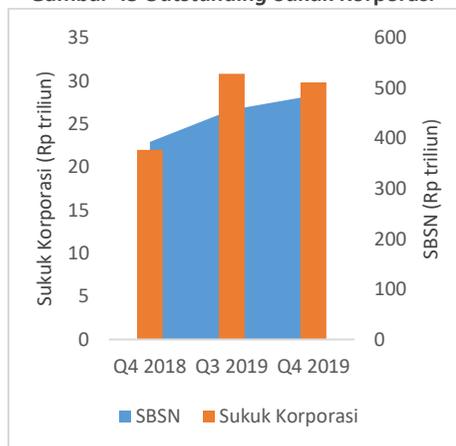
Gambar 44 Perkembangan Nilai Kapitalisasi Pasar Saham ISSI, JII dan JII70



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Sejalan dengan peningkatan nilai kapitalisasi pada pasar saham Syariah, penerbitan sukuk baik korporasi maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikeluarkan pemerintah juga mengalami peningkatan. Namun demikian, nilai *outstanding* sukuk korporasi masih jauh tertinggal dari nilai *outstanding* SBSN. Nilai *outstanding* SBSN dan korporasi pada triwulan IV tahun 2019 masing-masing adalah sebesar Rp485,5 triliun dan Rp29,8 triliun, atau meningkat masing-masing sebesar 23,6 persen (YoY) dan 35,4 persen (YoY).

Gambar 45 Outstanding Sukuk Korporasi



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan DJPR Kemenkeu

Industri Keuangan Nonbank Syariah (IKNBS). Pada triwulan IV tahun 2019, Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNBS) secara keseluruhan menunjukkan tren yang positif. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan jumlah aset IKNBS yaitu sebesar 8,7 persen (YoY). Meningkatnya jumlah aset IKNBS tersebut terutama didorong oleh tingginya kenaikan aset pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebesar 44,8 persen (YoY). Selain Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Industri Dana Pensiun Syariah juga

menyumbang peningkatan aset IKNBS secara keseluruhan, dengan pertumbuhan aset dana pensiun syariah sebesar 17,3 persen (YoY).

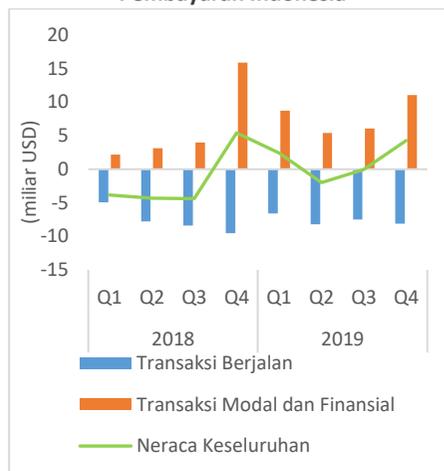
Tabel 28 Aset IKNB Syariah 2018 – 2019

Uraian	Miliar Rupiah		
	2018	2019	
	Q4	Q3	Q4
Asuransi Syariah	41.959	44.411	45.453
Lembaga Pembiayaan Syariah	25.757	27.010	27.196
Dana Pensiun Syariah	3388	4127	3973
Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah	25.733	28.155	28.536
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	278	403	403
Total Aset	97.115	104.107	105.561

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

2.5 Neraca Pembayaran

Gambar 46 Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

Neraca pembayaran kembali surplus.

Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan IV tahun 2019 mengalami surplus sebesar USD4,3 miliar, turun dibandingkan triwulan IV tahun 2018 yang

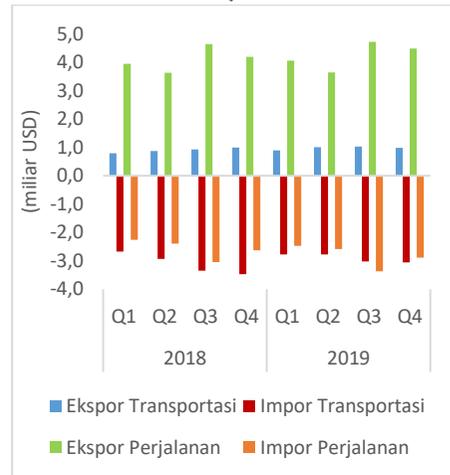
sebesar USD5,4 miliar. Hal ini didorong oleh meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial serta membaiknya defisit transaksi berjalan.

Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia pada triwulan IV tahun 2019 sebesar USD8,1 miliar, meningkat dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya (USD7,5 miliar), tetapi lebih baik dibandingkan defisit yang terjadi pada periode yang sama tahun 2018 yang mencapai USD9,5 miliar. Hal ini didorong oleh turunnya nilai impor nonmigas dan diiringi dengan kinerja ekspor nonmigas yang relatif stabil meskipun turun. Di sisi lain, neraca perdagangan migas pada triwulan IV tahun 2019 menunjukkan defisit yang lebih dalam dibandingkan triwulan IV tahun 2018. Hal tersebut dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas minyak dan gas di pasar internasional yang berdampak pada turunnya nilai ekspor produk migas Indonesia.

Sementara itu, impor barang lainnya meningkat sebesar 38,6 persen (YoY) yang diimbangi dengan peningkatan ekspor barang lainnya sebesar 63,6 persen (YoY). Dengan kinerja tersebut, barang dagang lainnya meningkat 102,6 persen (YoY) yang senilai dengan USD339 juta.

Kinerja perdagangan jasa kembali mengalami peningkatan defisit. Meskipun ekspor jasa mengalami peningkatan, namun impor jasa mengalami peningkatan yang lebih besar. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan impor pada jasa keuangan, jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi serta jasa bisnis lainnya. Defisit neraca jasa meningkat dari USD1,6 miliar pada triwulan IV tahun 2018 menjadi USD2,1 miliar pada triwulan IV tahun 2019.

Gambar 47 Neraca Jasa Perjalanan dan Transportasi

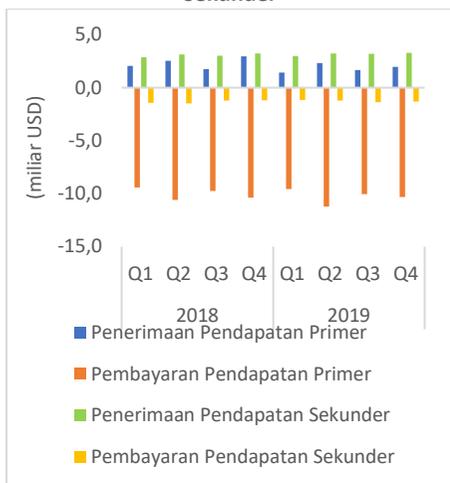


Sumber: Bank Indonesia

Defisit neraca transportasi turun, surplus perjalanan meningkat.

Neraca jasa transportasi dan neraca jasa perjalanan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan triwulan IV tahun 2018. Defisit neraca transportasi menurun sementara surplus neraca perjalanan meningkat. Peningkatan impor jasa perjalanan diimbangi dengan peningkatan pada ekspor jasa perjalanan yang lebih tinggi. Hal sebaliknya terjadi pada kinerja jasa transportasi. Turunnya ekspor jasa transportasi diimbangi dengan penurunan impor jasa transportasi yang lebih dalam dari USD3,5 miliar pada triwulan IV tahun 2018 menjadi USD3,1 miliar pada triwulan ini akibat menurunnya aktivitas impor jasa transportasi barang. Secara umum, baik kinerja ekspor maupun impor jasa transportasi turun, kecuali transportasi penumpang dimana kenaikan ekspornya lebih tinggi daripada peningkatan impornya. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara.

Gambar 48 Neraca Pendapatan Primer dan Sekunder



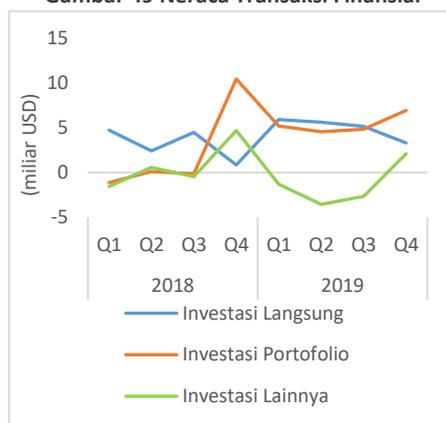
Sumber: Bank Indonesia

Pada triwulan IV tahun 2019, neraca pendapatan primer mengalami defisit sebesar USD8,3 miliar, lebih rendah dibandingkan defisit periode sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh meningkatnya penerimaan pendapatan investasi melalui peningkatan penerimaan pendapatan modal ekuitas dan pendapatan bunga investasi portofolio. Penerimaan kompensasi tenaga kerja juga meningkat dari USD49 juta pada triwulan III menjadi USD61 juta pada triwulan IV. Namun, kinerja tersebut juga diiringi dengan peningkatan pembayaran kompensasi tenaga kerja yang lebih besar. Oleh karena itu, kinerja kompensasi tenaga kerja secara keseluruhan defisit sebesar USD388 juta, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar USD383 juta.

Neraca pendapatan sekunder pada triwulan IV tahun 2019 surplus sebesar USD2,0 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya realisasi hibah yang

diterima pemerintah. Selain itu juga dipengaruhi oleh realisasi pembayaran Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lebih rendah. Sementara itu, penerimaan remitansi pekerja migran Indonesia relatif stabil sebesar USD2,9 miliar.

Gambar 49 Neraca Transaksi Finansial



Sumber: Bank Indonesia

Transaksi modal dan finansial meningkat.

Setelah terus menurun sejak triwulan I tahun 2019, transaksi modal dan finansial Indonesia pada triwulan IV kembali meningkat dengan surplus sebesar USD12,4 miliar atau setara 4,3 persen dari PDB. Investasi portofolio dan investasi lainnya mengalami peningkatan sesuai pola musiman seiring dengan penarikan simpanan bank luar negeri oleh pengusaha domestik dan meningkatnya penempatan dana nonresiden. Di sisi lain, investasi langsung mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya namun lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Penurunan tersebut sebagai dampak dari turunnya aliran masuk di sisi kewajiban yang disertai kenaikan aliran keluar di sisi aset. Cadangan devisa Indonesia pada triwulan IV tahun 2019 sebesar USD129,2 miliar,

sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut juga lebih tinggi dari standar kecukupan internasional yaitu sebesar 3 bulan impor.

Neraca Perdagangan

Tabel 29 Neraca Perdagangan dan Tingkat Pertumbuhan Ekspor Impor

Tahun	Q4 2018	Q3 2019	Q4 2019
Neraca Perdagangan (Juta USD)			
Total	-4.883,5	-115,8	-1.248,5
Migas	-3.243,9	-1.659,5	-2.908,3
Non Migas	-1.639,6	1.543,7	1.659,7
Pertumbuhan YoY (%)			
Total Ekspor	-0,9	-6,9	-3,8
Total Impor	12,3	-11,6	-10,7
Ekspor Migas	6,7	-20,4	-31,8
Impor Migas	12,0	-37,8	-22,9
Ekspor Nonmigas	-1,7	-5,6	-0,6
Impor Nonmigas	12,4	-6,6	-8,4

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Neraca perdagangan Indonesia pada triwulan IV tahun 2019 mengalami defisit sebesar USD1,2 miliar. Indonesia mengalami surplus pada sektor nonmigas sebesar USD1,7 miliar. Namun, pada sektor migas mengalami defisit yang lebih besar yakni USD2.908,3 juta.

Defisit neraca perdagangan Indonesia pada triwulan IV tahun 2019 masih lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Hanya saja, kondisi tersebut bukan didorong oleh perbaikan kinerja ekspor melainkan akibat penurunan impor yang lebih besar.

Ekspor Indonesia turun 3,8 persen (YoY).

Ekspor Indonesia pada triwulan IV tahun 2019 mencapai USD43,4 miliar, turun sebesar 3,8 persen (YoY). Penurunan

tersebut utamanya disebabkan oleh ekspor migas yang turun cukup dalam, yakni sebesar -31,8 persen (YoY), akibat penurunan harga gas dunia yang cukup tinggi (-36,5 persen, YoY) pada triwulan IV tahun 2019. Ekspor nonmigas pada triwulan IV tahun 2019 juga mengalami sedikit penurunan sebesar -0,6 persen (YoY), yang utamanya disebabkan oleh penurunan ekspor sektor pertambangan.

Tabel 30 Nilai dan Tingkat Pertumbuhan Ekspor

Kategori	Q4 2018	Q3 2019	Q4 2019
Nilai Ekspor (Juta USD)	45.050,9	43.835,4	43.352,3
Migas	4.565,0	3.310,9	3.114,6
Minyak Mentah	1.030,9	418,4	440,6
Hasil Minyak	389,8	777,8	507,7
Gas	3.144,3	2.114,7	2.166,3
Nonmigas	40.485,9	40.524,5	40.237,7
Pertanian	933,1	1.007,9	1.043,1
Industri	32.559,2	33.608,8	32.801,4
Pertambangan dan lainnya	6.993,6	5.907,8	6.393,2
Pertumbuhan Ekspor (YoY%)	-0,9	-6,9	-3,8
Migas	6,7	-20,4	-31,8
Minyak Mentah	-32,5	-71,1	-57,3
Hasil Minyak	0,1	86,8	30,2
Gas	33,0	-7,9	-31,1
Nonmigas	-1,7	-5,6	-0,6
Pertanian	-0,9	9,7	11,8
Industri	-0,9	-2,6	0,7
Pertambangan dan lainnya	-5,2	-21,3	-8,6

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Negara tujuan ekspor nonmigas utama: Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang.

Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai ekspor mencapai USD7,5 miliar atau sebesar 18,6 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia. Kemudian Amerika Serikat dan Jepang, masing-masing berkontribusi sebesar 11,6 persen dan 8,8 persen terhadap total ekspor nonmigas.

Tabel 31 Perkembangan Nilai Ekspor Nonmigas Berdasarkan 10 Negara Tujuan Ekspor Utama

Negara	Nilai Ekspor (Juta USD)			Pertumbuhan (%)		Proporsi thd Total Ekspor Nonmigas (%)
	Q4 2018	Q3 2019	Q4 2019	QtQ	YoY	
Tiongkok	5.875,4	6.958,2	7.497,7	7,8	27,6	18,6
Amerika Serikat	4.472,4	4.665,4	4.682,3	0,4	4,7	11,6
Jepang	3.797,8	3.536,2	3.521,9	-0,4	-7,3	8,8
India	3.565,8	2.793,0	3.200,7	14,6	-10,2	8,0
Singapura	2.344,9	2.635,9	2.159,6	-18,1	-7,9	5,4
Malaysia	2.072,0	1.930,3	1.955,4	1,3	-5,6	4,9
Korea Selatan	1.941,0	1.460,1	1.435,2	-1,7	-26,1	3,6
Thailand	1.329,4	1.445,2	1.297,3	-10,2	-2,4	3,2
Filipina	1.629,1	1.859,1	1.139,6	-38,7	-30,0	2,8
Vietnam	1.382,2	1.315,6	957,2	-27,2	-30,7	2,4
10 Terbesar	28.410,0	28.599,0	27.846,9	-2,6	-2,0	69,2
Lainnya	12.075,9	11.925,5	12.390,8	3,9	2,6	30,8
Total Nonmigas	40.485,9	40.524,5	40.237,7	-0,7	-0,6	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 32 Perkembangan Nilai Ekspor Berdasarkan 10 Golongan Barang HS 2 Dijiit Terbesar

Golongan Barang (HS)	Nilai Ekspor (Juta USD)			Tingkat Pertumbuhan (%)		Proporsi thd Total Ekspor Nonmigas (%)
	Q4 2018	Q3 2019	Q4 2019	QtQ	YoY	
27: Bahan Bakar Mineral	6.184,5	5.430,0	5.415,4	-0,3	-12,4	13,5
15: Lemak & Minyak Hewan / Nabati	5.082,5	4.317,9	5.213,0	20,7	2,6	13,0
85: Mesin / Peralatan Listik	2.267,7	2.359,5	2.262,1	-4,1	-0,2	5,6
87: Kendaraan dan Bagiannya	2.043,2	2.381,1	2.097,7	-11,9	2,7	5,2
72: Besi dan Baja	1.599,6	1.986,9	2.055,2	3,4	28,5	5,1
84: Mesin-mesin / Pesawat Mekanik	1.549,7	1.457,2	1.422,6	-2,4	-8,2	3,5
40: Karet dan Barang dari Karet	1.436,9	1.656,9	1.403,8	-15,3	-2,3	3,5
71: Perhiasan / Permata	1.355,1	2.066,0	1.358,6	-34,2	0,3	3,4
26: Bijih, Kerak, dan Abu Logam	987,2	702,5	1.171,3	66,7	18,7	2,9
64: Alas Kaki	1.379,6	1.056,0	1.159,3	9,8	-16,0	2,9
10 Terbesar	23.886,0	23.413,9	23.558,9	0,6	-1,4	58,5
Lainnya	16.599,9	17.110,6	16.678,8	-2,5	0,5	41,5
Total Nonmigas	40.485,9	40.524,5	40.237,7	-0,7	-0,6	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Ekspor nonmigas terbesar adalah golongan Bahan Bakar Mineral serta Lemak dan Minyak Hewan/Nabati.

Berdasarkan golongan barang HS 2 digit, ekspor nonmigas pada triwulan IV tahun 2019 masih didominasi oleh Bahan Bakar Mineral (HS 27) serta Lemak & Minyak Hewan/Nabati (HS 15), dengan proporsi terhadap total ekspor nonmigas berturut-turut sebesar 13,5 persen dan 13,0 persen. Meski demikian, golongan Bahan Bakar Mineral mengalami kontraksi sebesar 12,4 persen (YoY) akibat harga batu bara yang turun tajam pada periode tersebut. Ekspor barang yang tumbuh terbesar adalah Besi dan Baja (HS 72) serta Bijih, Kerak, dan Abu Logam (HS 26), dengan tingkat pertumbuhan sebesar 28,5 persen dan 18,7 persen (YoY). Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan harga nikel di pasar internasional akibat berkurangnya pasokan nikel dunia pasca pembatasan ekspor nikel oleh Indonesia, yang ditetapkan melalui Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019.

Selain sepuluh golongan barang tersebut, produk nonmigas yang tumbuh tinggi pada triwulan IV tahun 2019 adalah Lokomotif dan Peralatan Kereta Api (HS 86), dengan pertumbuhan sebesar 1.120,2 persen (YoY). Pada tahun 2018 PT. INKA mendapatkan kontrak pesanan 250 gerbong kereta api dari Bangladesh senilai USD100,8 juta. Atas kontrak tersebut, PT. INKA melakukan ekspor kereta secara bertahap pada tahun 2019.

Kontribusi ekspor produk manufaktur high-skill dan berbasis teknologi terhadap total ekspor sebesar 11,4 persen.

Berdasarkan klasifikasi teknologi, ekspor Indonesia masih didominasi oleh

komoditas primer. Pada triwulan IV tahun 2019, *share* ekspor produk manufaktur Indonesia hanya mencapai 48,3 persen, sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mencapai 48,9 persen. Ekspor manufaktur berteknologi tinggi pun menunjukkan sedikit penurunan pada periode ini, dimana *share* ekspor produk manufaktur berteknologi tinggi terhadap total ekspor hanya mencapai 11,4 persen.

Tabel 33 Kontribusi Ekspor Berdasarkan Klasifikasi Teknologi

Kategori	Q4 2018 (persen)	Q3 2019 (persen)	Q4 2019 (persen)
Produk Manufaktur	45,6	48,9	48,3
High-skill dan berbasis teknologi	12,0	11,6	11,4
Medium-skill dan berbasis teknologi	10,4	10,9	10,8
Low-skill dan berbasis teknologi	6,0	7,2	7,4
Padat karya dan berbasis SDA	16,1	16,8	16,5
Tidak teridentifikasi	1,0	2,3	2,2
Komoditas Primer	54,4	51,1	51,7

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Total impor Indonesia turun 10,7 persen.

Nilai total impor Indonesia pada triwulan IV tahun 2019 mencapai USD44.600,9 juta, turun 10,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Sementara itu, nilai impor nonmigas pada triwulan IV tahun 2019 mencapai USD38.578,0 juta, turun 8,4 persen (YoY). Sementara pada sektor migas, penurunannya jauh lebih tinggi yakni sebesar -22,9 persen (YoY) akibat penurunan harga minyak dan gas dunia.

Tabel 34 Nilai dan Tingkat Pertumbuhan Impor

Kategori	Q4 2018	Q3 2019	Q4 2019
Nilai Impor (USD Juta)	49.934,4	43.951,3	44.600,9
Barang			
Konsumsi	4,404.1	4,236.9	4,749.7
Bahan Baku	37,501.2	31,864.3	32,453.6
Barang Modal	8,029.1	7,850.0	7,397.6
Migas	7,808,9	4,970,4	6,022,9
Minyak Mentah	2.207,1	1.305,3	1.719,7
Hasil Minyak	4.794,6	3.124,2	3.659,6
Gas	807,2	540,9	643,6
Non Migas	42.125,5	38.980,8	38.578,0
Pertumbuhan Impor (YoY%)	12,3	-11,6	-10,7
Barang			
Konsumsi	11.0	-7.8	-7.8
Bahan Baku	13.6	-14.4	-13.5
Barang Modal	7.3	-0.5	-7.9
Migas	12,0	-37,8	-22,9
Minyak Mentah	28,2	-45,0	-22,1
Hasil Minyak	47,8	-34,5	-23,7
Gas	32,4	-36,7	-20,3
Non Migas	12,4	-6,6	-8,4

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan golongan penggunaannya, impor masih didominasi oleh golongan bahan baku dan penolong, yakni sebesar USD32.453,6 juta. Sementara impor barang modal dan barang konsumsi

masing-masing hanya sebesar USD7.397,6 juta dan USD4.749,7 juta. Dari sisi pertumbuhan, ketiga golongan tersebut mengalami penurunan, dimana penurunan terbesar terjadi pada golongan bahan baku dan penolong sebesar 13,5 (YoY).

Negara asal impor nonmigas utama adalah Tiongkok, Jepang, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat.

Berdasarkan negara asal impor, Tiongkok merupakan negara asal impor nonmigas terbesar dengan nilai impor mencapai USD12.232,2 juta dengan proporsi sebesar 31,7 persen dari total impor nonmigas pada triwulan IV tahun 2019. Negara asal impor terbesar lainnya adalah Jepang dan Singapura, masing-masing berkontribusi sebesar 9,8 persen dan 6,7 persen terhadap total impor nonmigas. Pada periode ini, impor nonmigas asal Vietnam mengalami penurunan yang paling tinggi dibandingkan dengan negara lainnya, yakni turun sebesar 32,8 persen (QtQ) atau turun sebesar 26,8 persen (YoY).

Tabel 35 Perkembangan Nilai Impor Nonmigas Berdasarkan 10 Negara Asal Impor Utama

Negara	Nilai Impor (Juta USD)			Pertumbuhan (%)		Proporsi thd Total Impor Nonmigas (%)
	Q4 2018	Q3 2018	Q4 2019	QtQ	YoY	
Tiongkok	12.764,1	11.715,1	12.232,3	4,4	-4,2	31,7
Jepang	4.636,8	4.176,5	3.762,0	-9,9	-18,9	9,8
Singapura	2.166,4	2.609,2	2.569,3	-1,5	18,6	6,7
Thailand	2.645,8	2.440,4	2.350,6	-3,7	-11,2	6,1
Amerika Serikat	2.257,7	2.148,2	1.980,1	-7,8	-12,3	5,1
Korea Selatan	2.037,1	1.844,6	1.830,6	-0,8	-10,1	4,7
Malaysia	1.711,3	1.530,7	1.438,2	-6,0	-16,0	3,7
Australia	1.405,0	1.194,8	1.190,3	-0,4	-15,3	3,1
Jerman	851,4	965,2	814,6	-15,6	-4,3	2,1
Vietnam	914,7	996,2	669,7	-32,8	-26,8	1,7
10 Terbesar	31.390,4	29.620,8	28.837,8	-2,6	-8,1	74,8
Lainnya	10.735,1	9.360,0	9.740,2	4,1	-9,3	25,2
Total Nonmigas	42.125,5	38.980,8	38.578,0	-1,0	-8,4	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 36 Perkembangan Nilai Impor Berdasarkan 10 Golongan Barang HS 2 Dijit Terbesar

Golongan Barang (HS)	Nilai Ekspor (Juta USD)			Tingkat Pertumbuhan (%)		Proporsi thd Total Ekspor Nonmigas (%)
	Q4 2018	Q3 2018	Q4 2019	QtQ	YoY	
84: Mesin-mesin / Pesawat Mekanik	7.478,4	7.361,6	6.833,4	-7,2	-8,6	17,7
85: Mesin / Peralatan Listrik	7.808,7	4.970,2	6.022,7	21,2	-22,9	15,6
72: Besi dan Baja	3.189,0	2.746,7	2.761,3	0,5	-13,4	7,2
39: Plastik dan Barang dari Plastik	2.515,7	2.319,6	2.150,5	-7,3	-14,5	5,6
87: Kendaraan dan Bagiannya	1.989,4	1.862,1	1.772,0	-4,8	-10,9	4,6
29: Bahan Kimia Organik	1.769,7	1.471,0	1.375,1	-6,5	-22,3	3,6
73: Benda-benda dari Besi dan Baja	980,5	1.003,6	950,7	-5,3	-3,0	2,5
90: Perangkat Optik	726,2	809,1	821,8	1,6	13,2	2,1
10: Sereal	936,5	694,8	768,4	10,6	-17,9	2,0
23: Ampas/Sisa Industri Makanan	823,7	654,6	714,9	9,2	-13,2	1,9
10 Terbesar	28.217,8	23.893,1	24.170,9	1,2	-14,3	62,7
Lainnya	13.907,7	15.087,7	14.407,1	-4,5	3,6	37,3
Total Nonmigas	42.125,5	38.980,8	38.578,0	-1,0	-8,4	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Impor nonmigas terbesar adalah golongan Mesin-mesin/Pesawat Mekanik dan Mesin/Peralatan Listrik.

Berdasarkan golongan barang, impor nonmigas terbesar adalah Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (HS 84) dan Mesin/Peralatan Listrik (HS 85), keduanya berkontribusi berturut-turut sebesar 17,7 persen dan 15,6 persen terhadap total impor nonmigas. Hanya saja, pertumbuhan kedua golongan barang tersebut mengalami kontraksi masing-masing sebesar 8,6 persen dan 22,9 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2019. Penurunan tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan pada triwulan IV tahun 2019.

Kerjasama Ekonomi Internasional

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Telah Diratifikasi

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) telah diratifikasi melalui pengesahan RUU IA-CEPA pada Rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Februari 2020. Perjanjian IA-CEPA sendiri telah ditandatangani sejak Maret 2019 lalu.

Bappenas berperan sebagai koordinator *Economic Cooperations IA-CEPA*. EC IA-CEPA menyepakati 5 (lima) sektor prioritas dalam kerangka kerjasama ekonomi IA-CEPA, yaitu: (1) inovasi makanan dan minuman, (2) pendidikan dan pelatihan teknik dan vokasi, (3) *grain partnership*, (4) *advanced manufacturing*, dan (5) kesehatan hewan ternak.

Tim *Expert* Australia telah melakukan kunjungan pada bulan Agustus dan

November 2019 untuk konsultasi langsung dengan Kementerian/Lembaga (K/L) maupun pihak swasta yang akan terlibat dalam program dibawah *Economic Cooperations IA-CEPA*.

Menyusul ratifikasi, saat ini tengah disiapkan agenda 100 hari kerja pelaksanaan IA-CEPA. Adapun rencana kegiatan selanjutnya adalah termasuk penyusunan *Action Plan 2020-2024* serta Kunjungan Bisnis Australia ke Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan Australia dengan membawa delegasi yang merupakan calon investor dari Australia.

Penyusunan NSPK Diplomasi Ekonomi

Seiring dengan upaya peningkatan efektivitas PTA, FTA, dan CEPA, diplomasi ekonomi menjadi salah satu strategi yang diterapkan untuk arah kebijakan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Dalam arahan yang disampaikan pada Kepala Perwakilan RI dalam Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI, Presiden menekankan agar Indonesia mengerahkan fokus pada diplomasi ekonomi dan pentingnya untuk mengidentifikasi potensi dagang dan investasi di negara mitra Indonesia. Meskipun pesan ini disampaikan pada Duta Besar, namun wewenang ekspor dan investasi ada pada Kementerian Perdagangan dan BKPM.

Penyusunan NSPK Diplomasi Ekonomi dipandang penting karena beberapa alasan, antara lain:

- 1) Konsep diplomasi ekonomi saat ini belum tersusun secara komprehensif yang mencakup definisi, tujuan,

- strategi, indikator, dan pembagian peran antar K/L;
- 2) Kurang sinergisnya kebijakan diplomasi ekonomi baik dengan pihak swasta sebagai pengguna hasil diplomasi ekonomi;
 - 3) Tersebarinya kegiatan diplomasi ekonomi di berbagai K/L serta kurang terpadunya pembagian peran antar K/L.

Oleh karena itu, perlu diinisiasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria penyelenggaraan diplomasi ekonomi yang melibatkan peran dari berbagai kementerian/lembaga terkait, misalnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Pariwisata.

Perkembangan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) telah ditandatangani pada tahun 2008 dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2009 melalui Perpres No. 50 Tahun 2009. Sedangkan amandemen terhadap Persetujuan AJCEP mulai dirundingkan sejak tahun 2011 dan ditandatangani pada tahun 2019.

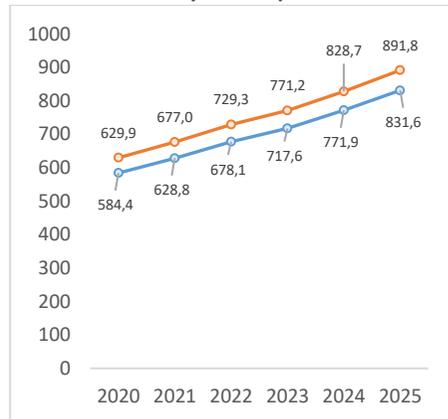
1st Protocol to Amend AJCEP bertujuan untuk menginkorporasikan 3 Bab yaitu Perdagangan Jasa, *Movement of Natural Persons (MNP)*, dan Investasi yang sebelumnya terdapat pada Chapter 6 (Perdagangan Jasa) dan Chapter 7 (Investasi) pada perjanjian tersebut.

Bab Perdagangan Jasa terdiri dari 26 Pasal yang mencakup antara lain akses pasar, komitmen spesifik, dan transparansi, serta 2 (dua) lampiran terkait pengaturan di bidang jasa keuangan (6 Pasal) dan jasa

telekomunikasi (18 Pasal). Bab MNP terdiri dari 10 Pasal yang mengatur antara lain proses aplikasi, transparansi, dan komitmen spesifik. Bab Investasi terdiri dari 23 Pasal yang mengatur peningkatan iklim investasi di negara-negara ASEAN dan Jepang melalui: Promosi, Proteksi, dan Fasilitasi Investasi.

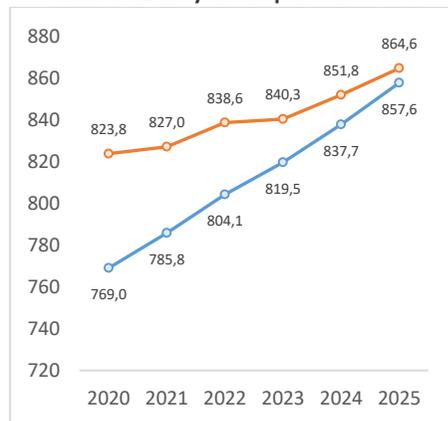
Secara umum, nilai ekspor dan impor sektor jasa Indonesia diproyeksi akan meningkat dengan implementasi *1st Protocol to Amend AJCEP*. Demikian juga nilai investasi Jepang di Indonesia diproyeksi akan mengalami peningkatan.

Gambar 50 Proyeksi Ekspor Sektor Jasa



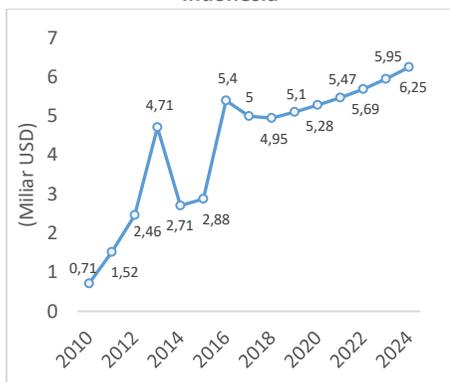
Sumber: Kementerian Perdagangan

Gambar 51 Proyeksi Impor Sektor Jasa



Sumber: Kementerian Perdagangan

Gambar 52 Proyeksi Investasi Jepang di Indonesia



Sumber: Kementerian Perdagangan

Amandemen Persetujuan AJCEP akan mulai berlaku apabila Jepang dan minimal 1 negara anggota ASEAN telah menyampaikan notifikasi ratifikasi. Namun hingga saat ini amandemen tersebut belum mulai berlaku karena Jepang belum menyampaikan notifikasi ratifikasinya. Saat ini, amandemen AJCEP di Indonesia telah dibahas pada Rapat Kerja Menteri Perdagangan dengan Komisi VI DPR RI pada Januari 2020.

Perkembangan Perjanjian Internasional Indonesia

Tabel 37 Perjanjian Internasional Indonesia

No	Perjanjian / Kerjasama	Status	Tahun
1	ASEAN Free Trade Area	Signed and In Effect	1993
2	ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement	Signed and In Effect	2010
3	ASEAN-Canada FTA	Proposed/Under consultation and study	2017
4	ASEAN-EU Free Trade Agreement	Proposed/Under consultation and study	2015
5	ASEAN-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement	Proposed/Under consultation and study	2016
6	ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement	Signed but not yet In Effect	2017
7	ASEAN-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement	Signed and In Effect	2010
8	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership	Signed and In Effect	2008
9	ASEAN-Pakistan Free Trade Agreement	Proposed/Under consultation and study	2009
10	ASEAN-People's Republic of China Comprehensive Economic Cooperation Agreement	Signed and In Effect	2005
11	ASEAN-[Republic of] Korea Comprehensive Economic Cooperation Agreement	Signed and In Effect	2007
12	Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement	Signed but not yet in effect	2012
13	Comprehensive Economic Partnership for East Asia (CEPEA/ASEAN+6)	Proposed/Under consultation and study	2005
14	East Asia Free Trade Area (ASEAN+3)	Proposed/Under consultation and study	2004
15	Eurasian Economic Union-Indonesia	Proposed/Under consultation and study	2016
16	Free Trade Area of the Asia Pacific	Proposed/Under consultation and study	2014

No	Perjanjian / Kerjasama	Status	Tahun
17	India-Indonesia Comprehensive Economic Cooperation Arrangement	Negotiations launched	2011
18	Indonesia-Chile Free Trade Agreement	Signed but not yet In Effect	2017
19	Indonesia-European Free Trade Association Free Trade Agreement	Signed but not yet In Effect	2018
20	Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement	Negotiations launched	2016
21	Indonesia-Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement	Proposed/Under consultation and study	2018
22	Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement	Signed and In Effect	2008
23	Indonesia-Kenya Free Trade Agreement	Proposed/Under consultation and study	2018
24	Indonesia-Morocco Preferential Trade Agreement	Negotiations launched	2019
25	Indonesia-Mozambique Free Trade Agreement	Negotiations launched	2018
26	Indonesia-Nigeria Preferential Trade Agreement	Proposed/Under Consultation and study	2017
27	Indonesia-Pakistan Free Trade Agreement	Signed and In Effect	2013
28	Indonesia-Peru FTA	Proposed/Under consultation and study	2014
29	Indonesia-Republic of Korea Free Trade Agreement	Negotiations launched	2012
30	Indonesia-South Africa Free Trade Agreement	Proposed/Under consultation and study	2018
31	Indonesia-Sri Lanka Free Trade Agreement	Proposed/Under consultation and study	2018
32	Indonesia-Taipei,China FTA	Proposed/Under consultation and study	2011
33	Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement	Negotiations launched	2018
34	Indonesia-Turkey FTA	Negotiations launched	2017
35	Indonesia-Ukraine Free Trade Agreement	Proposed/Under consultation and study	2016
36	Indonesia-United States Free Trade Agreement	Proposed/Under consultation and study	1997
37	Preferential Tariff Arrangement-Group of Eight Developing Countries	Signed and In Effect	2011
38	Regional Comprehensive Economic Partnership	Negotiations launched	2013
39	Trade Preferential System of the Organization of the Islamic Conference	Signed but not yet In Effect	2014

Sumber: Kementerian Perdagangan

Tabel 38 Kinerja Perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra FTA dalam (juta USD)

Kawasan / Negara	Q4 2018			Q4 2019		
	Ekspor	Impor	Neraca	Ekspor	Impor	Neraca
KAWASAN ASIA TIMUR						
Jepang	3.797,8	4.636,8	-839,0	3.521,9	3.762,0	-240,1
Korea Selatan	1.941,0	2.037,1	-96,1	1.435,2	1.830,6	-395,4
R. R. Tiongkok	5.875,4	12.764,1	-6.888,7	7.497,7	12.232,3	-4.734,6
KAWASAN ASIA TENGGARA						
Thailand	1.329,4	2.645,8	-1.316,4	1.297,3	2.350,6	-1.053,3
Singapura	2.344,9	2.166,4	178,5	2.159,6	2.569,3	-409,7
Filipina	1.645,1	264,6	1.380,5	1.619,4	196,5	1.422,9
Malaysia	2.072,0	1.711,3	360,7	1.955,4	1.438,2	517,2
Myanmar	214,1	25,1	189,0	246,7	51,9	194,8
Kamboja	143,3	8,7	134,6	187,3	8,9	178,4
Brunei Darussalam	18,5	4,7	13,8	37,4	8,5	28,9
Laos	2,6	5,2	-2,6	2,3	6,6	-4,3
Vietnam	1.393,3	915,1	478,2	1.461,5	1.024,0	437,5
KAWASAN ASIA SELATAN						
India	3.565,8	1.241,4	2.324,4	3.200,7	1.033,1	2.167,6
Pakistan	692,2	174,1	518,2	621,5	77,5	544,1
Bangladesh	429,8	19,9	409,9	554,4	26,1	528,2
KAWASAN EROPA						
Turki	221,4	228,6	-7,2	266,8	86,3	180,6
KAWASAN AFRIKA						
Mesir	224,8	38,2	186,6	302,9	23,3	279,6
Nigeria	124,0	803,7	-679,7	111,7	449,7	-338,0
KAWASAN OCEANIA						
Australia	526,1	1.405,0	-878,9	533,8	1.190,3	-656,5
Selandia Baru	144,7	202,3	-57,6	106,6	197,5	-90,9
KAWASAN TIMUR TENGAH						
Iran	68,1	13,0	55,1	30,5	4,6	25,9

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 39 Neraca Pembayaran
Tahun 2014 – Triwulan IV tahun 2019
(USD miliar)

	2014	2015	2016	2017	2018:1	2018:2	2018:3	2018:4	2019:1	2019:2	2019:3	2019:4
TRANSAKSI BERJALAN	-27,5	-17,5	-17,0	-16,2	-4,9	-7,8	-8,4	-9,5	-6,6	-8,2	-7,5	-8,1
BARANG	7,0	14,0	15,3	18,8	2,3	0,3	-0,4	-2,5	1,3	0,6	1,4	0,3
Ekspor	175,3	149,1	144,5	168,9	44,4	43,7	47,7	44,9	41,2	40,2	43,7	43,4
Impor	-168,3	-135,1	-129,2	-150,1	-42,1	-43,4	-48,1	-47,4	-39,9	-39,6	-42,3	-43,1
Barang Dagangan Umum	5,5	13,3	14,7	17,9	2,0	0,5	-0,1	-2,7	0,8	0,2	0,7	0,0
Ekspor	173,8	147,7	143,1	167,0	43,7	43,2	47,2	44,5	40,4	39,4	42,5	42,7
Impor	-168,3	-134,4	-128,4	-149,1	-41,7	-42,8	-47,3	-47,1	-39,6	-39,2	-41,8	-42,7
a. Nonmigas	17,3	19,0	19,5	25,3	4,4	3,2	3,4	0,1	2,9	3,1	2,7	3,2
Ekspor	145,0	130,5	130,2	151,4	39,7	38,8	42,6	40,0	37,4	36,4	39,5	39,7
Impor	-127,7	-111,5	-110,7	-126,2	-35,2	-35,6	-39,2	-39,9	-34,5	-33,3	-36,7	-36,5
b. Migas	-11,8	-5,7	-4,8	-7,3	-2,4	-2,7	-3,5	-2,8	-2,1	-2,9	-2,1	-3,2
Ekspor	28,8	17,2	12,9	15,6	4,1	4,4	4,6	4,4	3,0	2,9	3,0	3,0
Impor	-40,6	-22,9	-17,7	-22,9	-6,5	-7,2	-8,1	-7,2	-5,2	-5,8	-5,1	-6,2
Barang Lainnya	1,5	0,7	0,6	0,9	0,3	-0,2	-0,3	0,2	0,5	0,3	0,7	0,3
Ekspor	1,5	1,4	1,4	1,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,8	0,8	1,2	0,7
Impor	0,0	-0,7	-0,8	-1,0	-0,3	-0,7	-0,8	-0,3	-0,3	-0,5	-0,5	-0,4
JASA-JASA	-10,0	-8,7	-7,1	-7,4	-1,3	-1,7	-1,8	-1,6	-1,6	-1,9	-2,3	-2,1
Ekspor	23,5	22,2	23,3	25,3	8,0	7,1	8,2	8,0	7,4	7,4	8,4	8,4
Impor	-33,5	-30,9	-30,4	-32,7	-9,3	-8,7	-10,0	-9,7	-9,0	-9,2	-10,7	-10,4
PENDAPATAN PRIMER	-29,7	-28,4	-29,6	-32,1	-7,4	-8,0	-8,0	-7,4	-8,1	-8,9	-8,4	-8,3
PENDAPATAN SEKUNDER	5,2	5,5	4,5	4,5	1,4	1,6	1,8	2,0	1,8	2,0	1,8	2,0
TRANSAKSI MODAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,4	-1,3
TRANSAKSI FINANSIAL	44,9	16,8	29,3	28,7	2,1	3,1	4,0	15,9	9,9	6,6	7,4	12,4
Aset	-10,8	-21,5	15,9	-18,4	-6,3	-3,1	-7,5	-2,2	-6,6	-3,8	-3,9	-0,2
Kewajiban	55,7	38,3	13,4	47,1	8,5	6,2	11,5	18,1	16,5	10,4	11,4	12,6
INVESTASI LANGSUNG	14,7	10,7	16,1	18,5	4,7	2,4	4,5	0,9	5,9	5,6	5,2	3,3
Aset	-10,4	-9,1	11,6	-2,0	-0,7	-1,7	-2,3	-1,7	-0,8	-1,6	-0,6	-1,3
Kewajiban	25,1	19,8	4,5	20,5	5,4	4,1	6,8	2,6	6,7	7,2	5,8	4,7
INVESTASI PORTFOLIO	26,1	16,2	19,0	21,1	-1,1	0,1	-0,1	10,5	5,2	4,6	4,8	7,0
Aset	2,6	-1,3	2,2	-3,4	-1,4	-1,3	-1,5	-1,0	0,1	0,0	0,0	0,4
Kewajiban	23,5	17,5	16,8	24,4	0,3	1,4	1,3	11,5	5,1	4,6	4,9	6,6

	2014	2015	2016	2017	2018:1	2018:2	2018:3	2018:4	2019:1	2019:2	2019:3	2019:4
DERIVATIF FINANSIAL	-0,2	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,1	-0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
INVESTASI LAINNYA	4,3	-10,1	-5,8	-10,7	-1,5	0,6	-0,5	4,7	-1,3	-3,6	-2,7	2,1
TOTAL	17,4	-0,7	12,4	12,5	-2,7	-5	-4	6	3,3	-1,6	0,0	4,3
NERACA KESELURUHAN	15,2	-1,1	12,1	11,6	-3,9	-4	-4	5	2,4	-2,0	0,0	4,3
Posisi Cadangan Devisa	111,9	105,9	116,4	130,2	126,0	119,8	114,8	120,7	124,5	123,8	124,3	129,2
Dalam Bulan Impor	6	7,4	8	8	7,6	6,9	6,3	6,4	6,7	6,7	6,9	7,3
Transaksi Berjalan/PDB (%)	-3	-2,03	-2	-2	-1,9	-2,9	-3,2	-3,7	-2,5	-3,0	-2,6	-2,8

Sumber: Bank Indonesia, diolah

III. PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI

3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global masih melambat.

Aktivitas perdagangan internasional masih menunjukkan perlambatan hingga triwulan IV tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 secara keseluruhan diproyeksi tumbuh melambat. Proyeksi yang dirilis setiap triwulannya menunjukkan koreksi yang terus menurun. Pada bulan Oktober 2019, International Monetary Fund (IMF) merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 sebesar 3,0 persen, lebih rendah 0,2 persen dari proyeksi bulan Juli 2019. Pada tahun 2020, perekonomian global diproyeksi tumbuh lebih cepat sebesar 3,4 persen. Namun, negara-negara utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang masih akan tumbuh melambat pada tahun 2020.

Negara-negara utama diproyeksi melambat hingga tahun 2020.

Berdasarkan proyeksi Oktober 2019, Amerika Serikat diproyeksi tumbuh sebesar 2,4 persen pada tahun 2019, lebih tinggi dibandingkan proyeksi yang dikeluarkan bulan Juli (2,6 persen). Sementara itu, proyeksi pertumbuhan tahun 2020 sebesar 2,1 persen, lebih tinggi dibandingkan rilis bulan Juli 2019 (1,9 persen). Melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2020 menggambarkan hilangnya efek ekspansi fiskal yang telah diterapkan dua tahun lalu.

Perekonomian di Kawasan Eropa pada tahun 2019 diproyeksi tumbuh 1,2 persen.

Melemahnya permintaan luar dan produksi industri menekan pertumbuhan ekonomi Kawasan Eropa sejak 2018. Pada periode akhir 2019, aktivitas perekonomian akan sedikit lebih baik. Turunnya permintaan luar negeri ini memberikan dampak pada Perancis dan Jerman. Sementara itu, perekonomian Spanyol juga diproyeksi semakin melambat dari 2,2 persen pada tahun 2019 menjadi 1,8 persen pada tahun 2020.

Perekonomian Jepang pada tahun 2019 melambat disebabkan oleh turunnya kinerja sektor eksternal. Perekonomian Jepang diproyeksikan tumbuh sebesar 0,9 persen dan melambat pada tahun 2020 menjadi 0,5 persen. Hal tersebut merupakan dampak dari penurunan konsumsi swasta setelah ditingkatkannya pajak konsumsi pada bulan Oktober 2019.

Perang dagang dengan Amerika Serikat membuat perekonomian Tiongkok terpukul. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 diproyeksi melambat tajam menjadi 6,1 persen secara keseluruhan. Sementara pada tahun 2020 diproyeksi semakin melambat hingga 5,8 persen.

Negara berkembang di Asia masih menjadi penggerak perekonomian dunia. Namun, seiring dengan melambatnya perekonomian Tiongkok, pertumbuhan ekonomi kawasan juga turut melambat. Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia diproyeksi sebesar 5,9 persen pada tahun 2019 dan 6,0 persen pada tahun 2020.

Negara ASEAN-5 secara keseluruhan diproyeksi tumbuh 4,8 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 4,9 persen

pada tahun 2020. Indonesia, Thailand, dan Filipina diprediksi akan tumbuh lebih cepat pada tahun 2020. Sementara pertumbuhan Vietnam stagnan dan Malaysia tumbuh melambat dari 4,5 persen pada tahun 2019 menjadi 4,4 persen pada tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi India juga diproyeksi tumbuh lebih cepat pada 2020 menjadi 7,0 persen dari 6,1 persen pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi India yang diprediksi lebih tinggi pada tahun 2020 terutama didorong oleh pelonggaran moneter yang telah dilakukan, kebijakan pemotongan pajak perusahaan, dan program pemerintah untuk meningkatkan konsumsi di pedesaan.

Tabel 40 Proyeksi Pertumbuhan Beberapa Negara

Kawasan	2019	2020
Negara Maju		
Amerika Serikat	2,4	2,1
Kawasan Eropa	1,2	1,4
Jerman	0,5	1,2
Inggris	1,2	1,4
Jepang	0,9	0,5
Negara Berkembang		
Tiongkok	6,1	5,8
India	6,1	7,0
ASEAN-5	4,8	4,9
Amerika Latin dan Karibia		
Brazil	0,9	2,0
Sub Sahara Afrika	3,2	3,6
Afrika Selatan	0,7	1,1
Global	3,0	3,4

Sumber: *World Economic Outlook*, Oktober 2019

Harga komoditas internasional secara umum turun pada tahun 2019.

Harga komoditas energi diprediksi turun 15 persen dibandingkan tahun 2018 dan berlanjut hingga tahun 2020. Rata-rata harga minyak mentah tahun 2019 hanya sebesar USD60,0 per barel, seiring dengan

melambatnya aktivitas ekonomi dunia yang berdampak pada rendahnya permintaan terhadap minyak mentah. Pada tahun 2020 harga minyak mentah diproyeksikan akan semakin turun menjadi USD58,0 per barel disebabkan oleh suplai yang naik lebih cepat dibandingkan permintaannya. Produksi minyak mentah Amerika Serikat diprediksi meningkat tahun depan seiring dengan mulai beroperasinya pipa baru. Permintaan minyak mentah diproyeksi sedikit meningkat dengan kondisi global yang membaik. Namun demikian, kestabilan geopolitik masih menjadi isu penting yang mempengaruhi perkembangan harga minyak mentah kedepannya.

Tabel 41 Proyeksi Harga Komoditas Global

Komoditas	Unit	2019	2020
Energi			
Batubara	USD/mt	79,0	71,0
Minyak Mentah	USD/bbl	60,0	58,0
Gas Alam, Eropa	USD/mmbtu	4,5	4,5
Non Energi			
Minyak Kelapa Sawit	USD/mt	575	575
Karet	USD/kg	1,65	1,71
Tembaga	USD/mt	6.010	6.150
Emas	USD/toz	1.390	1.470

Sumber: World Bank, Oktober 2019

Seiring dengan penurunan harga minyak mentah, harga batu bara diproyeksi semakin turun dari tahun ke tahun. Sementara itu, harga gas alam tahun 2019 diproyeksi turun menjadi USD4,5 per mmbtu dan akan tetap stabil hingga 2020. Harga kedua komoditas tersebut turun terutama dipengaruhi oleh turunnya permintaan sektor industri. Sementara permintaan gas alam relatif lebih stabil berkat peningkatan penggunaan gas alam

sebagai pembangkit listrik di negara-negara maju.

Komoditas non energi juga menunjukkan perkembangan harga yang lebih rendah dari tahun sebelumnya meski kedepannya akan lebih stabil termasuk komoditas utama Indonesia. Harga rata-rata minyak kelapa sawit pada tahun 2019 diproyeksi sebesar USD575 per metrik ton dan bertahan hingga tahun 2020. Sementara itu, harga karet tahun 2019 justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar USD1,6 per kilogram. Peningkatan ini akan berlanjut hingga tahun 2020 yang diproyeksi mencapai USD1,7 per kilogram. Kondisi tersebut didorong oleh permintaan akan karet sebagai bahan ban kendaraan yang meningkat secara konsisten pada 2019 dan 2020.

Harga komoditas logam diproyeksi lebih stabil.

Komoditas jenis logam juga mengalami penurunan harga tahun 2019, namun diproyeksi kembali meningkat pada tahun 2020. Harga rata-rata tembaga pada tahun 2019 diprediksi sebesar USD6.010 per metrik ton. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya permintaan dari konsumen utama yakni Tiongkok yang mengalami perlambatan pada sektor yang berbasis pada logam. Dampak ini lebih berpengaruh pada harga dibandingkan dampak atas berkurangnya penawaran yang disebabkan oleh gangguan penambangan di Chile dan Indonesia. Sementara itu, pada tahun 2020 harga tembaga diproyeksi kembali meningkat seiring dengan efek stimulus fiskal di Tiongkok yang akan meningkatkan investasi infrastruktur.

Sementara itu, harga nikel diproyeksi meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2019, harga nikel rata-rata diprediksi mencapai USD14.140 per metrik ton dan meningkat menjadi USD14.780 per metrik ton pada tahun 2020. Naiknya harga nikel pada tahun 2019 didorong oleh terjadinya bencana alam di daerah pusat produksi nikel di Indonesia. Hal tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi ketersediaan nikel kedepannya. Sementara kenaikan harga pada tahun 2020 didorong oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang ekspor nikel mentah per Januari 2020.

Harga komoditas logam mulia terutama emas diproyeksi meningkat pada tahun ini. Rata-rata harga emas pada tahun 2019 diprediksi mencapai USD1.390 per troy ons dan kembali meningkat hingga tahun 2020 (USD1.470 per troy ons). Perkembangan harga emas kedepannya masih akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global.

3.2 Proyeksi Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 ditargetkan masih tumbuh positif dan stabil.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ditargetkan mencapai 5,3 persen. Namun pencapaian target tersebut diperkirakan tidak akan tercapai seiring dengan besarnya *downside risk* yang dihadapi, terutama dampak wabah Covid-19. Bappenas memperkirakan wabah Covid-19 berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,3-0,8 persentase poin. Dampak tersebut diperkirakan bisa lebih besar jika wabah Covid-19 meluas menjadi pandemi di tingkat global.

Tabel 42 Konsensus Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Lembaga	2020
IMF ¹⁾	5,1
World Bank ²⁾	5,1
OECD ³⁾	5,1
ADB ⁴⁾	5,2
Market (Bloomberg) ⁵⁾	5,0
Bappenas ⁶⁾	5,3

Sumber: ¹⁾World Economic Outlook (WEO) Oktober 2019 ²⁾Indonesia Economic Quarterly Reports (IEQ) Desember 2019 ³⁾OECD Economic Outlook November 2019 ⁴⁾Asian Development Outlook Desember 2019 ⁵⁾Indonesia Economic Forecast Februari 2020 ⁶⁾APBN 2020

Tabel 43 PDB Berdasarkan Pengeluaran

Komponen Pengeluaran	2019 ¹⁾	2020p ²⁾
Konsumsi RT &LNPR	5,2	4,9
Konsumsi Pemerintah	3,2	4,3
PMTB/Investasi	4,4	6,0
Ekspor	-0,9	3,7
Impor	-7,7	3,2
PDB	5,0	5,3

Sumber: ¹⁾BPS, ²⁾APBN 2020

Dari sisi pengeluaran, investasi dan konsumsi rumah tangga akan menjadi pendorong utama pertumbuhan. Kinerja investasi diperkirakan mengalami peningkatan dengan adanya Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diharapkan selesai pada pertengahan 2020. Pengurangan Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi enam sektor tertutup juga diharapkan mampu mendorong investasi. Dorongan investasi dalam tiga hingga empat triwulan ke depan juga diharapkan berasal dari transmisi penurunan suku bunga acuan oleh BI yang telah dilakukan sejak 2019. Stabilitas politik pasca Pemilu Nasional pada 2019 juga diharapkan dapat mendorong investasi.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan mengalami peningkatan, didorong tingkat

inflasi yang rendah dan alokasi anggaran sebesar Rp10 triliun untuk Kartu Pra Kerja yang ditargetkan untuk dua juta orang menganggur. Lapangan kerja baru ditargetkan sebesar 2,5 – 3 juta pada tahun 2020. Pemerintah juga akan meningkatkan alokasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Rp26,5 triliun menjadi Rp48 triliun yang akan membantu meningkatkan konsumsi rumah tangga untuk kesehatan.

Belanja pegawai dan barang dalam APBN 2020 ditargetkan lebih rendah dari tahun sebelumnya, sehingga kontribusi konsumsi pemerintah diperkirakan terbatas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di 2020.

Perdagangan masih berpotensi mengalami perlambatan akibat dampak perlambatan ekonomi Tiongkok, utamanya pasca penyebaran Virus Corona (COVID-19) dan perang dagang yang masih berkelanjutan. Larangan ekspor nikel juga akan membebani perdagangan pada tahun 2020, mengingat nikel merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia.

Meskipun demikian, masih ada ruang peningkatan ekspor pada tahun 2020 seiring peningkatan harga komoditas, utamanya *Crude Palm Oil* (CPO) dan karet. Ekspor CPO Indonesia ke India diperkirakan naik secara signifikan seiring penghilangan diskriminasi tarif terhadap CPO Indonesia dan aksi boikot CPO Malaysia. Telah diratifikasinya Indonesia-Australia (IA-CEPA) diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor.

Dari sisi lapangan usaha, dorongan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 diharapkan berasal dari industri pengolahan, sektor pertanian, dan jasa

utamanya informasi dan komunikasi serta perdagangan. Industri pengolahan diperkirakan akan mengalami peningkatan, didorong industri makanan dan minuman yang sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga; industri kimia sebagai dampak pembangunan pabrik baru di Cilegon; dan logam dasar sebagai dampak implementasi proyek *smelter*. Industri tekstil dan pakaian juga diperkirakan mengalami peningkatan sebagai dampak pengalihan perdagangan akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Tabel 44 PDB Berdasarkan Lapangan Usaha

Komponen Pengeluaran	2019 ¹⁾	2020 ²⁾
Pertanian	3,6	3,7
Pertambangan	1,2	1,9
Industri Pengolahan	3,8	5,0
Pengadaan Listrik	4,0	4,2
Pengadaan Air	6,8	4,0
Konstruksi	5,8	5,7
Perdagangan	4,6	5,5
Transportasi	6,4	7,0
Penyediaan Akomodasi	5,8	6,0
Informasi dan Komunikasi	9,4	7,3
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,6	6,3
Real Estat	5,7	4,9
Jasa Perusahaan	10,3	8,3
Administrasi Pemerintah	4,7	4,5
Jasa Pendidikan	6,3	5,1
Jasa Kesehatan	8,7	7,5
Jasa Lainnya	10,6	8,9

Sumber: ¹⁾ BPS, ²⁾ APBN 2020

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) tidak memprediksi kemungkinan besar terjadi El Nino pada paruh pertama tahun 2020, yang memberikan sinyal positif bagi sektor pertanian untuk tumbuh lebih tinggi karena cuaca yang lebih baik akan meningkatkan produksi pangan pada tahun 2020 dibandingkan 2019.

Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi serta perdagangan diharapkan mengalami peningkatan

seiring perkembangan ekonomi digital dan selesainya proyek Palapa Ring pada akhir tahun 2019.

Meski diperkirakan tumbuh menguat, perekonomian Indonesia masih dibayangi risiko negatif yang dapat memicu rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi dari perkiraan.

Pertama, perlambatan ekonomi Tiongkok yang tajam akibat wabah Covid-19 dan perang dagang yang masih berlanjut. Perlambatan ekonomi Tiongkok yang tajam akan secara signifikan berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia, mengingat cukup tingginya keterkaitan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok. Keterkaitan yang tinggi antara Tiongkok dengan Indonesia dapat dilihat dari *share* Tiongkok dalam total ekspor nonmigas Indonesia mencapai 16,7 persen, *Foreign Direct Investment* (FDI) mencapai 4,8 persen, dan kedatangan wisatawan Tiongkok mencapai 12,9 persen pada tahun 2019. Wabah Covid-19 diperkirakan dapat menurunkan pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 0,3-0,8 persentase poin.

Kedua, volatilitas kelanjutan perang dagang antara AS dan Tiongkok. Hasil pemilihan AS pada tahun 2020 akan menjadi faktor penentu *stance* kebijakan AS ke depan. Pemilu di AS juga akan meningkatkan ketidakpastian politik global pada semester kedua tahun 2020.

Ketiga, ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mendorong peningkatan harga minyak. Kenaikan harga ini menimbulkan dampak buruk pada defisit transaksi berjalan dan Rupiah. Selain itu, kenaikan harga minyak juga akan membebani pertumbuhan ekonomi

melalui peningkatan biaya untuk industri, meskipun akan berdampak positif bagi anggaran melalui peningkatan pendapatan.

Keempat, *shortfall* pendapatan negara yang dapat berdampak pada lebih rendahnya kontribusi belanja pemerintah

terhadap perekonomian. *Shortfall* pendapatan negara yang terjadi pada tahun 2019 akan berdampak pada realisasi tahun 2020. Perlambatan ekonomi yang diperkirakan terjadi seiring ketidakpastian global juga akan mempengaruhi pencapaian kinerja pendapatan negara.

SUSUNAN TIM REDAKSI

Penanggungjawab

Ir. Bambang Prijambodo, MA

Pemimpin Redaksi

Eka Chandra Buana, SE, MA

Dewan Redaksi

Dr. Ir. Boediastoeti Ontowirjo, MBA
Dr. Onny Noyorono, MIA, MA
Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, SP, MS, Ph.D
Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM
Dr. Haryanto, SE, MA
Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA
Ir. Imarita Trihanda, MS

Redaktur Pelaksana

Cut Sawalina, SE, Msi
Mochammad Firman Hidayat, SE, MA
Toni Priyanto J, S.Kom, ME
Rosy Wediawaty, SE, MSE, MSc
Tari Lestari, S.Si, SE, MS
Muhammad Fahlevy, SE, MA
P.N. Laksmi Kusumawati, SE, MSE, MSc, Ph.D
Octal Pramudito, SE, MA
Dra. Dwi Martini, ME
Yunus Gastanto, SE, PG.Dip
Istasius Angger Anindito, SE, MA
Yogi Harsudiono, SE, MPA
Ibnu Yahya, SE, M.Ec. Pol
Fajar Hadi Pratama, ST
Sukhad, S.IP
Drs. Muhammad Arif, Msi

Penulis

Filza Amalia, SE
Rakhmi Fadillah, SE
Mario Rosario Wisnu Aji, SE
Haqiqi Masnatin, SE
Rahma Hanii Maulida, SE
Rinda Komalasari, SE
Firdausy Yustiningsih, STP, ME
Hillary Tanida Stephany Sitompul, S.HI
Richard Lorenz Hasiholan Silitonga, SE
Aris Saputra, SE
Aldi Turindra Rachman, SE
Deni Apriyanto, SE
Hilda Roseline, SE
Mutiara Maulidya, SE
Widyastuti Hardaningtyas, SE
Widath Chaerunissa Ayuningtyas, SE
Zakka Farisy, SE
Imroatul Amaliyah, SE
Muhammad Fikri Masteriarsa, S.Stat

Distributor/Sirkulasi

Imam Musadad
Tulus Sujadi

Administrasi

Dina Fitriani, SPd

Editor

Rahma Hanii Maulida, SE

Grafis dan Layout

Zaid Fadhlurrahman, S.Kom

Untuk memberikan hasil laporan terbaik, kami mengharapkan saran dan kritik membangun dari pembaca.

Kritik dan saran harap dikirimkan ke alamat surat elektronik berikut

ditpmas@bappenas.go.id



*Kementerian PPN/
Bappenas*

KEDEPUTIAN BIDANG EKONOMI
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Gedung Madiun Lt. 5, Jl. Taman Suropati No. 2,
Menteng, Jakarta Pusat, 1030
Telp. (021) 31934267

